

KEWARGANEGARAAN

Volume 19, Nomor 1 (2022): Maret 2022

**Tingkat Pemahaman Materi Pendidikan Kewarganegaraan
Terkait Status Kewarganegaraan (Prinsip *Ius Soli* dan *Ius
Sanguinis*)**

Endro Tri Susdarwono

**Pergeseran Partisipasi Sosial (Masyarakat) dalam Masa
Pandemi COVID-19 (Tinjauan Fenomenologis Individu
Selama Pandemi COVID-19)**

Ignasius Putra Bagus Kurniawan

**Peran Guru PPKn dalam Mencegah Terjadinya *Bullying* Pada
Siswa Kelas VIII Smp Negeri 3 Percut Sei Tuan Tahun
Pelajaran 2020/2021**

Armi Sari Pratiwi Batubara, Adelia Endarwati, Nurhasania Siagian,
Sri Yunita, Hodriani

**Studi Analisis Konsep Ideologi Marhaenisme Sukarno
Sebagai Asas Perjuangan Bangsa Indonesia**

Febri Fajar Pratama, Ai Kusmiati Asyiah, Deni Chandra

**Nasionalisme Warga Muda di Era Globalisasi: Pendidikan
Kewarganegaraan di Perbatasan**

T Heru Nurgiansah, Fazli Rachman

**Diterbitkan oleh :
Jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Medan**

Volume 19, Nomor 1 (2022): Maret 2022
DOI Issue: 10.24114/jk.v19i1

ISSN Cetak: 1693-7287
ISSN Daring: 2745-6919



**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2022**

TIM EDITORIAL

- Pimpinan Redaksi
(*Managing Jurnal*) : **Ramsul Nababan, S.H., M.H.**
ID Sinta 6040155; Universitas Negeri Medan
- Redaktur Pelaksana
(*Editor in Chief*) : **Fazli Rachman, S.Pd., M.Pd.**
ID Sinta 6715512; Universitas Negeri Medan
- Penyunting
(*Section Editors*) : **Dr. Reh Bungana Beru Perangin-angin, S.H., M.H.**
ID Scopus 57209455239; Universitas Negeri Medan
Iqbal Arpanudin, M.Pd
ID Scopus 57218897987; Universitas Negeri Yogyakarta
Julia Ivanna, S.Sos. M.A.P.
ID Sinta 6027575; Universitas Negeri Medan
Arief Wahyudi, S.H., M.H.
ID Sinta 6031026; Universitas Negeri Medan
Prayetno, S.I.P., M.Si.
ID Sinta 6037392; Universitas Negeri Medan
- Mitra Bestari (*Reviewers*) : **Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.H., M.H., M.Si.**
ID Scopus 56976350500; Universitas Pendidikan Indonesia
Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum.
Scopus ID 57202612275; Universitas Negeri Makassar
Dr. Sanusi, S.Pd., M.Si.
Scopus ID 57216201207; Universitas Syiah Kuala
Dr. Deny Setiawan, M.Si.
ID Scopus 57194654748; Universitas Negeri Medan
Dr. Samsuri. S.Pd., M.Ag.
ID Sinta 19178; Universitas Negeri Yogyakarta
- Desain Grafis
(*Graphic Design*) : **Abdinur Batubara, S.Pd., M.Pd.**
Universitas Negeri Medan
- Tata Letak
(*Layout*) : **Maryatun Kabatiah, S.Pd., M.Pd.**
Universitas Negeri Medan

Penerbit

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Alamat Redaksi

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Medan

Jln. Willem Iskandar, Pasar V, Medan, Kode Pos 20221

Telp. (061) 6625973, 6613276, 6618754, 6613365, Fax. (061) 6614002

Email: kewarganegaraan@unimed.ac.id | Laman: <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk>

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Kewarganegaraan edisi ini sangat spesial, karena edisi ini merupakan edisi perdana diterbitkan secara daring melalui *Open Journal System* yang disediakan Universitas Negeri Medan. Secara daring, Jurnal Kewarganegaraan dapat diakses melalui laman <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk>. Tidak berbeda seperti edisi konvensional Jurnal Kewarganegaraan tetap mempublikasi karya ilmiah berupa artikel hasil penelitian dan pemikiran ilmiah.

Volume 19, Nomor 1 (2022): Maret 2022 adalah edisi Jurnal Kewarganegaraan ke-36 yang telah terbit sejak edisi pertaman Juni 2004. Jurnal kewarganegaraan awalnya secara regular terbit pada Juni dan Desember. Namun, mulai edisi Volume 17, Nomor 1 (2020): September 2020, memutuskan untuk mengubah jadwal edisi terbitan menjadi Maret dan September. Secara konsisten Jurnal Kewarganegaraan menerbitkan minimal 5 artikel setiap edisinya.

Pada edisi kali ini Jurnal Kewarganegaraan menerbitkan 5 artikel. Artikel pertama **“Tingkat Pemahaman Materi Pendidikan Kewarganegaraan Terkait Status Kewarganegaraan (Prinsip *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis*)”** oleh **Endro Tri Susdarwono**. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai tingkat pemahaman materi pendidikan kewarganegaraan terkait status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*). Bagaimana wawasan atau pengetahuan terkait kewarganegaraan dipahami oleh warga negara terutama yang sudah mendapatkan materi tersebut pada waktu mengikuti pembelajaran baik di tingkat SMA, SMK, maupun Perguruan Tinggi.

Artikel kedua berjudul **“Pergeseran Partisipasi Sosial (Masyarakat) Dalam Masa Pandemi COVID-19 (Tinjauan Fenomenologis Individu Selama Pandemi COVID-19)”** oleh **Ignasius Putra Bagus Kurniawan**. Dalam studi ini fokus tema penelitian saya ialah pada fenomena keterlibatan sosial individu Indonesia dalam menanggapi realitas pandemi COVID-19. Jika dalam situasi normal, keterlibatan individu dalam sosial terlihat aktif. Perjumpaan antar individu menjadi bentuk nyata dari keterlibatan dan kehadiran individu dalam masyarakat. Fokus studi ini ialah melihat perbedaan makna kehadiran dan keterlibatan individu dalam sosial selama masa pandemi. Masing-masing pribadi dapat berpartisipasi dalam sosial melalui cara-caranya masing-masing.

Artikel ketiga berjudul **“Peran Guru PPKn dalam Mencegah Terjadinya Bullying Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan Tahun Pelajaran 2020/2021”** oleh **Armi Sari Pratiwi Batubara, Adelia Endarwati, Nurhasania Siagian, Sri Yunita, Hodriani**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru PPKn dalam mencegah terjadinya bullying pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan Tahun Pelajaran 2020/2021.

Keempat, artikel berjudul **“Studi Analisis Konsep Ideologi Marhaenisme Sukarno Sebagai Asas Perjuangan Bangsa Indonesia”** oleh **Febri Fajar Pratama, Ai Kusmiati Asyiah, Deni Chandra**. Ideologi menjadi hal yang penting dalam tatanan

kehidupan sosial maupun bernegara. Secara filosofis, konsep ideologi sangatlah subjektif. Ada yang menganggap ideologi sebagai dogma, ada juga yang menyangkutpautkan ideologi sebagai diskursus politik dan pandangan politik. Sedangkan sebagian lagi menganggap ideologi didasarkan pada kepentingan konkret kelas sosial yang ditandai oleh tidak adanya kepentingan atas dasar ekonomi. Dalam sosio-historis bangsa Indonesia, ideologi dijadikan sebagai “alat” perjuangan untuk membentuk mental, karakter, semangat dan pemikiran anti kolonialisme, sehingga terciptalah manifestasi dari nilai-nilai fundamental keindonesiaan berupa Pancasila yang dirumuskan oleh para tokoh nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konsep tentang ideologi Marhaenisme Sukarno yang menjadi cikal bakal pemikiran/gagasan mengenai Pancasila.

Terakhir, artikel dengan judul “**Nasionalisme Warga Muda di Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan di Perbatasan**” oleh **T Heru Nurgiansah, Fazi Rachman**. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler dikembangkan untuk membentuk warga negara yang cerdas (*smart*) dan baik (*good*). Indikasi warga negara yang baik adalah keteguhan dan keyakinan atas sebuah bangsa dan terlihat dari sikap nasionalisme dan patriotisme. Penelitian ditujukan untuk mengetahui sikap nasionalisme warga negara Indonesia, khususnya generasi muda di era globalisasi.

Akhirnya, segenap tim Jurnal kewarganegaraan edisi kali ini bermanfaat untuk para akademisi, guru, pemerhati kajian kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan dan berbagai komunitas cendekia. Kami mengharapkan partisipasi melalui pengiriman artikel baik hasil penelitian dan pemikiran ilmiah pada edisi-edisi Jurnal Kewarganegaraan lanjutnya.








Harapan kami, Jurnal Kewarganegaraan ini dapat menjadi bacaan ilmiah bagi para penulis dan bagi para pembaca. Semoga edisi ini menambah khazanah dan memperdalam keilmuan kita sebagai respon terhadap tantangan zaman. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis dan penyunting yang telah bekerja keras hingga Jurnal Kewarganegaraan ini dapat diterbitkan. Kepada pembaca kami mengucapkan selamat membaca.

Medan, 30 September 2021

REDAKASI

DAFTAR ISI

VOLUME 19, NOMOR 1 (2021): MARET 2022

	PENGANTAR REDAKSI	iii
	DAFTAR ISI	v
	TINGKAT PEMAHAMAN MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERKAIT STATUS KEWARGANEGARAAN (PRINSIP <i>IUS SOLI</i> DAN <i>IUS SANGUINIS</i>) Endro Tri Susdarwono	1
	PERGESERAN PARTISIPASI SOSIAL (MASYARAKAT) DALAM MASA PANDEMI COVID-19 (TINJAUAN FENOMENOLOGIS INDIVIDU SELAMA PANDEMI COVID-19) Ignasius Putra Bagus Kurniawan	16
	PERAN GURU PPKN DALAM MENCEGAH TERJADINYA <i>BULLYING</i> PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 PERCUT SEI TUAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021 Armi Sari Pratiwi Batubara, Adelia Endarwati, Nurhasania Siagian, Sri Yunita, Hodriani.....	33
	STUDI ANALISIS KONSEP IDEOLOGI MARHAENISME SUKARNO SEBAGAI ASAS PERJUANGAN BANGSA INDONESIA Febri Fajar Pratama, Ai Kusmiati Asyiah, Deni Chandra.....	49
	NASIONALISME WARGA MUDA DI ERA GLOBALISASI: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERBATASAN T Heru Nurgiansah, Fazli Rachman.....	66

TINGKAT PEMAHAMAN MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERKAIT STATUS KEWARGANEGARAAN (PRINSIP *IUS SOLI* DAN *IUS SANGUINIS*)

Endro Tri Susdarwono

Universitas Peradaban, Jawa Tengah Indonesia
saniscara99midas@gmail.com

Abstract

*This study aims to describe the level of understanding of civic education materials related to citizenship status (the *ius soli* and *ius sanguinis* principles). How is the insight or knowledge related to citizenship understood by citizens, especially those who have received the material at the time of learning both at the high school, vocational, and university levels. The method used in conducting this research is a descriptive analysis method with a case study approach with data or information collection techniques using a survey conducted by compiling a list of questions posed to respondents. The data analysis technique used hypothesis testing through the Kruskal-Wallis method. In principle, the Kruskal-Wallis method combines all observational samples. Then, for each level a sample is given. The levels are given in order from the smallest value to the largest value. The results of the study stated that the level of understanding of civic education materials related to citizenship status material (*ius soli* and *ius sanguinis* principles) of the respondents at the three levels of education of high school students, vocational students, and college students was different. Respondents have different levels of understanding in understanding citizenship status.*

Keywords: *citizenship status; ius sanguinis; ius soli*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai tingkat pemahaman materi pendidikan kewarganegaraan terkait status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*). Bagaimana wawasan atau pengetahuan terkait kewarganegaraan dipahami oleh warga negara terutama yang sudah mendapatkan materi tersebut pada waktu mengikuti pembelajaran baik di tingkat SMA, SMK, maupun Perguruan Tinggi. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus dengan Teknik pengumpulan data atau informasi menggunakan survei yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Teknik analisis data menggunakan pengujian hipotesis melalui metode Kruskal-Wallis. Pada prinsipnya metode Kruskal-Wallis seluruh sampel pengamatan digabungkan. Kemudian, kepada setiap sampel jenjang diberikan. Jenjang diberikan secara urut dari nilai yang paling kecil hingga nilai terbesar. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden pada ketiga tingkat pendidikan siswa SMA, siswa SMK, dan Siswa Perguruan Tinggi berbeda. Responden memiliki

tingkat pemahaman yang berbeda dalam memahami mengenai status kewarganegaraan.

Kata kunci: status kewarganegaraan; *ius sanguinis*; *ius soli*

PENDAHULUAN

Salah satu bagian integral yang tidak dapat dilepaskan dalam pembangunan adalah pendidikan. Kualitas pendidikan yang baik merupakan dambaan semua pihak, baik pemerintah maupun warga sekolah (Nurgiansah, Hendri, & Khoerudin, 2021). Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan merupakan daya upaya untuk kemajuan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tumbuhnya anak (Hendri, 2020). Proses yang menyertai pendidikan selalu mengambil porsi bagian vital dalam terlaksananya proses pembangunan. Pembangunan memiliki arah dan tujuan dalam mengembangkan dan menciptakan sumber daya yang berkualitas. Segi pendidikan yang tepat dapat mendorong terciptanya manusia berkualitas. Hal ini termuat di dalam tujuan pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seutuhnya, selain beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta sehat jasmani dan rohani, juga memiliki kemampuan dan keterampilan (Rachmawati, Retnowati, & Karantiano, 2017).

Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan di sekolah-sekolah di Indonesia dengan mendasarkan kepada tujuan yang sangat mulia. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan yang sangat sempurna yang secara keseluruhan bertujuan untuk membentuk warga Negara yang baik (*to be a good citizenship*) (Fitriasari & Yudistira, 2017). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memberikan andil yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian warga negara yang cerdas sehingga suatu model pembelajaran yang menekankan pada pemberian kesempatan siswa untuk mengembangkan cara berpikir kewarganegaraan dalam PKn harus diupayakan dalam proses pembelajaran di setiap jenjang/satuan tingkat pendidikan dari SD sampai Perguruan Tinggi (Kabatiah, 2021; Nusarastriya, 2013; Rachman, Nurgiansyah, & Kabatiah, 2021). Sasaran yang terkandung dalam PKn terkait dengan pendidikan yang memuat nilai-nilai dalam pembentukan sikap dan tidak hanya penguasaan terhadap pengetahuan (Syam, 2011).

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Rosyida, 2016). Sedangkan pada dasarnya tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk meningkatkan wawasan dan watak kebangsaan, kesadaran bernegara, serta memiliki cara berpikir, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam bingkai keindonesiaan (Paturahman, 2017). PKn di Indonesia memiliki makna filosofis dalam mempersiapkan warga negara yang beradab dan bijaksana (Wibowo & Wahono, 2017).

Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar mengenai ke-Indonesia-an, belajar untuk menjadi warga negara yang berkepribadian Indonesia tentunya sesuai dengan Pancasila, membangun rasa kebangsaan dan juga

menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia (Alfiyana & Dewi, 2021). Pokok pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan, mengembangkan tiga komponen utama yakni pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak-watak kewarganegaraan (*civic dispositions*) (Rakhmat, 2015). Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia memiliki lima status (Telaumbanua, 2019) yaitu: sebagai mata pelajaran di sekolah, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai suatu *crash* program, dan sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Rakyat atau penduduk yang merupakan salah satu syarat dalam terbentuknya sebuah negara, berkaitan dengan status kewarganegaraan. Warga negara merupakan salah satu unsur yang esensial bagi berdirinya suatu negara. Dengan memiliki status kewarganegaraan, seorang individu diakui sebagai salah satu anggota dari negara yang mengakuinya, dimana pengakuan negara tersebut merupakan sebuah hubungan hukum antara dua pihak tersebut, yaitu individu dan negara yang mengakuinya (Hosseini, Arya, & Ahmadi, 2015).

Status kewarganegaraan ditentukan berdasarkan kesepakatan di dalam suatu negara. Ketentuan itu menjadi pedoman menentukan status kewarganegaraan (Wahono & Atsar, 2019). Pengaturan mengenai kewarganegaraan ini biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip *ius soli* atau prinsip *ius sanguinis*. Yang dimaksud dengan *ius soli* adalah prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, sedangkan *ius sanguinis* mendasarkan diri pada prinsip hubungan darah (Hidayat, 2013).

Penentuan status kewarganegaraan didasarkan pada kewarganegaraan yang diperoleh seseorang. Kewarganegaraan seseorang diperoleh berdasarkan tempat kelahiran atau *Ius Soli* dan kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan hubungan darah atau *Ius Sanguinis* (Kadria, 2017). Status kewarganegaraan bagi individu adalah suatu hal yang sangat penting. Warga negara merupakan salah satu unsur atau syarat berdirinya negara. Negara dan warga negara mempunyai hubungan timbal balik. Individu yang menjadi warga negara wajib mematuhi segala ketentuan hukum yang dibuat negara dan negara wajib melindungi warga negara di mana pun berada (Sigit & Novianti, 2020). Di Indonesia, pengaturan mengenai Kewarganegaraan Indonesia selain terdapat dalam konstitusi juga diatur di peraturan perundang-undangan di bawahnya (Prameswari, 2019).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur warga negara dan penduduk. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 Pasal 26) dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara (Sulaiman, 2015).

Pada UUD NRI Tahun 1945, warga negara tidak hanya diatur sebatas definisi atau pengertian, tetapi juga menyangkut hak dan kewajiban (Lazuardi, 2020). Warga negara dan negara mempunyai hubungan timbal balik dari status kewarganegaraan yang melekat pada warga negara. Hubungan timbal balik itu berupa kewajiban negara memberikan perlindungan kepada warga negara. Begitu juga sebaliknya, di mana, warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara (Fadliyah, 2018).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai tingkat pemahaman materi pendidikan kewarganegaraan terkait status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*). Bagaimana wawasan atau pengetahuan terkait kewarganegaraan dipahami oleh warga negara terutama yang sudah mendapatkan materi tersebut pada waktu mengikuti pembelajaran baik di tingkat SMA, SMK, maupun Perguruan Tinggi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif analisis adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menganalisis berbagai macam data sehingga pada akhirnya akan dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai hasil penelitian kasus tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data atau informasi menggunakan survei. Metode survei merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab akibat antarvariabel, tanpa adanya intervensi peneliti. (Kerlinger, 1973) mengatakan, bahwa penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antarvariabel sosiologis ataupun psikologis. Dengan demikian, pada metode survei peneliti mengamati karakteristik atau hubungan sebab akibat antarvariabel tanpa adanya intervensi peneliti. Survei dalam penelitian ini berupa data mengenai tingkat pemahaman materi pendidikan kewarganegaraan terkait status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) pada siswa tingkat SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi. Teknik analisis data menggunakan pengujian hipotesis melalui metode Khuskall-Wallis.

Pengujian hipotesis melalui metode Khuskall-Wallis merupakan pengembangan atau alternatif dari metode analisis varians satu arah (*one way analysis of variance*) untuk kondisi di mana beberapa persyaratan tidak bisa dipenuhi. Di antaranya data harus menyebar secara normal, nilai varians populasi harus sama dan data yang dijadikan sampel pada beberapa kelompok harus terpilih dari proses pemilihan independent secara acak. Asumsi yang harus terpenuhi adalah bahwa sampel yang terpilih itu memiliki distribusi yang kontinu sifatnya. Pada prinsipnya metode Kruskal-Wallis seluruh sampel pengamatan digabungkan. Kemudian, kepada setiap sampel jenjang diberikan. Jenjang diberikan secara urut dari nilai yang paling kecil hingga nilai terbesar. Jika pengujian hipotesis dilakukan melalui metode ini, secara umum hipotesis nihil menyatakan bahwa nilai rata-rata jumlah populasi asal sampel adalah sama. Sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa nilai rata-rata jumlah populasi asal sampel berbeda atau paling tidak ada salah satu di antaranya yang berbeda. Karena metode pengujian hipotesis

ini menyertakan suatu nilai yang ditandai dengan huruf H untuk merumuskan kriteria pengujian kesimpulan serta kesimpulan akhir, ia dinamakan pula pengujian H (H test). Nilai H dihitung dengan menerapkan rumus

$$H = \frac{12}{n \times (n+1)} \times \sum_{k=1}^k \frac{R_k^2}{n_k} - 3 \times (n + 1) \quad 1)$$

di mana H merupakan nilai H hasil perhitungan, R_k^2 adalah kuadrat jumlah jengjang secara keseluruhan pada setiap kelompok sampel, n merupakan jumlah sampel secara keseluruhan, n_k adalah jumlah sampel pada setiap kelompok, dan 1, 3, serta 12 merupakan konstanta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pendidikan Kewarganegaraan mampu memberdayakan, membudayakan peserta didik dalam arti bahwa proses dan hasil pendidikan tersebut harus mampu memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses belajar untuk memperluas wawasan (*learning to know*), belajar untuk membangun kemampuan berbuat (*learning to do*), belajar untuk hidup dan berkehidupan (*learning to be*), dan belajar untuk hidup bernegara (*learning to live together*) (Akbal, 2016). Setiap warga negara dalam pergaulan bermasyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (mentaati) peraturan hukum (Pahlevi, 2017).

Konsep 'warga' dan 'kewargaan' dapat dikatakan merupakan konsep hukum (*legal concept*) tentang suatu pengertian mengenai subjek hukum dalam rangka kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Konsep warga dan kewargaan sebagai subjek hukum merupakan konsep ciptaan hukum mengenai subjek yang diberi status sebagai penyandang hak dan kewajiban tertentu dalam kegiatan berorganisasi, yang harus dibedakan dan terpisah dari statusnya sebagai manusia biasa, atau dalam konteks subjek dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum di luar komunitas organisasi yang bersangkutan (Asshiddiqie, 2011). Status kewarganegaraan merupakan hal penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menyandang hak dan kewajiban hukum tersebut dapat dijamin secara legal dan aktual (Charity, 2016).

Istilah kewarganegaraan memiliki arti yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kewarganegaraan adalah segala hal-ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi empat, yaitu; 1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. 2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis ditandai dalam ikatan emosional. 3) Kewarganegaraan dalam arti formal menunjukkan pada tempat kewarganegaraan itu berdomisili. 4) Kewarganegaraan dalam arti material menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara (Rokilah, 2017).

Pada praktiknya ada kecenderungan yang memungkinkan seseorang memiliki kewarganegaraan rangkap (*bipatride*) atau sebaliknya, tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan rangkap ini disebabkan dianutnya asas yang berbeda

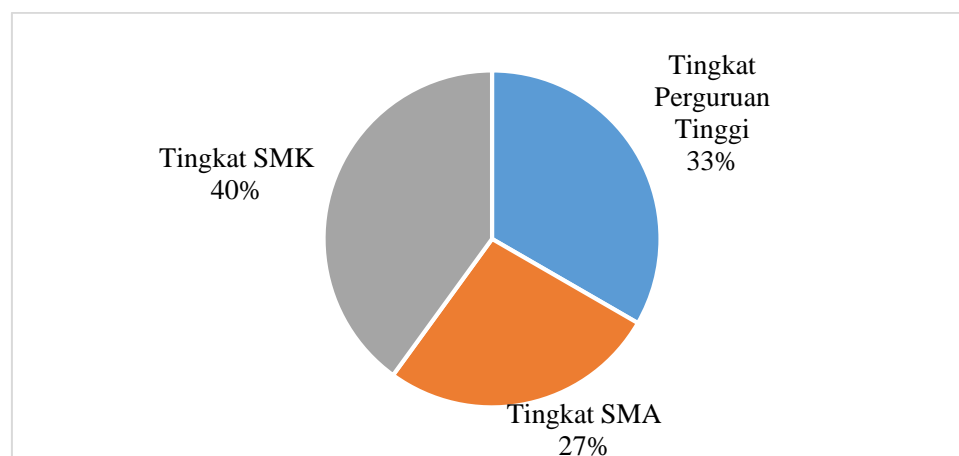
diantara dua negara dalam menentukan kewarganegaraannya. Negara yang satu menggunakan asas *ius sanguinis* dan yang lain menggunakan asas *ius soli*. Bahkan dalam perkembangannya di kemudian hari, timbul pula kebutuhan baru berdasarkan pengalaman di berbagai negara bahwa kedua asas tersebut harus diubah dengan asas yang lain atau harus diterapkan secara bersamaan untuk mencegah kemungkinan terjadinya keadaan *double-citizenship* atau dwi-kewarganegaraan (*bipatriide*) atau sebaliknya sama sekali berstatus tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Namun demikian, dalam praktik, ada pula negara yang justru menganut kedua-duanya karena pertimbangan lebih menguntungkan bagi kepentingan negara yang bersangkutan. Sistem inilah yang biasa dinamakan sebagai asas campuran. Asas yang dipakai bersifat campuran sehingga dapat menyebabkan *apatride* atau *bipatriide*. Dalam hal demikian, yang ditoleransi biasanya adalah keadaan *bipatriide*, yaitu dwi-kewarganegaraan (Darusman, 2017).

Berikut adalah persyaratan umum bagi seseorang untuk memiliki kewarganegaraan di suatu negara (Hidayati, 2016):

- a. Sedikitnya satu orang tua adalah warga negara di negara tersebut (*ius sanguinis*);
- b. Orang tersebut lahir diteritori negara bersangkutan (*ius soli*);
- c. Orang tersebut menikahi seseorang yang memiliki kewarganegaraan di negara bersangkutan (*juri matrimonii*);
- d. Orang tersebut mengalami naturalisasi;
- e. Orang tersebut diadopsi dari negara lain ketika masih dibawah umur dan sedikitnya satu orang tua asuhnya adalah warga negara di negara bersangkutan;
- f. Orang tersebut melakukan investasi uang dalam jumlah besar;

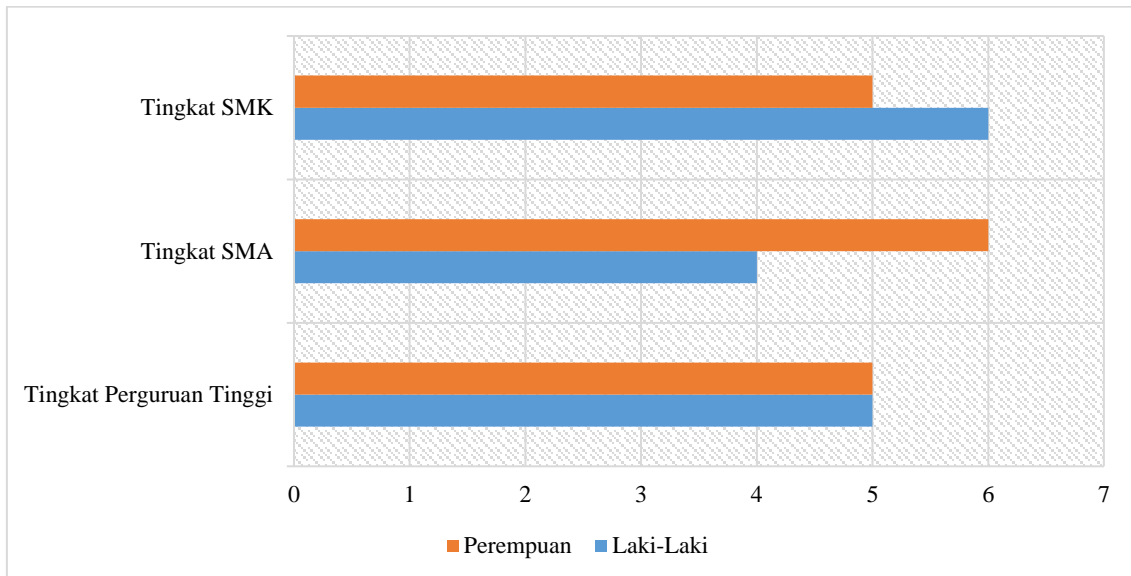
Responden yang terlibat sebagai sampel survei terkait penelitian dikategorikan pada tingkat: Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Perguruan Tinggi, yang dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1. Distribusi Responden Menurut Tingkatan Pendidikan



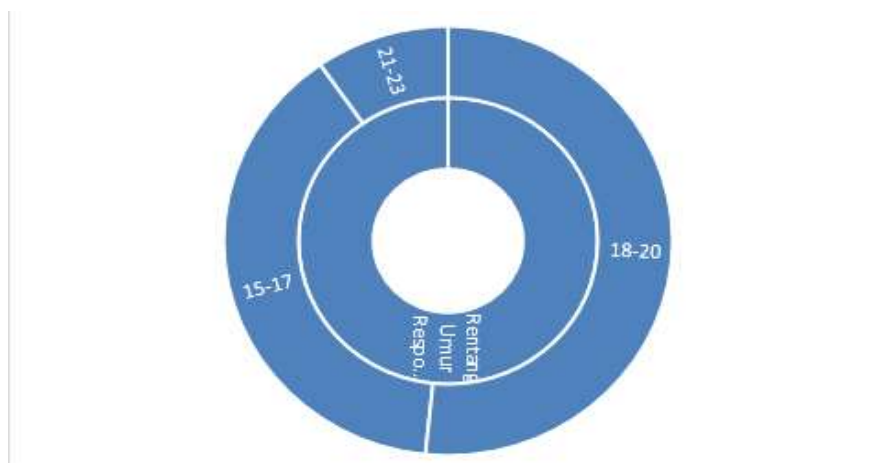
Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil survei, responden dikelompokkan menurut 3 tingkatan pendidikan yang terdiri dari tingkat SMA sebanyak 10 responden, tingkat SMK sebanyak 11 responden dan tingkat perguruan tinggi sebanyak 10 responden.

Gambar 2. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin



Sementara, berdasarkan data survei yang didapatkan dalam penelitian ini, responden yang diikutsertakan dalam sampel penelitian terdiri dari 16 responden perempuan dan 15 responden laki-laki.

Gambar 3. Distribusi Responden Menurut Umur



Sedangkan menurut rentang umur responden dikelompokkan menjadi 3 kelas interval, terdiri dari: rentang umur 15-17 sebanyak 12 responden, rentang umur 18-20 sebanyak 16 responden, dan rentang umur 21-23 sebanyak 3 responden.

Survei yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat pemahaman materi pendidikan kewarganegaraan terkait status kewarganegaraan (*prinsip ius soli* dan *ius sanguinis*) pada siswa tingkat SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi. Pada penelitian ini survei difokuskan pada siswa dan mahasiswa yang sudah mendapatkan atau menjalani pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) terkait materi status kewarganegaraan. Atas dasar survei yang dilaksanakan selama dua bulan (Juni-Juli 2021) terhadap beberapa siswa dan mahasiswa yang dijadikan sampel, diperoleh data tentang tingkat pemahaman yang dikuasai responden sebagai wawasan atau pengetahuan terkait status kewarganegaraan yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Survei Tingkat Pemahaman Terkait Materi Status Kewarganegaraan

Tingkat Perguruan Tinggi		Tingkat SMA		Tingkat SMK	
No.	Tingkat Pemahaman	No.	Tingkat Pemahaman	No.	Tingkat Pemahaman
1	5	1	8	1	6
2	10	2	5	2	5
3	6	3	10	3	7
4	6	4	7	4	3
5	7	5	3	5	4
6	8	6	10	6	10
7	4	7	6	7	7
8	10	8	3	8	10
9	8	9	10	9	7
10	10	10	10	10	10
				11	7

Dari tampilan data dalam tabel 1 di atas, tampak sejumlah angka yang menunjukkan tingkat pemahaman masing-masing responden. Terlihat ada beberapa nilai yang sama dan ada juga beberapa nilai yang berbeda. Tetapi, samakah tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden yang terdiri dari 3 tingkatan (SMA, SMK, Perguruan Tinggi) atau malah mungkin berbeda?. Pertanyaan ini dicari jawabannya melalui serangkaian langkah pengujian hipotesis. Sebelum kita melakukan pengujian atas pertanyaan di atas, maka kita akan melakukan pengujian atas kerambangan dengan tujuan untuk memenuhi anggapan dasar yang diyakini atau persyaratan yang harus dipenuhi yaitu bahwa penelitian harus dilandasi oleh keadaan yang netral sifatnya.

Karakteristik netral yang melandasi kegiatan penelitian dinilai amat penting untuk diwujudkan karena ia akan mampu menciptakan kesimpulan akhir yang valid. Netral mengandung arti bahwa penelitian yang dilakukan tidak dimulai dari keinginan untuk menentukan apalagi memaksakan suatu kesimpulan tertentu sejak awal, melainkan semata-mata berusaha mencari jawaban atau menentukan kebenaran sebagaimana yang telah disampaikan di atas. Apabila sejak awal penelitian telah dilandasi oleh keinginan untuk menentukan suatu kesimpulan tertentu atau semacam prasangka, validitas kesimpulan akhir tidak akan dapat diwujudkan.

Kondisi netral yang memperbesar kemungkinan terciptanya suatu kesimpulan akhir yang valid tersebut salah satunya dibentuk oleh proses penentuan sampel secara acak atau pemilihan sampel rambang (*random sampling*). Diasumsikan, rambangnya penentuan sampel menjadikan karakteristik netral itu lebih mudah diwujudkan karena setiap anggota dalam suatu populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih.

Pada kasus ini, kita memeriksa kebenaran data tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden yang terdiri dari 3 tingkatan (SMA, SMK, Perguruan Tinggi), dalam arti apakah data tersebut memang benar-benar diperoleh dari proses pemilihan sampel secara acak. Dengan demikian, hipotesis nihil pada intinya menyatakan bahwa nilai data tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden yang terdiri dari 3 tingkatan (SMA, SMK, Perguruan Tinggi) diperoleh dari proses pemilihan sampel secara acak. Sementara, hipotesis alternatifnya menegaskan bahwa nilai data

tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden yang terdiri dari 3 tingkatan (SMA, SMK, Perguruan Tinggi) tidak diperoleh dari proses pemilihan sampel secara acak. Dirumuskan secara simbolik, hipotesis nihil dan hipotesis alternatif dalam deskripsi kasus ini adalah:

H_0 :Nilai data jumlah tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden diperoleh dari proses pemilihan sampel secara acak.

H_1 :Nilai data jumlah tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden tidak diperoleh dari proses pemilihan sampel secara acak.

Seperti halnya yang kita ketahui Bersama, dalam pengujian atas kerambangan taraf signifikansi yang diberlakukan adalah 5% atau 0,05. Taraf signifikansi sebesar 5% itu harus dipadankan jumlah keseluruhan tanda negatif dan tanda positif dalam tabel nilai r . melalui perhitungan yang ditampilkan dalam Tabel..., jumlah keseluruhan tanda negatif adalah 12 dan tanda positif adalah 13. Dalam tabel, nilai r batas bawah apabila jumlah keseluruhan tanda positif serta tanda negatif terdiri dari 13 dan 12 adalah 8. Sedangkan nilai r batas atasnya adalah 19. Nilai r batas bawah sebesar 8 dan nilai r batas atas sebesar 19 merupakan dasar perumusan kriteria pengujian serta kesimpulan akhir pada deskripsi kasus ini.

Mengenai kriteria pengujian yang dirumuskan, hal tersebut disesuaikan dengan nilai r batas bawah dan nilai r batas atas dalam tabel. Berdasarkan penelusuran nilai r dalam tabel, hipotesis nihil dinyatakan diterima apabila $8 \leq r \leq 19$. Sedangkan hipotesis nihil ditolak apabila $r < 8$ atau $r > 19$.

Jika pengujian atas kerambangan dalam kasus ini telah sampai pada tahap perhitungan nilai r , nilai median dari kumpulan data sampel harus dicari terlebih dahulu. Untuk itu, nilai data jumlah tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden harus diurutkan dari nilai paling kecil hingga nilai terbesar. Pengurutan nilai data sampel tersebut ditampilkan dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Jenjang Nilai tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden

Urutan	1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai	3	3	3	4	4	5	5	5
Urutan	9	10	11	12	13	14	15	16
Nilai	6	6	6	6	7	7	7	7
Urutan	17	18	19	20	21	22	23	24
Nilai	7	7	8	8	8	10	10	10
Urutan	25	26	27	28	29	30	31	
Nilai	10	10	10	10	10	10	10	

Selanjutnya, letak dan nilai median harus dicari. Letak median dalam rangkaian data itu adalah:

$$\frac{31 + 1}{2} = 16$$

Letak median berdasarkan perhitungan di atas adalah 16. Dengan arti lain, nilainya adalah data ke-16. Dalam rangkaian data tersebut, nilai data ke-16 adalah 7. Dengan demikian, nilai median dalam deskripsi kasus ini adalah 7. Nilai median sebesar 7 menjadi dasar perhitungan nilai runs. Berdasarkan nilai median itu, kita dapat menentukan apakah nilai data tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden setiap responden lebih kecil atau lebih besar daripada nilai median tersebut. Perhitungan untuk mencari nilai runs ditunjukkan dalam tabel 3 di bawah ini. Tentu saja, perhitungan itu harus dilakukan tanpa mengubah urutan nilai datanya.

Tabel 3. Perhitungan Nilai Runs Tingkat Pemahaman Terhadap Materi Pendidikan Kewarganegaraan Terkait Materi Status Kewarganegaraan (Prinsip *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis*) Para Responden

No	Tingkat Pemahaman	Sekuensi Tanda	No	Tingkat Pemahaman	Sekuensi Tanda
1	5	-	17	6	-
2	10	+	18	3	-
3	6	-	19	10	+
4	6	-	20	10	+
5	7	0	21	6	-
6	8	+	22	5	-
7	4	-	23	7	0
8	10	+	24	3	-
9	8	+	25	4	-
10	10	+	26	10	+
11	8	+	27	7	0
12	5	-	28	10	+
13	10	+	29	7	0
14	7	0	30	10	+
15	3	-	31	7	0
16	10	+			

Dari perhitungan dalam tabel di atas, nilai runs atau r adalah 10 (sekuensi bertanda 0 diabaikan).

Dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, nilai r adalah 10. Nilai tersebut masih berada dalam rentang penerimaan hipotesis nihil. Karena itulah, hipotesis nihil yang menyatakan bahwa nilai data tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden diperoleh dari proses pemilihan sampel secara acak bisa dibenarkan. Sedangkan hipotesis alternative yang menyatakan bahwa nilai data tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden tidak diperoleh dari proses pemilihan sampel secara acak dinyatakan tertolak.

Setelah kita mengetahui bahwa penelitian benar dilandasi oleh keadaan yang netral sifatnya melalui pengujian atas kerambangan diatas, berikutnya dalam kasus ini langkah pengujian hipotesis yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

Jika dikaitkan dengan konteks kasus ini, hipotesis nihil yang dirumuskan menyatakan bahwa tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden pada ketiga tingkat pendidikan itu sama. Adapun hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden pada ketiga tingkat pendidikan itu berbeda. Dirumuskan secara simbolik, kedua hipotesis pada kasus ini sebagai berikut:

$$H_0 : \mu_{\text{Tingkat Pemahaman Siswa Perguruan Tinggi}} = \mu_{\text{Tingkat Pemahaman Siswa SMA}} = \mu_{\text{Tingkat Pemahaman Siswa SMK}}$$

$$H_1 : \mu_{\text{Tingkat Pemahaman Siswa Perguruan Tinggi}} \neq \mu_{\text{Tingkat Pemahaman Siswa SMA}} \neq \mu_{\text{Tingkat Pemahaman Siswa SMK}}$$

Jumlah kelompok sampel yang dijadikan responden adalah 3. Sehingga, derajat kebebasan yang diberlakukan adalah 2. Adapun taraf signifikansi misalnya saja ditetapkan sebesar 5% dan derajat kebebasan sebesar 2 adalah 5,991. Nilai khai-kuadrat dalam tabel sebesar 5,991 tersebut selanjutnya dijadikan dasar perumusan kriteria pengujian serta kesimpulan akhir.

Nilai khai-kuadrat dalam tabel telah diketahui, yaitu 5,991. Dengan demikian, kriteria pengujian hipotesis yang diberlakukan pada ilustrasi kasus ini adalah bahwa hipotesis nihil diterima apabila $H \leq 5,991$. Sedangkan hipotesis nihil ditolak jika $H > 5,991$. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, apabila prosedur pengujian hipotesis telah sampai pada tahapan ini, jumlah jenjang harus dihitung terlebih dahulu melalui beberapa langkah. Perhitungan jumlah jenjang ditampilkan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Jenjang Tingkat Pemahaman Terhadap Materi Pendidikan Kewarganegaraan Terkait Materi Status Kewarganegaraan (Prinsip *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis*) Para Responden

Urutan	1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai	3	3	3	4	4	5	5	5
Jenjang	2	2	2	4.5	4.5	7	7	7
Urutan	9	10	11	12	13	14	15	16
Nilai	6	6	6	6	7	7	7	7
Jenjang	10.5	10.5	10.5	10.5	15.5	15.5	15.5	15.5
Urutan	17	18	19	20	21	22	23	24
Nilai	7	7	8	8	8	10	10	10
Jenjang	15.5	15.5	20	20	20	26.5	26.5	26.5
Urutan	25	26	27	28	29	30	31	
Nilai	10	10	10	10	10	10	10	
Jenjang	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	

Berikut adalah tabel kerja terkait perhitungan jumlah jenjang untuk pengujian hipotesis Kruskal-Wallis.

Tabel 5. Perhitungan Jumlah Jenjang Tingkat Pemahaman Terhadap Materi Pendidikan Kewarganegaraan Terkait Materi Status Kewarganegaraan (Prinsip *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis*) Para Responden

Tingkat Perguruan Tinggi			Tingkat SMA			Tingkat SMK		
No	Tingkat Pemahaman	Jenjang	No	Tingkat Pemahaman	Jenjang	No	Tingkat Pemahaman	Jenjang
1	5	7	1	8	20	1	6	10.5
2	10	26.5	2	5	7	2	5	7
3	6	10.5	3	10	26.5	3	7	15.5
4	6	10.5	4	7	15.5	4	3	2
5	7	15.5	5	3	2	5	4	4.5
6	8	20	6	10	26.5	6	10	26.5
7	4	4.5	7	6	10.5	7	7	15.5
8	10	26.5	8	3	2	8	10	26.5
9	8	20	9	10	26.5	9	7	15.5
10	10	26.5	10	10	26.5	10	10	26.5
						11	7	15.5
	Jumlah	R ₁ = 167.5			R ₂ = 163			R ₃ = 165.5

Setelah itu, nilai khai-kuadrat dihitung dengan menerapkan formula 1 sebagaimana yang telah diterangkan di muka. Nilai khai-kuadratnya adalah

$$\begin{aligned} & \frac{12}{30 \times 31} \times \left(\frac{167.5^2}{10} + \frac{163^2}{10} + \frac{165.5^2}{11} \right) - (3 \times 31) \\ & = 0,1967 \times (2805,625 + 2656,9 + 2490,023) - (93) \\ & = 0,1967 \times 7952,54773 - 93 \\ & = 102,6135 - 93 \\ & = 9,6135 \end{aligned}$$

Kesimpulan akhir dapat dirumuskan setelah kita membandingkan nilai H dengan nilai khai-kuadrat dalam tabel selanjutnya disesuaikan dengan kriteria pengujian yang berlaku. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai H adalah 9,6135. Nilai itu jelas lebih besar daripada nilai khai-kuadrat dalam tabel sebesar 5,991.

Sesuai dengan kriteria pengujian yang diberlakukan, hipotesis nihil yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (*prinsip ius soli dan ius sanguinis*) para responden pada ketiga tingkat pendidikan itu sama diolak. Sementara, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (*prinsip ius soli dan ius sanguinis*) para responden pada ketiga tingkat pendidikan itu berbeda diterima.

SIMPULAN

Secara umum, PKn bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan setiap individu memiliki wawasan watak, serta keterampilan intelektual dan sosial yang memadai sebagai warga negara. Dengan demikian, setiap warga negara dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga, bahwa dalam setiap jenjang pendidikan diperlukan PKn yang akan mengembangkan kecerdasan peserta didik melalui pemahaman. Materi terkait mengenai kewarganegaraan sudah semestinya menjadi wawasan dan pengetahuan yang wajib diketahui oleh peserta didik sebagai warga negara dikarenakan didalamnya memuat hak dan kewajiban kita sebagai warga negara.

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden pada ketiga tingkat pendidikan siswa SMA, siswa SMK, dan Siswa Perguruan Tinggi berbeda. Responden memiliki tingkat pemahaman yang berbeda dalam memahami mengenai status kewarganegaraan. Penelitian lebih lanjut dari hasil penelitian ini harus dilakukan terhadap perbedaan yang ada, apakah lebih terkait mengenai bobot muatan materi sendiri, apakah daya tangkap atau pemahaman terhadap para siswa yang dijadikan responden, ataupun model pembelajaran yang kurang tepat terhadap materi tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan dan civitas Universitas Peradaban Brebes dan khususnya kepada LPPM Universitas Peradaban yang memberikan dorongan untuk selalu melakukan publikasi terhadap penelitian yang dilakukan. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap keluarga, dan pihak-pihak yang terkait baik secara langsung dan tidak langsung terhadap pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbal, M. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. *Seminar Nasional "Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global,"* 485–493. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia.
- Alfiyana, F. M., & Dewi, D. A. (2021). Manfaat Pendidikan Kewarganegaraan Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Kewarganegaraan,* 5(2), 303–305. <https://doi.org/10.31316/JK.V5I2.1426>
- Asshiddiqie, J. (2011). Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesiaan. *Simposium tentang Ke-Indonesiaan dan Kewarganegaraan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Oktober 2011.*

- Charity, M. L. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 809–827. <https://doi.org/10.31078/JK1346>
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53–80. <https://doi.org/10.25157/JIGJ.V5I1.233>
- Fadliyah, L. (2018). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Fitriasari, S., & Yudistira, R. (2017). Model Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan Hidup Siswa. *Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 167–175. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Hidayat, A. M. (2013). Implikasi Perkawinan Campuran terhadap Status Kewarganegaraan Anak. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 3(2), 375–398. <https://doi.org/10.15642/AD.2013.3.2.375-398>
- Hidayati, N. (2016). Kewarganegaraan Ganda di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 16(1), 27–38.
- Hosseini, S. I., Arya, A., & Ahmadi, M. (2015). Nationality in Private International Law. *Indian Journal of Science and Technology*, 8(12), 1–5. <https://doi.org/10.17485/ijst/2015/v8i12/69906>
- Kabatiah, M. (2021). Efektivitas Pengintegrasian Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Melalui Teknik Klarifikasi Nilai Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(1), 65–73. <https://doi.org/10.24114/JK.V18I1.23730>
- Kadria, S. (2017). A Historical View about Concepts, Theories and Types of Nationalism. *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 6(6), 23–29. [https://doi.org/10.0001/\(aj\).v6i6.1478](https://doi.org/10.0001/(aj).v6i6.1478)
- Kerlinger, F. N. (1973). *Review of Research in Education*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Lazuardi, G. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.37276/SJH.V2I1.64>
- Nurgiansah, T. H., Hendri, & Khoerudin, C. M. (2021). Role Playing dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(1), 56–64. <https://doi.org/10.24114/jk.v18i1.22597>
- Nusarastrिया, Y. H. (2013). Permasalahan dan Tantangan Guru PKn Menghadapi Perubahan Kurikulum (2013). *Satya Widya*, 29(1), 23–29. <https://doi.org/10.24246/J.SW.2013.V29.I1.P23-29>
- Pahlevi, F. S. (2017). Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Dalam Memperkokoh karakter Bangsa Indonesia. *Jurnal Ibriez: Jurnal*

- Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*, 2(1), 65–82.
<https://doi.org/10.21154/IBRIEZ.V2I1.26>
- Paturahman, M. (2017). Reaktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi (Suatu Tinjauan Andragogi). *Sosio-E-Kons*, 9(3), 250–256.
- Prameswari, Z. W. A. W. (2019). Ratio Legis dan Dampak Pengaturan Kewarganegaraan Ganda dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 359–377.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.359-378>
- Rachman, F., Nurgiansyah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2970–2984. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052>
- Rachmawati, I., Retnowati, R., & Karantiano. (2017). Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan Teknik Debate Make A Match (DMM). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(1), 09–26.
<https://doi.org/10.33751/JMP.V4I1.415>
- Rakhmat, M. (2015). *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. Bandung: Warta Bagja.
- Rokilah. (2017). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 53–62.
<https://doi.org/10.30656/AJUDIKASI.V1I2.497>
- Sigit, R. N., & Novianti, N. (2020). Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 118–147. <https://doi.org/10.22437/UP.V1I1.8303>
- Sulaiman. (2015). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: CV. Arfino Raya.
- Syam, N. (2011). Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Di Sekolah Dasar Melalui Model Pengajaran Bermain Peran. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 24(XV), 108–112.
<https://doi.org/10.21009/pip.242.1>
- Telaumbanua, F. (2019). Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berbasis E-Learning. *Warta Dharmawangsa*, 13(4), 14–23.
<https://doi.org/10.46576/wdw.v0i62.503>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Wahono, W., & Atsar, A. (2019). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wibowo, A. P., & Wahono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: Usaha Konkret Memperkuat Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 196–205. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16043>

PERGESERAN PARTISIPASI SOSIAL (MASYARAKAT) DALAM MASA PANDEMI COVID-19 (TINJAUAN FENOMENOLOGIS INDIVIDU SELAMA PANDEMI COVID-19)

Ignasius Putra Bagus Kurniawan

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Jawa Timur, Indonesia
ignasiusputra0107@gmail.com

Abstract

In this study, my research theme focuses on the phenomenon of Indonesian individual social involvement in responding to the reality of the COVID-19 pandemic. If in normal situations, individual involvement in society looks active. The encounter between individuals becomes a tangible form of the involvement and presence of individuals in society. The focus of this study is to look at the different meanings of the presence and involvement of individuals in society during a pandemic. Each individual can participate in society through their ways. This research study uses a literature methodology. This method is carried out by exploring the phenomena that occur in the community during this pandemic. The finding in this study is the phenomenon of the presence of individuals in a limited society. Limited encounters between individuals remain a form of social engagement but in a different way. Thus, the term "people lying down" was born amid Indonesian society. Real presence is no longer face-to-face, but each struggle for the common good. Thus, the final goal achieved remains the same, but the means and expressions of participation have differences.

Keywords: *individuals, sosial, participation, pandemic, Pancasila.*

Abstrak

Dalam studi ini fokus tema penelitian saya ialah pada fenomena keterlibatan sosial individu Indonesia dalam menanggapi realitas pandemi COVID-19. Jika dalam situasi normal, keterlibatan individu dalam sosial terlihat aktif. Perjumpaan antar individu menjadi bentuk nyata dari keterlibatan dan kehadiran individu dalam masyarakat. Fokus studi ini ialah melihat perbedaan makna kehadiran dan keterlibatan individu dalam sosial selama masa pandemi. Masing-masing pribadi dapat berpartisipasi dalam sosial melalui cara-caranya masing-masing. Studi penelitian ini menggunakan metodologi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan menggali fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat selama masa pandemi ini. Temuan dalam studi ini adalah fenomena kehadiran individu dalam sosial secara terbatas. Perjumpaan antar individu yang terbatas, tetap menjadi bentuk keterlibatan sosial namun dengan cara yang berbeda. Sehingga lahirlah istilah kaum rebahan di tengah sosial Indonesia. Kehadiran nyata bukan lagi bertemu secara langsung, tetapi berjuang masing-masing demi kebaikan bersama. Dengan demikian, tujuan akhir yang dicapai tetap sama, namun cara dan ungkapan partisipasi memiliki perbedaan.

Kata kunci: individu, sosial, partisipasi, pandemi, Pancasila.

PENDAHULUAN

Berawal dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial maka ia tidak dapat hidup sendiri. Manusia akan selalu berada bersama dengan yang lainnya. Keberadaannya merupakan keberadaan bersama. Manusia ada dan bersama dengan yang lainnya. Dengan kata lain, individu ada bersama dengan individu lainnya. Ia akan tetap tinggal dan ada bersama dengan manusia lain. Eksistensi manusia dapat terpancar dari eksistensi sesamanya. Keberadaannya dapat dirasakan dengan keberadaan bersama sesamanya. Singkat kata, manusia ada dan berada bersama sesamanya. Hal ini tidak akan pernah bisa dilepaskan begitu saja dari realitas manusia.

Fenomena ada dan bersama dengan yang lain adalah juga fenomena keterikatan yang absolut. Keterikatan ini mengandaikan manusia memiliki koneksi satu dengan yang lainnya. Koneksi yang dibangun dalam kerangka sosial adalah koneksi intim. Kehadiran seorang subyek atau individu di tengah masyarakat adalah sebuah bentuk kehadiran yang nyata. Setiap individu memiliki tempat di tengah kehidupan sosialnya. Ia memiliki peran dalam sosial. Melalui hal ini, sosial dapat dipahami sebagai kumpulan dari banyak individu. Dalam sosial inilah, makna diri dari masing masing individu terlebur menjadi makna dari keberadaan sosial. Dalam satu sosial atau masyarakat, makna yang dikenal ialah makna keberadaan dari masyarakat itu.

Setiap individu memiliki kepribadian yang membangunnya untuk ambil bagian dalam sosial. “Sebagai makhluk yang berkepribadian, maka manusia adalah *home educandum* (makhluk yang dapat didik), dan manusia juga sebagai *homo education* (makhluk yang dapat mendidik). Kedudukan manusia seperti ini menjadikannya sebagai makhluk termulia yang kepadanya dibekali naluri agar menjadi pendidik yang kodrati dalam bentuk dorongan untuk melindungi, dan atau memelihara, serta mendidik anak-anaknya dan orang lain. Dengan demikian, maka manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan selainnya (Karim, 2020, hal. 40)”.

Dalam diri individu terdapat sebuah skala untuk melihat sisi fenomen dari realitas. Skala ini memungkinkan mereka untuk melihat dan memilih informasi lalu mengembangkannya dalam sosial. “Para individu cenderung melakukan seleksi “prioritas” pada jenis pesan atau informasi yang berkaitan secara langsung dengan aktivitas utama mereka sehari-hari, sehingga mendorong mereka untuk memilih media internet sebagai sumber dan saluran informasi yang diutamakan” (Anggarini, 2020, hal. 239). Media komunikasi memberikan wawasan yang lebih luas sehingga mendukung setiap individu untuk mengembangkan dirinya. “Proses pembentukan pemahaman individu terjadi dalam aktivitas komunikasi mereka sehari-hari melalui perubahan skema kognitif (*cognitive*) dan sikap atau suasana emosional (*affective*) individu secara bervariasi” (Anggarini, 2020, hal. 243).

Dalam konteks pandemi COVID-19, makna kehadiran individu dalam sosial mengalami pergeseran. Fenomena pandemi menarik setiap individu ke dalam dirinya masing-masing. segala bentuk perjumpaan sangat terbatas. Aktivitas lebih terarah kepada diri setiap orang. Mereka berfokus untuk menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Kehadiran individu memiliki makna ketika ia berada bersama sesamanya, tetapi masa pandemi mengubah makna kehadiran menjadi hal yang baru. Kehadiran bukan lagi secara fisik, bukan lagi dengan terlibat langsung

melainkan dengan menarik diri ke dalam. Dengan kata lain, individu bukan lagi sebagai sosial, melainkan pada dirinya sendiri.

Masyarakat memberikan tempat bagi kehadiran individu. “Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan anggota-anggotanya. Dengan kata lain, masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia, yang lazim disebut dengan sistem kemasyarakatan” (Prasetyo & Irwansyah, 2020, hal. 174). Sistem ini menunjukkan bagaimana kehadiran dan keterlibatan setiap individu dalam konteks sosial.

Dalam penelitiannya, Romdani & Suryadi (2021, hal. 78–79) mengatakan bahwa “Demokrasi dimaknai sebagai bentuk pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai subjek, dan maknai juga sebagai sistem pemerintahan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat. Partisipasi politik merupakan bagian dari prasyarat demokrasi dimana seluruh warga negara harus memiliki kemampuan dalam membangun pemerintahan. Partisipasi politik dilakukan oleh seorang individu sebagai warga negara, tanpa melihat latar belakang ataupun tanpa paksaan dari satu kelompok. Partisipasi politik bukan hanya tentang keterlibatan seorang warga negara dalam proses pemerintahan, namun lebih dari itu partisipasi politik merupakan hubungan antara kesadaran politik warga negara dengan kepercayaannya terhadap pemerintah.”

Selain itu, Nurbaiti, dkk (dalam Siam, Nurhadiyanti, & Prasetyo, 2021, hal. 83–85) dalam penelitiannya menyangkut pelayanan publik di era *new normal* menyebutkan bahwa “pelayanan publik memang pada dasarnya harus melihat kualitas pelayanan, lantaran pelayanan yang baik merupakan awal bagi tumbuhnya trust dalam masyarakat pada pemerintah itu sendiri, selanjutnya juga sebagai penentu pemberdayaan warga. Lebih lanjut bila melihat pelayanan publik pada era *new normal* menerapkan kebijakan yang sudah ditetapkan, akan berdampak terhadap akses pelayanan pada rakyat. Hal ini akan mengurangi intensitas rendezvous antara pemberi dan juga penerima layanan.”

Berdasarkan kedua penelitian diatas, penulis melihat bahwa partisipasi individu memiliki peran yang penting dalam kehidupan bersama. Fenomena pandemi COVID-19 menunjukkan perubahan dalam partisipasi ini. Partisipasi publik tidak hanya dalam hal politik maupun dalam hal pelayanan publik saja, melainkan dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pandemi COVID-19 dapat dipandang sebagai sebuah awal baru untuk mendalami makna partisipasi individu. Fenomena ini menggeser kehadiran individu dalam suatu sosial kepada individu masing-masing. Kebaruan penelitian ini terletak pada makna partisipasi yang dilakukan oleh setiap individu dalam relasinya dengan sesama. Hal ini tentu berbeda dengan partisipasi yang dilakukan sebelum pandemi. Berdasarkan fenomena ini, peneliti merasa tertarik untuk menggali dan mendalami keterkaitan individu dengan sosial, secara khusus dalam masa pandemi ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah menggali makna partisipasi individu dalam sosial yang terjadi selama masa pandemi. Hal ini tentu berbeda dengan partisipasi individu sebelum masa pandemi terjadi. Sehingga penulis mendapatkan makna baru dari partisipasi individu ke dalam sosial. Penulis mengajukan tiga permasalahan yang mendasar dalam konteks pandemi COVID-19. Permasalahan yang diangkat oleh penulis antara lain: apa pengertian dari individu dan sosial?, Bagaimana keterlibatan individu

dalam sosial selama konteks pandemi COVID-19?, dan bagaimana makna kehadiran individu dalam sosial selama masa pandemi COVID-19?.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi. Penelitian ini dilakukan studi kepustakaan dan menggali fenomena yang terjadi selama masa pandemi. Tinjauan penelitian ini menggunakan filsafat fenomenologis. Penelitian kualitatif fenomenologi berarti suatu pendekatan atau penelusuran yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena dalam diri subjek. Penelitian ini tidak berbasiskan pada data angka, melainkan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara. Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan data yang berisi keterlibatan individu dalam masyarakatnya.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan fenomenologi Creswell. Menurut Creswell tradisi fenomenologi ialah sebuah riset tentang pengalaman dan bagaimana seseorang membentuk makna berdasarkan apa yang dialaminya (Creswell & Creswell, 2018). Dalam penelitian fenomenologi, peneliti diharuskan mampu mengambil jarak antara dirinya dengan fenomena dan subyek yang diteliti. Sehingga penelitiannya sungguh-sungguh menghasilkan data yang akurat.

Data dikumpulkan melalui analisa studi kepustakaan dan pengamatan langsung di lapangan. Penulis mengamati kegiatan warga RT 008/RW 001, Kelurahan Karang Besuki Kota Malang selama masa pandemi ini. Data yang digunakan bersumber dari pengamatan penulis terhadap relasi sosial warga RT 008/RW 001 yang terjadi selama pandemi. Sehingga penulis mendapatkan data hasil pengamatan yang akurat. Data yang sudah terkumpul kemudian akan dianalisa dalam kerangka studi kepustakaan yang berlandaskan pada tinjauan relasionalitas fenomenologis. Peneliti memilih tema ini karena tema ini actual dalam pengalaman setiap subyek. Pandemi COVID-19 membatasi berbagai pergerakan yang dilakukan oleh setiap individu. Pertemuan yang terbatas juga membatasi partisipasi mereka di tengah sosial. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan oktober dengan menggali berbagai fenomena yang ada dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi selalu mengandaikan adanya fenomena atau pengalaman aktual yang ingin didalami oleh subjek peneliti. Berdasarkan pengalaman ini pendekatan fenomenologi dapat dilakukan dengan mengamati fenomena dan mendalami fenomena yang terjadi. Mengutip dari apa yang dikatakan oleh Creswell (2013, hal. 111–113), beberapa langkah yang digunakan dalam pendekatan ini antara lain: *Pertama*, peneliti menentukan problem riset dengan menggunakan pendekatan fenomenologis dan mencari fenomena yang menarik. *Kedua*, peneliti mengenali dan menentukan asumsi yang luas dari fenomenologi. *Ketiga*, peneliti mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena tersebut. *Keempat*, peneliti menganalisis data yang ada dan mencari berbagai esensi atau makna yang terkandung dalam data tersebut.

Problem riset yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah pergeseran partisipasi individu dalam sosial selama masa pandemi COVID-19. Konsep partisipasi dalam sosial

mengalami pergeseran makna dari sebelum pandemi hingga kini dalam masa pandemi. Apa yang dimaksud dengan sosial dan keterlibatan individu di dalamnya juga telah mengalami perubahan. Hal demikian menuntun pemahaman baru dan sikap baru terhadap sosial. Peneliti kemudian mendalami hal ini melalui pengamatan terhadap fenomena yang sedang terjadi dan menyimaknya dalam kaca mata kepustakaan. Dengan kata lain, data yang didapatkan kemudian dirumuskan kembali dan didalami melalui berbagai artikel yang memiliki keterkaitan dengan tema. Dengan demikian, hasil dan pembahasan yang didapatkan antara lain:

Individu dan Sosial

Berangkat dari individu menuju sosial, manusia memulai perjalanan menuju adanya. “Locke merumuskan pribadi sebagai makhluk dengan akal, kesadaran, dan ingatan. Menurutnya identitas seorang pribadi dalam waktu tergantung untuk sebagian pada akal dan kesadaran; sebagian lagi pada mempunyai (*having*) atau lebih tepat ada (*being*) sebagai perangkat ingatan yang secara relatif koheren dan secara relatif berhubungan (tumpang-tindih)” (Teichman, 2011, hal. 38). Setiap pribadi atau individu bertujuan untuk mengaktualisasikan dirinya melalui kesadaran akan dirinya yang telah ber-ada.

“Sebagai makhluk individu, manusia memiliki keunikan tersendiri, yang membedakannya dari manusia lainnya. Dalam pandangan ini, manusia menjadi individu yang tidak dapat dipandang sama, karena secara kodrati setiap manusia diciptakan unik dan berbeda satu dengan yang lainnya” (Santoso, 2017, hal. 104). Meskipun demikian, setiap individu memiliki tempat yang sama dalam tatanan sosial. Perbedaan masing-masing individu dapat menjadi sebuah kekuatan bagi sosial tersebut. Dalam sosial itulah terjadi interaksi sosial yang menghubungkan setiap individu. “Interaksi sosial adalah hubungan antar dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya” (Santoso, 2017, hal. 106).

Individu sebagai aku yang ada ialah dia yang meng-ada di tengah masyarakatnya. Aku sebagai subyek adalah aku yang berkuasa atas diriku. “Aku subyektif adalah fondasi segala bentuk kehadiran manusia dengan kekayaan relasi yang mungkin dalam hidupnya. Aku subyektif juga sumber pengetahuan. Pengetahuan yang berasal dari subjektivitas memiliki kewibawaan lahir dari *lived experience*. Artinya, pengetahuan subyektif memiliki asal dari pengalaman hidup itu sendiri” (Riyanto, 2018, hal. 208). Individu yang meng-ada ialah mereka yang hidup dengan pengalaman subjektifnya dan fenomena itu menjadi bagian dari hidupnya.

Keberadaan individu dalam suatu sosial menandakan bahwa adanya keterlibatan dalam kehidupan bersama. “Setiap interaksi sosial dan hubungan antar dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu akan mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya ke arah yang lebih positif dan mendatangkan manfaat kepada perubahan dan peradaban manusia yang lebih baik dari masa ke masa, tidak sebaliknya”(Santoso, 2017, hal. 106).

Masyarakat dipahami sebagai tempat perjumpaan antar individu. Di dalamnya, setiap individu menciptakan relasi yang saling mendukung dan berdialog. Inilah yang kemudian disebut sebagai karakter dalam sosial. Individu yang berdiri sendiri-sendiri bergabung dalam satu sosial yang berdialog. “Dialogalitas adalah hidup itu sendiri, hidup

yang dimiliki manusia. Ketika manusia hidup, ia tidak hanya bernafas, menggerakkan badan atau sekadar makan mengikuti ritme kebutuhan fisik. Ketika manusia hidup, ia ada bersama dengan sesamanya” (Riyanto, 2011, hal. 187).

Sosial terbentuk dari kumpulan individu yang bertemu dan berdialog. Dalam pertemuannya, mereka mengaktualisasikan diri masing-masing. “Aku dialogal menegaskan penghormatan, kesederajatan, cita rasa senasib sepenanggungan. Aku dialogal adalah kodrat kehadiran manusia yang dimaksudkan sejak penciptaannya”(Riyanto, 2018, hal. 212). Dalam dialog antara individu dan sosial, aku memainkan peranan penting. Kehadiran individu dalam sosial membawa segala ke-aku-annya. Hal ini berarti, setiap individu hadir dalam sosial secara penuh dan utuh dalam dirinya. “Kehadiran manusia adalah kehadiran dialogal. Dialogalitasnya tak mungkin direduksi, pun tidak bisa dicabut dari Aku dirinya” (Riyanto, 2018, hal. 212).

Manusia ialah dia yang adalah individu dan makhluk sosial. Ketika ia mengaktualisasikan dirinya sendiri, ia dapat disebut sebagai individu. Sedangkan ketika bersama dengan orang lain atau masyarakat, ia dapat disebut sebagai sosial. “Manusia sebagai makhluk sosial berasal dari kata latin “*socius*” yang artinya ber-masyarakat yang dalam makna sempit adalah mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat. Sehingga arti dari manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Dalam kegiatannya tersebut manusia akan selalu membutuhkan orang lain dan membutuhkan wadah untuk melakukan kegiatan tersebut” (Hantono & Pramitasari, 2018, hal. 86).

Sosial dapat juga diartikan sebagai masyarakat. “Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan Ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan” (Prasetyo & Irwansyah, 2020, hal. 164). Masyarakat terbentuk dari kumpulan individu yang tinggal bersama, memiliki tatanan yang sama dan membentuk tujuan yang sama pula. Dalam hal ini, masyarakat menjadi bentukan individu yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masing-masing individu tersebut.

“Dalam menjalankan relasi sosial, seberapa banyak ikatan yang dibangun dalam sebuah kelompok, masyarakat, bahkan bernegara; maka sejatinya tetap individulah kuncinya, yaitu untuk berperan dalam menjalankan dan memfungsikan berbagai relasi sosial tersebut” (Santoso, 2017, hal. 107). Dengan demikian, keberadaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial adalah ketika dirinya mengaktualisasikan diri dan menjadikan dirinya ada bersama lingkungannya.

Perang Pandemi COVID-19

Realitas pandemi COVID-19 menjadi realitas yang harus dihadapi dan mengubah banyak hal dalam hidup manusia. Realitas ini adalah realitas *new normal* yang menuntut suatu tatanan norma baru dalam kehidupan manusia. Situasi yang berbeda menghasilkan reaksi dan sikap yang berbeda pula. “Istilah *new normal* merujuk pada aturan baru (buatan) yang lebih longgar daripada sebelumnya. Istilah *new normal* juga didefinisikan dengan berbagai perubahan, termasuk perubahan cara berpikir, berperilaku, dan berelasi dengan sesama” (Adon, 2021, hal. 232). Realitas pandemi melahirkan perilaku yang baru dan hal ini juga melahirkan makna baru manusia di dalam lingkungan sosialnya.

Perang pandemi adalah perang semua untuk bertahan hidup. Setiap individu menghadapi perang ini dan berpartisipasi dalam perang ini sesuai dengan perannya. Dalam realitas ini, setiap individu mengambil bagian dalam sosialnya. Peran yang dimainkan memiliki tujuan yang sama yaitu demi keselamatan semua pihak. Perang melawan pandemi bukanlah perang yang mudah dan hanya permainan, melainkan perang dalam kesenyapan dan berburu dengan waktu. “Pertempuran paling hebat berlangsung di rumah-rumah sakit dan di sanalah para dokter dan tim medis bertempur keras untuk mengurangi jatuhnya korban, termasuk diri mereka” (Hardiman, 2021, hal. 192).

Pandemi mengubah wajah masyarakat secara cepat bahkan di segala bidang. Sebuah revolusi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mengubah wajah dunia, tetapi pandemi dengan cepat melakukannya. Inilah yang dinamakan sebagai perang melawan pandemi. Perang melawan sesuatu hal yang tidak biasa dan mampu mengubah apapun. “Dalam perang biasa bala tentara dikerahkan dan populasi dimobilisasi, tetapi dalam perang pandemik kerumunan justru harus dibubarkan, dipencarkan ke rumah-rumah dan didemobilisasi. Pandemi menuntut demasifikasi” (Hardiman, 2021, hal. 193). Sosial bahkan individu di dalamnya diatur oleh pandemi.

Fenomena pandemi yang mencekam di tengah masyarakat memberikan gambaran baru pada sosial. Gambaran akan keberlangsungan hidup mereka masing-masing. Banyak peristiwa yang terjadi tidak pernah bisa menghentikan segala hal yang sudah berjalan di dunia ini, namun COVID-19 telah melakukannya. “COVID-19 pun mewabah dan manusia dipaksa untuk menghentikan praktik-praktik dan tabiat-tabiat atas nama kesehatan ragawi” (Hardiman, 2021, hal. 195). COVID-19 menjadi sebuah kunci yang membuka pintu baru bagi dunia. Pintu yang tertutup rapat dengan segala keteraturan dan kebersamaan dalam sosial. Realitas COVID berada dan mengalahkan keteraturan dunia.

Perang pandemi menggambarkan sebuah pertempuran yang tidak mengenal batas, tetapi juga pertempuran yang membuka hal baru dalam realitas sosial dan individu. Kesadaran baru dalam realitas menuntut individu untuk tetap terlibat dalam sosialnya meski harus terpisah dari sosial tersebut. Sebuah paradigma yang menenggelamkan pribadi dalam keterlibatan secara pribadi. Berada bersama yang lain dalam konteks yang berbeda dan cara yang berbeda. Dengan demikian, perang melawan pandemi COVID-19 adalah perang sosial dalam realitas individu.

Homo Digitalis dan Home

“Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini telah membawa dampak pada terbatasnya pergerakan manusia akibat *social distancing* dan *Physical distancing*. Teknologi Informasi memiliki peran yang sangat penting, sebagai solusi untuk mengatasi pembatasan tersebut, diantaranya dalam urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis, ekonomi, kesehatan, bahkan urusan agama dan ibadah. Dengan diterapkannya teknologi informasi dapat memberikan efisiensi waktu dan biaya serta manusia saat ini telah memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi” (Muafani, 2021, hal. 137). Hal ini tampak nyata dalam berbagai aktivitas manusia yang bergantung pada teknologi informasi.

“Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah mencapai tingkat kebutuhan bagi manusia yang vital. Bukan saja dalam pemanfaatannya sebagai saluran komunikasi informasi antara individu dalam interaksi sosial, tetapi juga dalam lingkup yang lebih luas antar lembaga dengan lembaga, antar wilayah dengan wilayah hingga

antar negara dan benua” (Yoga, 2019, hal. 30). Perubahan ini akhirnya membawa dampak juga pada perubahan pola hidup tiap individu.

Perubahan pola hidup dalam masyarakat membawa setiap individu untuk menemukan cara baru agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Setiap individu terpaksa menghentikan diri mereka dari berbagai pertemuan korporeal. Hal ini berarti bahwa perjumpaan individu tidak lagi berjumpa dalam secara langsung, melainkan hanya bertemu secara *virtual*. “*Virtual community* juga merupakan ruang yang mendukung seseorang untuk dapat berhubungan dengan orang lain yang memiliki pemikiran dan minat yang sama dengan bantuan sebuah situs maupun jejaring sosial” (Prasetyo & Irwansyah, 2020, hal. 167).

“Teknologi dapat membentuk individu bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak” (Yoga, 2019, hal. 32). Manusia dituntut untuk bisa memberdayakan dirinya dengan berbagai hal baru secara khusus dalam perkembangan teknologi dan digitalisasi. Setiap teknologi yang berkembang menuntut manusia untuk berubah. “Perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi yang lain” (Prasetyo & Irwansyah, 2020, hal. 169).

Istilah *homo digitalis* adalah sebuah istilah yang melukiskan hakikat manusia zaman ini. Pandemi mengubah hakikat dari manusia itu sendiri. Ia adalah makhluk yang mementingkan perjumpaan langsung, kini menjadi makhluk yang berjumpa secara terbatas. Pertemuan langsung ada dalam jaringan. Sebut saja realitas zoom yang sangat terkenal dan digunakan oleh semua orang. “Aplikasi zoom melatih kita untuk terbiasa dengan perjumpaan digital yang ekspansif sekaligus reduktif, tanpa korporealitas, termasuk bau, sentuhan dan keutuhan. Sosok dalam forum digital itu diringkas menjadi idea atau konten komunikasi yang kehilangan ketakterdugaan yang biasanya dapat ditimbulkan oleh situasi intrakorporeal” (Hardiman, 2021, hal. 194).

Singkat kata, *homo socialis* menjadi *homo digitalis*. Inilah gagasan pokok dalam perubahan pola komunikasi dan kehadiran individu dalam sosialnya. Segala hal yang ada dan dinikmati secara langsung diubah dan dimasukkan ke dalam dunia digital. Dalam dunia digital, segala data dapat tersimpan dengan rapi dan hal ini juga memudahkan manusia untuk menyimpan dan mengambilnya kembali. Kemajuan yang tidak pernah terpikirkan justru lahir dari peluang pandemi COVID-19. Perjumpaan digital menciptakan manusia yang mengada dalam sosial yang digital pula.

Perjalanan individu dalam fenomena COVID menarik istilah baru yang begitu populer. Banyak orang mengenalnya dengan istilah *work from home* atau lain pihak menyebutnya dengan istilah *stay at home*. Aktualitas dari subjek ialah ketika dia tinggal di rumah dan menyadari bahwa dirinya menyumbang banyak hal untuk dunia atau sosialnya. “Secara ajaib, *stay at home* menjadi slogan politis tidak lazim yang getol dipropagandakan, suatu slogan yang bertentangan dengan politik yang seharusnya terjadi di *polis*, yakni di luar *oikos*” (Hardiman, 2021, hal. 199).

Tinggal di rumah dan menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas adalah usaha yang dilakukan oleh semua orang di masa ini. *Work from home* atau juga *stay at home* menjadi jalan yang nyata ketika seseorang ingin berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Ia

tetap berada di rumah tetapi juga berkontribusi bagi pemulihan dunia. Sikap inilah yang pada awalnya adalah sebuah pertentangan kini menjadi sebuah bentuk kehidupan. “*Work from home*, istilah baru dalam perang pandemic, yang tak lain daripada pembiasaan dalam dunia digital adalah peluang untuk menemukan kembali *home*” (Hardiman, 2021, hal. 200).

Home yang adalah sebuah kehangatan kini dicari dan dipertemukan kembali dalam kerangka yang baru. Setiap individu ada di rumah dengan segala kesibukannya dalam bekerja, tetapi ia juga sekaligus memberikan dukungan atau membantu para pekerja medis yang ada di rumah sakit. Melalui keadaan dirinya yang tinggal di rumah, bekerja dari rumah, melakukan segala sesuatu dari rumah, merupakan titik partisipasinya bagi sosial. Keberadaan tidak lagi dipahami sebagai ada bersama, melainkan aku ada untuk mendukung yang lain tetap ada.

Sosial-Altruis

“*Pandemic COVID-19* memaksa kita semua untuk membuat kebiasaan baru atau normal baru dalam tingkah laku dan berbagai aturan lainnya. Namun pada akhirnya demokrasi tetap harus dijalankan dengan memperhatikan kesehatan masyarakat” (Muafani, 2021). Fenomena pandemi COVID-19 adalah realitas yang harus dihadapi secara bersama sebagai sosial. Makna sosial pun diubah dengan mudahnya. Sosial mendapatkan makna baru yang lebih sesuai dengan konteks saat ini. Hal ini dengan jelas menggeser makna partisipasi individu dalam sosial tersebut. Partisipasi individu menjadi berubah dan mendapat pengertian yang baru. Dalam perubahan itu, setiap orang memerlukan adaptasi dalam sosial. Adaptasi sosial secara bersama disebut juga adaptasi kolektif. Adaptasi kolektif tidak pernah menghilangkan adaptasi individu, sebab adaptasi kolektif berawal dari adaptasi individu. “Adaptasi individual bukan satu-satunya bentuk adaptasi yang dilakukan, namun adaptasi kolektif atau komunal juga cukup menonjol; dengan solidaritas, terutama solidaritas reflektif, sebagai esensi dari upaya bersama” (Minza, Faturochman, Muhiddin, & Anggoro, 2022, hal. 13).

Sikap adaptasi merupakan respon dari manusia saat mengalami situasi yang baru. Sikap ini menuntut adanya kesiapan dalam diri manusia baik secara individu maupun dalam kaitannya dengan sosial. Maka adaptasi individu maupun sosial adalah bentuk konkret dari solidaritas reflektif. Solidaritas reflektif adalah bentuk kesadaran dari setiap individu akan dirinya maupun sesamanya dalam menghadapi suatu keadaan yang serupa. “Pada masa pandemi, solidaritas reflektif ini yang dapat dikembangkan tanpa adanya batas-batas hubungan kekerabatan dan kelompok (*ingroup*) mengingat setiap orang berada dalam kerentanan bersama. Dengan demikian, solidaritas reflektif ini dapat mendukung toleransi dalam masyarakat di masa pandemi karena solidaritas yang dikembangkan cenderung mengarah pada solidaritas universal dibandingkan solidaritas pada *in-group* semata” (Minza et al., 2022, hal. 12).

Efek dari solidaritas reflektif menggerakkan perubahan dalam diri manusia. Hal sederhana yang berubah dalam diri individu menyangkut ruang pribadi. “Ruang pribadi (*personal space*) dan teritori (*territory*) adalah ruang privasi manusia dalam aktualisasi karakteristik manusia sebagai makhluk individu. Walaupun sama namun bedanya adalah ruang pribadi merupakan ruang maya yang berada di sekeliling manusia sedangkan teritori dibentuk sesuai dengan kondisi tertentu” (Hantono & Prमितasari, 2018, hal. 92).

Ruang pribadi dalam keadaan normal adalah keadaan individu dengan dirinya disaat dia mengaktualisasikan diri dalam sosial. Ruang pribadi ini menuntun pada kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak, suasana, dan kesempatan untuk dirinya sendiri meskipun ia berada dalam sosial. Kehadiran setiap individu akan dihormati dan diberikan kesempatan dalam setiap sosial, termasuk jika ia ingin mengaktualisasikan ruang pribadinya. Individu tidak pernah kehilangan ruang pribadi dalam sosialnya. Sedangkan kini, ruang pribadi adalah ruang virtual dari masing-masing individu. Dalam ruang virtual inilah, setiap individu berada bersama sosialnya. Ia meng-ada-kan dirinya dalam lingkaran realitas yang sebenarnya juga adalah semu.

Dalam situasi inilah timbul sebuah kesadaran kolektif yang bertujuan untuk hasil yang sama. Kesadaran untuk suatu hal yang lebih baik bagi semua. “Dalam situasi ketidaklekatan kolektivitas, pandemi COVID-19 memberikan “struktur baru” yang membuat manusia harus bekerja kolektif untuk memastikan perubahan perilaku secara kolektif sebagai satu-satunya cara memutus mata rantai penyebaran virus ini” (Sari, 2020). Mereka tetap diajak untuk bekerja sama tanpa harus bekerja dan berada di tempat yang sama. Kesadaran kolektif saat ini lebih menekankan keterlibatan individu dalam sebuah sosial, meski ia tidak ada secara langsung dalam sosial itu. Aku - sebagai individu – tetap berjuang bersama dengan orang-orang lain demi tujuan yang lebih baik.

Kesadaran kolektif ini diungkapkan dalam istilah yang baru di era ini. Istilah “kaum rebahan” menjadi istilah yang nyata dalam lingkup masyarakat. Istilah ini ingin melukiskan bagaimana kondisi setiap individu yang hanya tinggal di rumah, tidak banyak melakukan kegiatan, bahkan cenderung santai (rebahan), tetapi memberikan bantuan bagi mereka yang berjuang menghadapi corona di luar. Aku ada bersama mereka yang berjuang dengan tetap tinggal di rumah. Inilah fenomena sosial di era pandemi ini.

Melalui fenomena tersebut, setiap individu memiliki pemikiran bahwa dengan tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, tidak bepergian, segalanya di rumah, sudah ikut berpartisipasi pada sosial. “Dalam kondisi normal, berkumpul adalah altruis, tetapi sosialitas inversi selama pandemi memiliki makna yang lain. Saat ini berkumpul adalah asosial” (Hardiman, 2021, hal. 206). Perubahan pandangan dalam diri masyarakat adalah bentuk tanggapan atau respon dari individu terhadap keadaan dari luar. Fenomena “berkumpul” dalam konteks pandemi menjadi sebuah fenomena yang baru dan terbalik dari sebelumnya. Perubahan makna dalam masyarakat melahirkan bentuk relasi yang baru juga. Relasi aku dan *liyan* adalah relasi yang berkembang dan mendalam. Relasi ini seharusnya tidak dibatasi oleh ruang virtual yang mengikat dan membelenggu tiap individu. Relasi di dalamnya adalah relasi yang bebas dan terbuka, sama dan seimbang.

Makna dan pandangan akan kehidupan sosial pun sudah berubah. Sosial bukanlah kita pada saat semua berkumpul bersama. “Kita tidak altruis, meski berkumpul, jika tidak peduli kepada orang lain. Inti sosialitas bukan pada berkumpul, melainkan pada kepedulian. Karena itu sosialitas inversi – dan hal ini menakjubkan – melatih kepedulian justru dengan menarik diri dari orang lain tanpa haru. Tidak berkumpul, jaga jarak, tidak menyentuh, dan hygiene pribadi adalah wujud altruisme yang senyatanya. Mereka adalah wujud tanggung jawab sosial, simpati, dan solidaritas” (Hardiman, 2021, hal. 206–207).

Sikap altruis sejatinya adalah sikap yang peduli dan mementingkan sesama. “Seseorang yang altruis memiliki motivasi altruistik, keinginan untuk selalu menolong orang lain. Motivasi altruistik tersebut muncul karena ada alasan internal di dalam dirinya

yang menimbulkan *positive feeling* sehingga dapat memunculkan tindakan untuk menolong orang lain” (Dewi, 2017). Dengan kata lain, sikap altruis menjadi sikap yang menopang kehidupan manusia, baik dalam relasinya dengan sesama maupun dengan dirinya sendiri. Namun sikap ini pun mengalami perubahan dalam masa pandemi. Aku sebagai individu tetap memikirkan sesamaku meski diriku tidak berada dalam sosial.

Aku tetap sebagai individu yang altruis dan hidup di tengah sosial meski aku berdiri sendiri. Setiap individu membentuk persahabatan dengan sosial. Dalam persahabatan ini, mereka tetap menjalin relasi yang erat. Meski keduanya terpisah, tetapi mereka tetap terhubung satu dengan yang lain. “Individu yang sedikit memiliki sahabat cenderung memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang rendah, gangguan psikologis, resiko tingkat kematian yang tinggi, serta mempengaruhi tingkat prestasi akademiknya” (Febrieta, 2016, hal. 153). Meskipun demikian, aku tidak akan bisa dilepaskan dari keberadaannya dengan sosialnya. Aku tetap bagian dalam sosial meski aku tidak ada bersama mereka, karena ada ku adalah juga ada bagi mereka. Pandemi mengubah makna partisipasi individu dalam sosial melalui ketidakhadiran secara langsung. Aku yang sendiri adalah juga aku yang bersama. Justru melalui hal itu, aku berpartisipasi bersama mereka yang sedang berjuang di garis depan untuk berperang melawan pandemi.

Aku dan *Liyan* dalam Lingkaran Sosial

Pandemi COVID-19 memberikan suasana baru dalam keterlibatan individu dalam sosial. Individu tetap menjadi bagian dari sosial meski dia terlibat dalam cara yang lain. keterlibatan individu dalam masyarakat diungkapkan lewat partisipasi individu untuk tetap tinggal sendiri. Individu dilarang untuk berkumpul dan berada bersama. Setiap individu justru diminta untuk menjaga jarak, menghindari kebersamaan, kerumunan. Fenomena merebaknya istilah “kaum rebahan” di tengah sosial justru menjadi bentuk keterlibatan yang mendukung garda terdepan dalam perang melawan pandemi. Istilah ini terlihat sangat sederhana, namun melukiskan pengalaman yang mendalam. Ketika individu hanya tinggal di rumah dengan segala aktivitasnya, maka ia juga berkontribusi untuk membangun keadaan yang lebih baik. Keterlibatan individu tidak lagi ditunjukkan dengan berjuang bersama dalam bentuk ada bersama (gotong-royong), melainkan (gotong royong) dalam keadaan yang berbeda. Secara konkret gotong royong dalam bentuk berkumpul, ada bersama, kini terwujud dalam gotong royong secara virtual.

Kehadiran individu di tengah sosial adalah sebuah bentuk catatan dalam hidup individu tersebut. Sebuah jurnalisme hidup dalam diri individu. “Jika ditelusuri lebih dalam, ada pertarungan kekuasaan dan budaya yang mengikutinya. Hegemoni budaya jurnalisme dominan yang dijalankan hampir di semua media besar mempengaruhi cara kerja jurnalisme warga, bahkan memaksa secara halus jurnalisme warga untuk turut dalam aturan main atau kode-kode yang berlaku dalam jurnalisme profesional” (Eddyono, HT, & Irawanto, 2019, hal. 67). Berbagai bentuk fenomen tercatat dalam diri setiap individu. Dengan kata lain, individu membangun catatan hidup dalam diri *liyan*. Keduanya saling mengisi dan mengaktualisasikan dirinya. Aku menulis sejarah dalam diri *liyan*, dan *liyan* pun menulis kisahnya dalam diri ku.

Sebuah pandangan mengangkat *liyan* ke dalam konteks yang lebih tinggi. Kebanyakan orang-orang miskin dipandang sebagai *liyan* yang dipinggirkan. “Oleh karena itu, perhatian kita harus ditujukan kepada orang-orang miskin. Hospitalitas lebih mengarah tentang bagaimana Paus Fransiskus bermaksud merangkul semua orang

terlebih orang-orang yang terpinggirkan” (Permana, 2020, hal. 20). Dalam pandangannya, *liyan* bukanlah orang lain yang harus dipinggirkan melainkan mereka yang sederajat dan harus dirangkul bersama. Padangan ini mengajak kita untuk terbuka pada kehadiran *liyan* di sekitar kita. “Hal ini menuntut bukan semata-mata bekerja bagi mereka, melainkan bekerja sama dan belajar dari mereka tentang apa yang mereka butuhkan dan dambakan, sejauh mereka mampu mengungkapkan, kemudian berjuang agar dambaan-dambaan itu terpenuhi dengan mengubah struktur-struktur dan situasi yang melestarikan kekurangan dan ketidakberdayaan mereka” (Permana, 2020, hal. 23).

Makna kehadiran individu juga berubah dalam sosial. Kehadiran individu kini terbatas dalam ruang virtual. Aku yang bisa bertemu langsung dengan *liyan* kini dibatasi oleh sekat-sekat yang memisahkan. Perjumpaan kini hanya sebatas pandangan mata. Wajah hanya bertemu dengan wajah. Tidak ada perjumpaan yang special dan mendalam antara keduanya. Kehadiran yang hanya terbatas pada jaringan hanyalah perjumpaan sekilas. Kehadiran individu bukan lagi aku yang ada secara fisik dan mendalam, melainkan hanyalah perjumpaan sesaat dan terbatas. Meski demikian, individu tetap hadir bersama sosial. Individu hadir bersama sosial dalam bentuk keterpisahan. Hadir bukan lagi ada bersama secara fisik, melainkan ada dalam esensi setiap individu. Keterbatasan kehadiran mampu mengubah makna tetapi tidak mengubah kehadiran itu sendiri.

Sosial-Virtual

Perjumpaan antara aku dan *liyan* kini terikat dalam sebuah ruang virtual terbatas. Sosial akhirnya juga terbatas pada ruang virtual ini. Aku berelasi dengan mereka dalam konteks ku saat ini. Namun relasi ini tidak bisa menjadi relasi konkret yang mampu menyentuh satu dengan yang lain. Martin Buber menguraikan sosial dalam ruang aku dan *liyan* atau *I and Thou*. Martin Buber menggambarkan *I and Thou* sebagai relasi yang menampilkan keseluruhan kodrat komunikasi dari manusia. “Aku adalah aku ketika berelasi dengan engkau. Tanpa engkau, tidak ada aku. Jadi dalam Buber, engkau bukan non-aku (lawan aku)” (Riyanto, 2018, hal. 215). Kehadiran engkau menjadi bentuk aktualisasi konkret dari aku. Tanpa adanya engkau, aku tidak akan bisa mengaktualisasikan dirinya. Aku bisa ada karena engkau.

Pandangan Buber terhadap relasi antar dua subyek tidak pernah berhenti pada satu titik. Relasi ini terus berjalan dan memiliki dinamikanya sendiri. Relasi antar manusia dapat digambarkan sebagai sebuah perjalanan antar subjek yang saling bertemu. Perjalanan ini tidak mungkin hanya berhenti pada satu titik, melainkan senantiasa memiliki tujuan baru antara satu dengan yang lain. “Bagi Buber, makna relasi tidak bisa bergerak di tempat. Seandainya bergerak di tempat saja, sebenarnya relasi menjadi tidak berarti. Perjumpaan menjadi aneh, lain dan tidak mencapai suatu keindahan dalam berelasi. Keindahan yang terletak dalam relasi terjadi pada saat orang saling menyapa, saling mengerti dan memahami. Relasi yang indah, terwujud dalam relasi timbal balik. Sebab melalui relasi timbal balik, manusia mendapatkan jaminan terhadap keindahan eksistensi manusia yang tiap saat adalah relasional, bertemu dan berjumpa dengan manusia lain” (Hia, 2015, hal. 305).

Dalam konteks pandemi, ruang virtual menjadi ungkapan dari sosial. Aku ada dalam sosial jika aku terlibat dalam ruang virtual. Gambaran dari sosial yang penuh dengan pertemuan dan interaksi yang mendalam antar subjek kini tergeserkan dan terpendam dalam relasi virtual antar subjek. Tentunya interaksi yang dihasilkan dalam

komunikasi antar subjek tidaklah intens seperti sebelumnya. Interaksi virtual menggeser landasan dalam komunikasi antar subjek. Komunikasi yang terjadi antar pribadi tidak mendapat porsi seperti pada umumnya. “Komunikasi antarpribadi berupaya mengembangkan hubungan antar sesama manusia, tujuannya mengurangi kesepian, mendapatkan pengetahuan/informasi, sampai pada menjalin suatu hubungan persahabatan yang akrab. Seseorang menjalin hubungan dikarenakan mengurangi kesepian yang muncul ketika kebutuhan interaksi akrab tidak terpenuhi, menguatkan dorongan karena semua manusia membutuhkan dorongan semangat dan salah satu cara terbaik untuk mendapatkannya adalah dengan interaksi antar manusia” (Arianto, 2015, hal. 220).

Komunikasi dalam masa pandemi memang secara terbatas dan seringkali meniadakan pertemuan langsung. Namun jika melihat secara sederhana, pertemuan antar subyek dalam ruang virtual adalah juga sebuah pertemuan. Hal ini juga ditegaskan oleh Martin Buber. “Buber memiliki pandangan bahwa realitas hidup manusia adalah pertemuan. Pertemuan seseorang dengan orang lain tidak pernah berhenti. Setiap hari kita selalu berjumpa dengan orang lain. Oleh sebab itu, relasi di antara manusia selalu ada dan selalu seimbang. Relasi manusia tidak pernah asimetris dalam pemikiran Martin Buber” (Hia, 2015, hal. 309). relasi manusia kemudian berjalan seimbang. Antar subjek terbentuk sebuah relasi yang simetris saling timbal balik satu dengan yang lain. Meskipun tertutup dalam sebuah ruang virtual, relasi itu tetaplah sebuah relasi antar dua orang subyek. Secara garis besar memang relasi mereka terbatas dan tidak sebebas sebelumnya. Namun keterbatasan ini tidak serta-merta menghilangkan makna dari relasi itu, melainkan menggesernya ke level yang berbeda.

Aku dan *liyan* menjadi relasi komunikasi yang menggambarkan relasi antar manusia yang seimbang dan sejajar. Semua subyek menjadi sama dan saling mengaktualisasikan dirinya. Komunikasi aku dan *liyan* dalam ruang virtual hanyalah sampai pada taraf tahu dan tidak mengenal. “Pertemuan tatap muka secara berhadapan dapat dilaksanakan dalam jarak jauh yang sangat jauh melalui tahap citra ” (Putra, 2014). Akhirnya mereka tidak lagi bertemu secara langsung. *Liyan* hanyalah sebatas ruang virtual yang bisa dihubungi dalam jangka waktu tertentu. Aku dan *liyan* membentuk sosial dalam perjumpaannya di dalam ruang virtual. Dengan kata lain, sosial yang dibentuk adalah juga sosial virtual. Melalui hal ini, mereka mampu berkomunikasi satu dengan yang lain, bahkan lebih dari itu, mereka mampu menciptakan dunia mereka dalam dunia virtual.

Akhirnya sosial virtual adalah bentukan baru dari masyarakat di era pandemi. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa sosial virtual adalah tempat setiap individu mengaktualisasikan dirinya secara virtual dalam konteks pandemi. Perjumpaan yang mereka alami adalah perjumpaan dalam ruang virtual. Kesan yang mereka alami adalah kesan masing-masing pribadi yang didapat dalam ruang virtual. Aktualitas di luar ruang virtual ini menjadi semacam dunia yang lain daripada sebelumnya. Selama masa pandemi, setiap individu menyibukkan diri agar tetap sehat serta membagi waktunya untuk tetap berelasi dengan sesamanya. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah begitu saja. Singkat kata, perjumpaan dalam sosial virtual dapat digambarkan sebagai perjumpaan sementara. Meski diantara kedua subyek “tidak ada yang merasa berada di tempat asing bila ada perjumpaan di antara yang sedang bertemu. Tidak ada yang merasa disingkirkan atau dikucilkan, melainkan semua merasa sebagai bagian dari sebuah institusi yang telah dibangun bersama. Komunikasi yang otentik adalah dialog di antara

dua orang yang sedang bertemu. Bukan dialog yang hanya terjadi untuk satu orang saja, tetapi ada komunikasi timbal balik. Sebab, bila komunikasi hanya terjadi untuk satu orang saja, itu bukan dialog manusiawi, tetapi relasi antara Aku dengan benda yang ada di sekitarku” (Hia, 2015, hal. 313).

Dengan demikian, aku dan *liyan* bertemu dalam sebuah masyarakat virtual. Perjumpaan yang tidak mengharuskan diriku memberikan tangan kepada sesamaku, melainkan mengharuskan aku untuk duduk dan menatap layar untuk bertemu sesamaku. Sosial ini unik dan terlahir begitu saja. Namun di dalam sosial virtual ini berkembang sebuah nilai yang otentik yaitu nilai partisipatif. Meski dulu makna partisipasi setiap individu sangatlah tinggi, kini pergeseran makna partisipatif dalam sosialnya sangatlah berpengaruh. Setiap individu dapat berinteraksi dengan mudah dan tetap berkembang dalam sosial baik melalui virtual maupun secara langsung. Pengalaman sosial virtual adalah pengalaman bersama yang menjadi pengalaman setiap individu dalam relasinya dengan individu lain.

SIMPULAN

Kehadiran individu dalam konteks sosial adalah sebuah kehadiran yang utuh dan penuh. Hal ini berarti bahwa setiap individu mengaktualkan dirinya dalam sosial masyarakat. Individu sebagai aku yang berelasi dengan sosial memiliki peran dan konteksnya masing-masing. Tiap individu adalah cerminan dari tiap-tiap sosial. Aku dan *liyan* menjadi gambaran yang aktual. Di antara keduanya terbangun relasi yang mendalam. Aku tidak pernah bisa terlepas dari konteks sosial, begitu pula dengan sosial yang tidak akan bisa meniadakan aku.

Aku sebagai subjek adalah aku yang mengalami segala fenomena dan ia menjadi tuan atas fenomena itu. Ia menjadi fondasi dari pengalaman subyektif. Kehadiran ku sebagai individu adalah sebuah bentuk dari aktualisasi diri. Ketika individu mengaktualisasikan dirinya sebagai subjek atas fenomena maka disaat itulah dia menjalin dialog dengan *liyan* di sekitarnya. Dialogalitas antara aku dan *liyan* menjadi simbol yang kuat adanya sosial. Aku dialogal menjadi kodrat penuh yang menampilkan diri di hadapan realitas. Dengan terciptanya dialog maka sosial pun tercipta dan semakin kuat di dalamnya.

Sosial sendiri dimaknai sebagai ungkapan realitas dari masing-masing individu. Setiap individu yang mengaktualisasikan dirinya maka ia menciptakan relasi dalam sosial yang mendalam. Keberadaan aku secara penuh dalam pengungkapan diri bersama individu lain, itulah yang kemudian disebut sebagai sosial. Sosial menghadirkan aku dan *liyan* yang membawa serta dirinya masing-masing tanpa memisahkan ke-aku-an dari *liyan*. Dengan demikian, individu dimengerti sebagai aku yang mengaktualisasikan dirinya dalam sosial bersama dengan individu lain. Sedangkan sosial adalah suatu bentuk aktualisasi dari masing-masing individu yang menjalin relasi mendalam dan saling mendukung dalam perwujudan diri secara penuh.

Keterlibatan aku sebagai individu di dalam konteks sosial merupakan keterlibatan aktif. Keterlibatan ini menuntut suatu kehadiran nyata dan secara langsung dari diri setiap subjek. Dalam konteks pandemi COVID-19, keterlibatan individu melalui cara yang baru. Individu tetap bisa hadir bagi sesamanya dalam lingkup sosial tanpa adanya pertemuan langsung. Kini keterlibatan individu adalah keterlibatan berjarak. Dengan kata lain, aku

hadir bagi *liyan* dalam duniavirtual, dunia yang “mirip” dengan realitas. Keterlibatan ini membentuk relasi baru antara aku dan sosial. Keterlibatan ku sebagai individu bukan lagi keterlibatan dengan kehadiran langsung, melainkan aku terlibat dengan jarak yang berbeda.

Hal yang serupa berbicara mengenai kehadiran individu dalam konteks pandemi COVID-19. Aku sebagai individu yang biasanya hadir secara langsung kini terpisah dan menghadirkan diri dalam bentuk yang lain. Merebaknya istilah “kaum rebahan” menjadi bentuk eksistensi individu dalam sosialnya. Aku hadir dalam keterasinganku dengan sosial, namun aku tidak pernah terputus dan terlepas dari sosial. Secara tidak langsung aku menjadi individu yang altruis. Dengan kata lain, aku mempedulikan *liyan* yang berjuang melalui keabsenan ku secara langsung. Dengan makna yang baru, setiap individu membentuk komunitasnya atau sosialnya. Ia menghadirkan diri dan menjalin relasi melalui eksistensinya yang terbatas. Bilik-bilik virtual menjadi tempat pertemuan antar individu. Selain itu, makna kehadiran individu dalam sosial lebih mengarah kepada masing-masing dan lebih menjadi bagian dari pengalaman subjektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi yang telah mendorong penulis untuk menggali makna individu di tengah sosial selama masa pandemi ini. Dalam konteks ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor FX Armada Riyanto yang telah senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan jurnal ini. Profesor FX Armada Riyanto juga telah banyak memberikan masukan dalam penulisan dan penelitian jurnal ini. Makna individu di tengah sosial merupakan makna yang digali dari filsafat relasionalitas aku dan *liyan*. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para saudara yang telah mendukung dalam pengerjaan paper penelitian ini. Selain itu, penulis juga memberikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam perwujudan jurnal ini. Semoga tulisan jurnal ini berguna bagi pembaca maupun para peneliti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adon, M. (2021). New Normal sebagai Politik Bonum Commune di Masa Pandemi. *Jurnal Budaya Nusantara*, 4(2), 231–241. <https://doi.org/10.36456/b.nusantara.vol4.no2.a3219>
- Anggarini, S. (2020). Fenomena Dalam Berita COVID-19. *Jurnal Audience: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 224–249. <https://doi.org/10.33633/JA.V3I2.3628>
- Arianto. (2015). “Menuju Persahabatan” Melalui Komunikasi Antarpribadi Mahasiswa Beda Etnis (Studi Kasus Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako). *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 219–229.
- Creswell, J. W. (2013). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*. Sage publications.
- Dewi, Y. R. (2017). Hubungan Antara Self Monitoring Dengan Altruisme Pada Anggota Komunitas Save Street Child Surabaya. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 4(1), 1–6.
- Eddyono, A. S., HT, F., & Irawanto, B. (2019). Jurnalisme Warga: Liyan, Timbang dan Diskriminatif. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 12(1), 61–73. <https://doi.org/10.14421/pjk.v12i1.1498>
- Febrieta, D. (2016). Relasi Persahabatan. *Jurnal Karya Ilmiah*, 16(2), 152–158.
- Hantono, D., & Pramitasari, D. (2018). Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial pada Ruang Terbuka Publik. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 5(2), 85–93. <https://doi.org/10.24252/nature.v5i2a1>
- Hardiman, F. B. (2021). *Aku Klik Maka Aku Ada*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hia, R. (2015). Konsep Relasi Manusia Berdasarkan Pemikiran Martin Buber. *Melintas*, 30(3), 303–322. <https://doi.org/10.26593/mel.v30i3.1448.303-322>
- Karim, B. A. (2020). Teori Kepribadian dan Perbedaan Individu. *Education and Learning Journal*, 1(1), 40–49. <https://doi.org/10.33096/eljour.v1i1.45>
- Minza, W. M., Faturochman, F., Muhiddin, S., & Anggoro, W. J. (2022). Adaptasi Individual dan Kolektif: Respons Masyarakat Indonesia Menghadapi Pandemi COVID-19. *Jurnal Psikologi Sosial*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.7454/jps.2022.03>
- Muafani. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 8(2), 134–139. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v8i2.1587>
- Permana, A. D. (2020). Paus Fransiskus Merangkul Liyan. *Jurnal Teologi*, 09(01), 11–26. <https://doi.org/10.13109/9783666303173.169>
- Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. *Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163–175. <https://doi.org/10.38035/JMPIS.V1I1.253>
- Putra, A. (2014). Peran Smartphone dalam Interaksi Sosial Anak Muda (Studi Deskriptif kualitatif Peran Smartphone Dalam Kelompok Persahabatan Anak Muda). *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Riyanto, A. (2011). *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Riyanto, A. (2018). *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Yogyakarta: Kanisius.
- Romdani, L. N., & Suryadi, K. (2021). Pilkada Dalam Pandemic: Bagaimana Warga Negara Memaknai Demokrasi Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(2), 74–83. <https://doi.org/10.24114/JK.V18I2.23416>
- Santoso, M. B. (2017). Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 104–109. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14217>

- Sari, Y. I. (2020). Sisi Terang Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 89–94. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3878.89-94>
- Siam, N. U., Nurhadiyanti, & Prasetyo, E. B. (2021). Identifikasi Pelayanan Publik di era Work From Home (WFH). *Indonesian Governance Journal*, 04(01), 80–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/igj.v4i1.1821>
- Teichman, J. (2011). *Etika Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yoga, S. (2019). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi. *Jurnal Al-Bayan*, 24(1), 29–46. <https://doi.org/10.22373/albayan.v24i1.3175>

PERAN GURU PPKN DALAM MENCEGAH TERJADINYA BULLYING PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 PERCUT SEI TUAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Armi Sari Pratiwi Batubara*, Adelia Endarwati, Nurhasania Siagian,
Sri Yunita, Hodriani

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*armibatubara@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the role of PPKn teachers in preventing bullying in class VIII students of SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan for the 2020/2021 academic year. The method used in this research is descriptive quantitative. This research was conducted at SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan. The population were all eighth grade students consisting of 8 classes totaling 253 students. Determine the sample using the Slovin formula with the results of 72 students, with a percentage of 28% from each class as many as 9 students per class. Data collection instrument was by distributing questionnaires. Data analysis was performed using a simple statistical technique. The results showed that PPKn teachers played a good role in preventing bullying in students which can be seen from the acquisition scores on variable X, as many as 5769 were included in good criteria and seen from the percentage of 80.12% from the expected 100%. The results of data processing also show bullying which is expressed through the acquisition score on variable Y, as many as 2868. Bullying behavior ever occurs in class VIII SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan in the 2020/2021 academic year which is also shown at 39.83% from the expected 0%.

Keywords: teacher's role, PPKn, bullying

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru PPKn dalam mencegah terjadinya *bullying* pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan Tahun Pelajaran 2020/2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan. Populasi pada penelitian yakni seluruh siswa kelas VIII yang terdiri dari 8 kelas yang berjumlah 253 siswa. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan hasil 72 siswa, dengan persentase sampel sebesar 28% dari tiap kelas yakni sebanyak 9 siswa per kelas. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian dengan menyebarkan angket. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn berperan baik dalam mencegah terjadinya *bullying* pada siswa yang dapat dilihat dari skor perolehan pada variabel X, sebanyak 5769 termasuk dalam kriteria baik dan dilihat dari persentase sebesar 80,12% dari yang diharapkan sebesar 100%. Hasil pengolahan data juga menunjukkan bahwa siswa pernah melakukan *bullying* yang dinyatakan melalui skor perolehan pada variabel Y sebanyak 2868. Perilaku *bullying* pernah terjadi pada siswa kelas VIII SMP Negeri

3 Percut Sei Tuan Tahun Pelajaran 2020/2021 yang ditunjukkan melalui persentase sebesar 39,83% dari yang diharapkan sebesar 0%.

Kata kunci: peran guru, PPKn, *bullying*

PENDAHULUAN

Bullying dewasa ini sudah menjadi tren dikalangan siswa sekolah menengah, terutama di lingkungan yang sering terjadi interaksi sosial antar siswa. *Bullying* berbeda dari perilaku agresif lainnya karena terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga korban mengalami keadaan cemas dan terintimidasi. Rigby (dalam Arya, 2018, hal. 19) menyatakan bahwa perilaku *bullying* menjadi fenomena yang memprihatinkan serta menyebabkan bahaya bagi korban dan pelaku. Bagi korban, akan mengalami psikosomatis saat pergi kesekolah, merasa tidak bernilai, merasa terasingkan, depresi bahkan sampai bunuh diri. Sedangkan bagi pelaku, akan berkembang menjadi seseorang yang mengancam banyak pihak saat dewasa.

Hasil Penelitian Amnda dkk (2020) menunjukkan dampak negatif dari perilaku *bullying* yang terjadi antar siswa diantaranya menurunnya sikap kepercayaan diri, perasaan tertekan, menganggap diri paling rendah, adanya rasa tidak tenteram dan sedap, tidak berani melakukan sosialisasi di wilayahnya dan sukar memusatkan pikiran saat belajar. Kasus *bullying* memiliki dampak buruk bagi pelaku atau korban apabila terus terjadi, sehingga menjadi hal yang harus diperhatikan guru dan sekolah. *Bullying* memiliki kaitan erat dengan pendidikan karakter. *Bullying* tidak akan terjadi apabila siswa mengimplementasikan perilaku baik serta penguasaan materi dalam Pendidikan karakter.

Pendidikan karakter menciptakan individu penerus bangsa yang elok, melalui pemberian materi dari disiplin ilmu Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan hadir untuk mencipta (*civic disposition/responsibility*) watak atau sikap kepribadian siswa serta mampu bertanggungjawab (Setiawan, Yunita, & Rachman, 2020, hal. 2). Peran guru PPKn dalam memberikan materi pelajaran sangat dibutuhkan agar siswa memiliki nilai-nilai karakter dalam berperilaku, baik di lingkungan sekolah sehingga mencegah terjadinya penyimpangan diantara siswa seperti tindakan *bullying*.

Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sungguh perlu selain mendidik dan mengajar, juga sepatutnya berupaya mencegah isu-isu perilaku *bullying*. Selain itu, guru PPKn mempunyai hubungan yang kuat dengan penanaman nilai-nilai karakter sehingga siswa menjadi individu yang memiliki pribadi lebih baik. Penegakan nilai Pancasila erat kaitannya dengan keikutsertaan bangsa, lembaga, juga lingkungan masyarakat agar menjadi penduduk bangsa yang baik, yaitu warga yang memiliki sikap mulia, akhlak yang diharapkan, yang melainkan dengan bangsa lainnya (Hendri, 2020).

Mayasari (2020) menjelaskan guru PPKn memiliki kontribusi yang sangat penting bagi pembentukan dan pembinaan karakter peserta didik supaya menjadi masyarakat yang teratur (*good citizen*), bukan hanya *good citizen* namun juga *smart citizen*. *Smart citizen* atau kecerdasan warga negara yang perlu dimiliki antara lain kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. Kecerdasan ini membantu seorang siswa

berpikir secara rasional sehingga apa yang akan diperbuatnya akan terlebih dahulu dipikirkan sehingga ia dapat menjadi pribadi yang bertanggungjawab.

Untari & Setiawati (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa upaya pendidik meminimalisir perilaku kasar diantara peserta didik, yakni dengan memberikan bimbingan, menjadi contoh seorang yang bermoral serta menyampaikan nasihat pada aktivitas belajar mengajar, dan yang mendasar ialah melatih perilaku peserta didik untuk mematuhi peraturan sekolah serta menjauhi perbuatan kekerasan antar siswa.

Berdasarkan penelitian Hamidah (2019) diketahui bahwa guru berperan mencegah perilaku *bullying* dengan pengaplikasian guru sahabat anak bagi peserta didik adalah dengan jalan menempatkan diri sepadan dengan peserta didik menyampaikan bahasa yang sesuai serasi dengan siswanya agar terjalin situasi yang luwes saat berinteraksi satu sama lain. Guru juga menjalin kerjasama dengan pihak sekolah, baik pendidik maupun peserta didiknya, dengan demikian dapat bersama-sama mengawasi, mendukung untuk terciptanya kondisi bersifat mendidik untuk peserta didik, serta memeriksa kegiatan dan tindakan peserta didik.

Readussolihin (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pencegahan *bullying* verbal dilakukan dengan memberi hukuman kepada peserta didik yang melakukan *bullying*, yaitu bagi siswa yang menyapa siswa lainnya dengan panggilan tidak pantas, oleh karena itu guru memberi sanksi atau hukuman yang bersifat menambah pengetahuan diantaranya dengan memberikan hafalan juz amma serta dzikir. Sedangkan untuk *bullying* jenis fisik yakni jika siswa kedapatan memukul, memalak, menjegal, mencubit, atau sampai beradu fisik dengan siswa lain, sanksinya ialah sebagai pelayan sekolah yang ditujukan demi kebutuhan sekolah yakni dengan merapikan musala, menyusun tempat sampah sesuai jenisnya dan membuang sampah ditempat penampungan akhir setiap hari. Upaya guru untuk mencegah *bullying* jenis psikologis atau mental, dapat dilakukan dengan menciptakan kelompok kerja terdiri dari beberapa siswa yang menjadi korban *bullying* dan pelaku dan tetap didampingi serta dikontrol oleh guru setiap kegiatan yang mereka kerjakan.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk *bullying* ada tiga, diantaranya *bullying* jenis verbal, *bullying* jenis fisik dan *bullying* jenis mental. Adapun upaya pendidik untuk meminimalisir perilaku *bullying* antar siswa dapat dilakukan dengan cara membimbing, menasihati, mengarahkan, membina, memberi sanksi kepada siswa, serta melibatkan orang tua dalam mengontrol segala perilaku siswa yang terjadi di sekolah.

Pendidik, sebutan lain dari guru ialah seorang dewasa yang mempunyai kewajiban membimbing dan membantu siswa-siswi pada perkembangan jasmani dan rohaninya yang diharapkan dapat menuju keadaan dewasa, sanggup menjalankan perintah sebagai makhluk Allah, pemimpin di muka bumi ini, makhluk yang berhubungan timbal balik dengan yang lainnya, serta individu yang mampu tegak sendiri (Buan, 2021, hal. 1). Umar (2020, hal. 63) menguraikan pendapat praktisi pendidikan, Prey Katz yang mendeskripsikan guru berperan di sekolah diantaranya menjadi komunikator, teman sejawat yang menyampaikan pesan-pesan informatif, motivator yang memberikan *support* dan inspirasi, pemandu dalam mengembangkan nilai-nilai serta sikap, seorang yang paham akan materi yang disampaikan.

Oleh karenanya, maka dapat diikhtisarkan bahwa peran guru ialah suatu perilaku atau perbuatan seseorang yang memiliki kompetensi profesional kepada siswa, diantaranya bertindak sebagai pembimbing dalam pengembangan sikap serta nilai-nilai, teman sejawat yang memberikan solusi, sebagai komunikator, sebagai motivator yang dapat memberi *support* dan inspirasi, juga sebagai seorang yang menguasai materi yang diajarkan khususnya pada bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan yaitu suatu bidang studi terdiri dari susunan proses dalam membimbing siswa agar kelak tercipta sebagai penduduk yang mempunyai karakter khas bangsa Indonesia, yang bertanggungjawab, cerdas, dan terampil yang tentunya berperan aktif dalam kegiatan di lingkungan masyarakat berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia (Madiung, Andi, & Chakti, 2018, hal. 20). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan dirancang dengan memfokuskan pada pembentukan kepribadian yang meliputi aspek religius, sosiokultural, berbahasa, berbangsa dan bernegara agar tercipta warga negara atau penduduk yang cerdas (*civic knowledge*), terampil (*civic skills*), dan bertanggungjawab (*civic responsibility/dispositions*) dengan demikian mampu berperan aktif dalam masyarakat sesuai dengan aturan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Rachman, Nurgiansyah, & Kabatiah, 2021; Setiawan et al., 2020, hal. 2).

Pendidikan Kewarganegaraan ialah suatu program pendidikan yang dirancang secara inovatif dan berpusat pada pembentukan kepribadian demi membentuk siswa yang baik, yakni memiliki sejumlah kompetensi pengetahuan, keterampilan dan bertanggung jawab serta menjauhi perilaku buruk termasuk *bullying*. Kurniasih (2018, hal. 78) menyatakan *bullying* yaitu keinginan atau hasrat untuk menyakiti juga kebanyakan menyangkut ketidaksetaraan kekuatan fisik si pelaku kepada seorang ataupun kumpulan penderita yang tidak memiliki kecakapan fisik dan tindakan tersebut berulang kali terjadi dan biasanya dengan menyerang tapi tidak dilakukan secara adil. Astuti (2008, hal. 10–22) menjelaskan, makna *bullying* adalah sepele tindakan bersifat menyerang pada anak-anak yang menyebabkan adanya penderita atau korban yang juga temannya atau sesama siswa lainnya secara berulang.

Bullying yang terjadi di sekolah lazimnya terjadi karena dua hal, kekuatan diantara pelaku *bullying* dengan korban tidak sebanding. Pelaku *bullying* umumnya memiliki kekuatan fisik yang kuat, ukuran badan lebih tegap, memiliki keterampilan dalam berbicara serta adanya perasaan superior dibandingkan korban yang dianggap atau tampak lemah. Kedua, pelaku *bully* memanfaatkan kekuatannya dengan cara mengganggu, melawan, menyerang, atau dengan cara mengucilkan dan menganggap rendah orang lain secara berulang.

Melalui beberapa teori yang sudah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa *bullying* adalah tindakan seseorang yang tidak memiliki nilai karakter dengan menyakiti orang lain terjadi dari hari ke hari dan secara berulang kali, dalam wujud tindak kekerasan verbal, fisik, relasional, dan *cyber bullying* seperti tindakan menyapa nama seseorang dengan panggilan ejekan yang tidak disukai, menyebarkan gosip atau yang dikenal rumor yang kemungkinan tidak semuanya benar, memukul, mendorong, bahkan memberikan peringatan.

Nilai-nilai karakter bukan sekadar dipelajari saja sebagaimana dalam penelitian Kabatihah (2021) aktivitas belajar mengajar bukan sekadar memaksa siswa supaya ingat dan memiliki kecakapan tentang nilai-nilai karakter yang sudah diseleksi oleh orang lain, akan tetapi didampingi dalam menemukan sesuatu, menyelidiki, menanggung segala akibatnya, memajukan, menyeleksi, memetik tindakan, dan merealisasi nilai-nilai baik tersebut di dalam aktivitasnya masing-masing.

Nursalam dkk (2020, hal. 24–26) menjelaskan bahwa nilai-nilai karakter klasifikasikan kedalam 18 poin, diantaranya” (1) religius, melaksanakan perintah agama yang dianut, memiliki sikap toleransi dan hidup rukun; (2) tidak berbohong, menjadi sosok yang senantiasa diyakini atas perbuatan dan lisan; (3) sikap toleransi, menampilkan sikap menghargai keberagaman sara, juga sikap manusia lain yang tidak sama dengan pribadinya. (4) disiplin, menampilkan sikap taat dalam banyak peraturan dan ketentuan yang berlaku. (5) kerja keras, ialah sikap bersungguh-sungguh mengalahkannya rintangan yang wajib dilakukan, juga mengerjakan perintah dengan baik; (6) kreatif, memikirkan dan menciptakan inovasi berbeda dari apa yang sudah dipunya; (7) mandiri, yakni tidak bergantung dengan siapa saja dalam hal penyelesaian tugas; (8) demokratis, sikap menilai seimbang antara kewajiban dan hak dirinya sendiri juga orang lain; (9) rasa ingin tahu; dimana selalu berusaha lebih dalam dari yang dipelajari; (10) semangat kebangsaan; diupayakan dengan meletakkan keperluan bangsa di atas kebutuhan pribadi dan golongan. (11) cinta tanah air, dimana seseorang berpegang teguh, peduli, dan menjunjung tinggi bahasa, budaya, sosial politik bangsa, serta ekonomi; (12) mengapresiasi prestasi; menciptakan suatu hal bermanfaat untuk segenap warga negara, dan tidak lupa mengapresiasi pencapaian orang lain tentunya; (13) komunikatif/bersahabat, dimana perilaku ini menunjukkan perasaan suka bergabung serta berkolaborasi dengan yang lainnya; (14) cinta damai, perilaku menciptakan suasana dimana orang lain menikmati kebahagiaan dan nyaman dengan hadirnya; (15) gemar membaca; terbiasa menyempatkan diri membaca beragam bahan bacaan yang bermanfaat; (16) peduli lingkungan; berusaha menangkal kerusakan alam yang terjadi di lingkungan di sekitarnya; (17) peduli sosial, senang menawarkan bantuan kepada individu lain yang butuh bantuan; dan (18) tanggung jawab, dengan mengerjakan tugas dan kewajiban semestinya.

Winarsih (2019, hal. 3) juga menjelaskan nilai-nilai karakter suatu bangsa antara lain religius, demokrasi, toleransi, jujur, kerja keras, disiplin, mandiri, bertanggungjawab, kreatif, , rasa ingin tahu, cinta tanah air, peduli sosial, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, semangat kebangsaan, dan peduli lingkungan. *Bullying* dapat diminimalisir dengan memberikan penguatan pendidikan karakter melalui rasa kesetiakawanan sosial atau juga yang dikenal dengan solidaritas sosial agar terbentuk rasa kebersamaan sehingga hubungan antar siswa solid dan kecil kemungkinan terjadinya kekerasan. Berdasarkan uraian teori berikut, dapat diambil simpulan yaitu nilai-nilai karakter yang dikembangkan guru PPKn dalam mencegah terjadinya *bullying* dilakukan dengan memberi penguatan pada materi, diantaranya memberikan contoh perilaku baik serta pemahaman mengenai toleransi, peduli sosial, demokratis, cinta damai, kesetiakawanan sosial dan tanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan, Jalan Masjid, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan Tahun Pelajaran 2020/2021 yang berjumlah 253 siswa. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling dimana teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Cara pengambilan sampel pada penelitian ini dengan cara randomisasi yaitu pengambilan sampel melalui tabel bilangan random Sugiyono (dalam Nugroho, 2018, hal. 5). Berdasarkan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus Slovin, maka jumlah sampel yang diperoleh untuk penelitian ini sebanyak 72 siswa.

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel x dan y , dimana variabel x yaitu peran guru PPKn dan variabel y adalah mencegah terjadinya *bullying*. Sugiyono (2017, hal. 61) menjelaskan bahwa “variabel penelitian yaitu satu sifat atau atribut juga nilai dari obyek, orang, atau kegiatan yang memiliki jenis khusus yang distabilkan pengkaji untuk ditelaah sehingga dapat ditarik kesimpulannya di kemudian”. Instrumen yang digunakan pada penelitian menggunakan angket. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran yaitu skala *Likert* dalam mengukur pendapat, persepsi dan sikap siswa. Instrumen penelitian ini menggunakan skala *Likert* dalam bentuk *checklist*. Teknik analisis data menggunakan persentase (Ajat Rukajat, 2018:79) dengan rumusan: $P = \frac{f}{N} 100\%$.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, menurut penulis perlu dilakukan penelitian tentang peran guru khususnya bidang studi PPKn dalam membentuk moral siswa siswi agar dapat berperilaku sesuai norma yang berlaku. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana peran guru PPKn dalam mencegah terjadinya *bullying* pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan Tahun Pelajaran 2020/2021. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru PPKn dalam mencegah terjadinya *bullying* pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan Tahun Pelajaran 2020/2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen Angket Penelitian

1. *Validitas dan Reliabilitas Variabel X*

Uji coba instrumen penelitian dilakukan di luar sampel penelitian yang memiliki kesamaan dengan sampel penelitian yaitu pada siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Percut Sei Tuan. Uji coba instrumen dilaksanakan pada tanggal 2 September 2021. Adapun jumlah item pernyataan yang digunakan adalah 20 item yang dibagikan kepada 42 siswa. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui komputerisasi IBM SPSS 22 terdapat 1 item pernyataan yang tidak dapat digunakan dalam penelitian sehingga peneliti memilih untuk menghapus 1 pernyataan yang tidak valid dan hanya 19 soal yang

dibagikan kepada responden. Hasil uji validasi angket peran guru (x) dapat dilihat pada tabel 1 dengan keterangan bahwa pernyataan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan tidak valid jika $r_{hitung} < r_{tabel}$:

Tabel 1. Uji Validitas Angket Peran Guru (X)

No. Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0.609	0,304	V
2	0.722		V
3	0.363		V
4	0.690		V
5	0.713		V
6	0.522		V
7	0.689		V
8	0.604		V
9	0.253		TV
10	0.634		V
11	0.588		V
12	0.497		V
13	0.674		V
14	0.686		V
15	0.547		V
16	0.511		V
17	0.640		V
18	0.606		V
19	0.592		V
20	0.661		V

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus *Cronbach Alpha*, dengan ketentuan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ maka angket dinyatakan reliabel. Berdasarkan hasil uji diketahui nilai *Cronbach Alpha* $0,897 > 0,60$ sehingga reliabel.

Tabel 2. Reliabilitas Variabel X

Cronbach's Alpha	N of Items
0.897	20

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

2. Validitas dan Reliabilitas Variabel Y

Jumlah item pernyataan yang digunakan untuk variabel Y adalah 20 item yang dibagikan kepada 42 siswa. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui komputerisasi IBM SPSS 22, dinyatakan bahwa seluruh item yang diuji valid sehingga penulis membagikan seluruh pernyataan variabel Y kepada responden. Hasil uji validasi variabel Y dapat dilihat pada tabel 3 dengan keterangan bahwa pernyataan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan tidak valid jika $r_{hitung} < r_{tabel}$:

Tabel 3. Validitas Variabel Y

No. Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
----------	--------------	-------------	------------

1	0.762	0,304	V
2	0.798		V
3	0.485		V
4	0.783		V
5	0.829		V
6	0.627		V
7	0.790		V
8	0.754		V
9	0.866		V
10	0.634		V
11	0.804		V
12	0.581		V
13	0.867		V
14	0.765		V
15	0.602		V
16	0.786		V
17	0.750		V
18	0.765		V
19	0.604		V
20	0.591		V

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

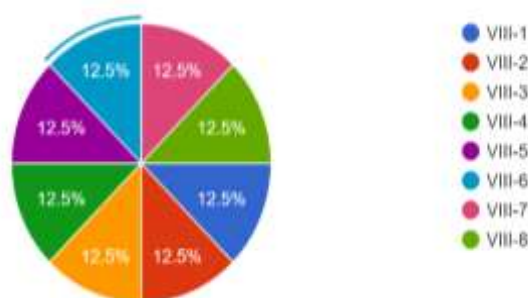
Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus *Cronbach Alpha*. Setelah dilakukan pengujian pada 20 item pernyataan variabel Y, dinyatakan semua item pernyataan reliabel dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Berdasarkan hasil uji diketahui nilai *Cronbach Alpha* $0,951 > 0,60$ sehingga reliabel.

Tabel 4. Uji Reliabilitas Angket Peran Guru (Y)

Cronbach's Alpha	N of Items
0.951	20

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Gambar 1. Diagram Persentase Jumlah Responden



Hasil Penelitian

Angket penelitian disebarakan kepada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan dengan sampel 72 responden. Hasil uji validitas angket pada komputerisasi IBM SPSS 22 terdapat 1 item pernyataan kuesioner yang tidak valid pada variabel x sehingga

tidak dapat digunakan dalam penelitian. Peneliti memilih untuk menghapus 1 pernyataan yang tidak valid dan hanya 19 item pernyataan pada variabel x yang dibagikan kepada responden. Sedangkan untuk variabel y 20 item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan.

Gambaran peran guru PPKn dalam mencegah terjadinya *bullying* pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan tahun pelajaran 2020/2021 didasarkan pada jawaban 72 responden variabel berjumlah 20 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Tabulasi Jawaban Responden Secara Keseluruhan untuk Variabel Peran Guru

No. Item	Selalu		Sering		Kadang-Kadang		Hampir Tidak Pernah		Tidak Pernah	
	(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)
1	35	48,6	23	31,9	9	12,5	4	5,6	1	1,4
2	32	44,4	22	30,6	12	16,7	1	1,4	5	6,9
3	28	38,9	12	16,7	9	12,5	2	2,8	21	29,2
4	58	80,6	6	8,3	2	2,8	5	6,9	1	1,4
5	37	51,4	20	27,8	8	11,1	5	6,9	2	2,8
6	58	80,6	8	11,1	1	1,4	2	2,8	3	4,2
7	41	56,9	21	29,2	8	11,1	2	2,8	0	0
8	43	59,7	8	11,1	10	13,9	6	8,3	5	6,9
9	39	54,2	21	29,2	7	9,7	3	4,2	2	2,8
10	47	65,3	11	15,3	10	13,9	2	2,8	2	2,8
11	37	51,4	6	8,3	14	19,4	6	8,3	9	12,5
12	44	61,1	15	20,8	11	15,3	2	2,8	0	0
13	57	79,2	7	9,7	6	8,3	0	0	2	2,8
14	44	61,1	16	22,2	7	9,7	3	4,2	2	2,8
15	40	55,6	9	12,5	6	8,3	4	5,6	13	18,1
16	39	54,2	17	23,6	9	12,5	2	2,8	5	6,9
17	37	51,4	17	23,6	14	19,4	3	4,2	1	1,4
18	36	50	20	27,8	10	13,9	6	8,3	0	0
19	55	76,4	5	6,9	7	9,7	3	4,2	2	2,8
Jumlah	807	1121	264	366.6	160	222.1	61	84.9	76	105.7
Rata-rata	42.4	59	13.8	19.2	8.4	11.6	3.2	4.4	4	5.5

Data pada tabel 5 menjelaskan secara menyeluruh bahwa Peran Guru PPKn dalam mencegah terjadinya *bullying* melalui angket, diketahui rata-rata siswa yang menjawab selalu berjumlah 42 responden (59%), yang menjawab sering 14 siswa (19,2%), yang menjawab kadang-kadang 9 responden (11,6%), yang menjawab hampir tidak pernah 3 responden (4,4%), dan yang menjawab tidak pernah 4 responden (5,5%). Berdasarkan data tersebut 56 siswa (42+14) atau 78,2% dari 72 responden menyatakan guru PPKn selalu berperan dalam mencegah terjadinya *bullying* pada siswa kelas VIII.

Tabel 6. Tabulasi Jawaban Responden Secara Keseluruhan untuk Variabel *Bullying*

No. Item	Selalu		Sering		Kadang-Kadang		Hampir Tidak Pernah		Tidak Pernah	
	(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)
1	1	1,4	6	8,3	11	15,3	13	18,1	41	56,9
2	4	5,6	6	8,3	20	27,8	10	13,9	32	44,4
3	9	12,5	8	11,1	20	27,8	11	15,3	24	33,3
4	4	5,6	7	9,7	14	19,4	19	26,4	28	38,9
5	5	6,9	4	5,6	6	8,3	8	11,1	49	68,1
6	1	1,4	4	5,6	8	11,1	15	20,8	44	61,1
7	4	5,6	1	1,4	10	13,9	7	9,7	50	69,4
8	5	6,9	8	11,1	18	25	21	29,2	20	27,8
9	4	5,6	1	1,4	5	6,9	5	6,9	57	79,2
10	3	4,2	2	2,8	21	29,2	13	18,1	33	45,8
11	2	2,8	4	5,6	20	27,8	17	23,6	29	40,3
12	6	8,3	4	5,6	21	29,2	12	16,7	29	40,3
13	2	2,8	3	4,2	11	15,3	17	23,6	39	54,2
14	6	8,3	1	1,4	19	26,4	16	22,2	30	41,7
15	7	9,7	8	11,1	16	22,2	10	13,9	31	43,1
16	8	11,1	6	8,3	13	18,1	9	12,5	36	50
17	4	5,6	0	0	3	4,2	9	12,5	56	77,8
18	7	9,7	1	1,4	5	6,9	10	13,9	49	68,1
19	8	11,1	4	5,6	15	20,8	18	25	27	37,5
20	5	6,9	4	5,6	17	23,6	16	22,2	30	41,7
Jumlah	95	132	82	114,1	273	379,2	256	355,6	734	1019,6
Rata-rata	4,75	6,6	4,1	5,705	13,65	18,96	12,8	17,78	36,7	50,98

Data pada tabel 6 menjelaskan secara menyeluruh perilaku *bullying* pada siswa melalui angket, diketahui rata-rata siswa yang menjawab selalu berjumlah 5 responden (6,6%), yang menjawab sering 4 siswa (5,70%), yang menjawab kadang-kadang 13 responden (18,96%), yang menjawab hampir tidak pernah 13 responden (12,8%), dan yang menjawab tidak pernah 37 responden (50,98%). Berdasarkan data tersebut 37 siswa (50,98%) dari 72 menyatakan tidak pernah melakukan *bullying*. Artinya masih ada 40 siswa (49,02%) yang melakukan perilaku *bullying*. Jumlah skor kriterium (bila setiap item mendapat skor tertinggi) = (skor tertinggi × jumlah item × jumlah responden) (Sugiyono, 2017, hal. 143–144).

Variabel Peran Guru (X) = $5 \times 20 \times 72$

Jumlah Skor Kriterium = 7200

Variabel *Bullying* (Y) = $5 \times 20 \times 72$

Jumlah Skor Kriterium = 7200

Tabel 7. Skor Perolehan Responden

Variabel	Total Skor
Peran Guru	5769
<i>Bullying</i>	2868

Untuk menunjukkan persentase keseluruhan hasil penelitian, maka: *Jumlah skor hasil pengumpulan data : Jumlah skor kriteria* $\times 100 \%$.

Persentase Variabel (X) = $\frac{5769}{7200} \times 100\% = 80,12\%$ dari yang diharapkan (100%) dan

Persentase Variabel (Y) = $\frac{2868}{7200} \times 100\% = 39,83\%$ dari yang diharapkan (0%). Skor perolehan pada variabel X sejumlah 5769 termasuk dalam kategori baik, kesimpulannya guru PPKn berperan baik dalam mencegah terjadinya *bullying* pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan tahun pelajaran 2020/2021.

Skor perolehan pada variabel Y sebanyak 2868 termasuk pada kategori hampir tidak pernah, dengan demikian perilaku *bullying* pernah terjadi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan tahun pelajaran 2020/2021 dengan adanya perolehan skor pada variabel *bullying* sebanyak 39,83% dari yang diharapkan sebesar 0%.

Tabel 8. Jumlah Siswa yang Melakukan *Bullying*

No.	Jenis <i>Bullying</i>	VIII-1	VIII-2	VIII-3	VIII-4	VIII-5	VIII-6	VIII-7	VIII-8
1	Fisik	6	6	7	7	6	6	6	7
2	Verbal	7	4	5	8	4	5	5	5
3	Relasional	7	6	7	6	6	4	5	6
4	<i>Cyber Bullying</i>	7	4	6	7	7	6	5	7

Dari tabel diketahui bahwa di kelas VIII-1 siswa yang melakukan *bullying* fisik sebanyak 6 siswa, verbal sebanyak 7 siswa, relasional sebanyak 7 siswa, dan *cyber bullying* sebanyak 7 siswa dari 9 sampel. Kelas VIII-2 siswa yang melakukan *bullying* fisik sebanyak 6 siswa, verbal 4 siswa, relasional sebanyak 6 siswa, *cyber bullying* sebanyak 4 siswa. Kelas VIII-3 siswa yang melakukan *bullying* fisik sebanyak 7 siswa, verbal 5 siswa, relasional sebanyak 7 siswa, *cyber bullying* sebanyak 6 siswa. Kelas VIII-4 siswa yang melakukan *bullying* fisik sebanyak 7 siswa, verbal 8 siswa, relasional sebanyak 6 siswa, *cyber bullying* sebanyak 7 siswa. Kelas VIII-5 siswa yang melakukan *bullying* fisik sebanyak 6 siswa, verbal 4 siswa, relasional sebanyak 6 siswa, *cyber bullying* sebanyak 7 siswa. Kelas VIII-6 siswa yang melakukan *bullying* fisik sebanyak 6 siswa, verbal 5 siswa, relasional sebanyak 4 siswa, *cyber bullying* sebanyak 6 siswa. Kelas VIII-7 siswa yang melakukan *bullying* fisik sebanyak 6 siswa, verbal 5 siswa, relasional sebanyak 5 siswa, *cyber bullying* sebanyak 5 siswa. Kelas VIII-8 siswa yang melakukan *bullying* fisik sebanyak 7 siswa, verbal 5 siswa, relasional sebanyak 6 siswa, *cyber bullying* sebanyak 7 siswa. Penentuan skor untuk siswa yang memilih poin 3 akan mengarah pada kategori “pernah”. Hasil tabel menyatakan siswa melakukan *bullying* apabila memilih kategori “pernah” di salah satu item pernyataan instrumen penelitian yang digunakan.

Peran Guru PPKn Dalam Mencegah Terjadinya *Bullying*

Kasus *bullying* di Indonesia marak terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di media sosial yang tentunya memberi dampak buruk untuk korban juga pelaku itu sendiri. *Bullying* tidak akan terjadi apabila siswa mengimplementasikan penguasaan materi dalam Pendidikan karakter melalui perilaku-perilaku yang baik, sehingga *bullying* dan pendidikan karakter berhubungan satu sama lain. Dampak negatif dari perilaku *bullying* yang terjadi antar siswa diantaranya menurunnya sikap kepercayaan diri, perasaan

tertekan, menganggap diri paling rendah, adanya rasa tidak tenteram dan sedap, tidak berani melakukan sosialisasi di wilayahnya dan sukar memusatkan pikiran saat belajar (Amnda et al., 2020).

Pendidikan Kewarganegaraan ialah sarana yang sesuai dalam menerapkan nilai-nilai dalam pendidikan karakter kepada siswa-siswi. Menurut Setiawan, Yunita, & Rachman (2020, hal. 2) untuk mencipta (*civic disposition/responsibility*) watak atau sikap kepribadian siswa serta mampu bertanggungjawab. Peran guru PPKn dibutuhkan dalam memajukan nilai-nilai karakter dalam berperilaku, baik di lingkungan sekolah sehingga mencegah terjadinya penyimpangan diantara siswa seperti tindakan *bullying*. Hamidah (2019) menyatakan guru dapat menerapkan program guru sahabat anak pada siswa yaitu dengan memposisikan diri setara pada semua siswa melalui penggunaan yang sesuai dengan siswanya sehingga menjadikan suasana nyaman saat berinteraksi, serta bekerjasama dengan warga sekolah mengontrol, membantu mewujudkan kondisi yang mendidik bagi siswa, serta mengawasi kegiatan dan perilaku siswa. Readussolihin (2019) menjelaskan upaya untuk meminimalisir perilaku *bullying* antar siswa dengan cara membimbing, menasihati, mengarahkan, membina, memberi sanksi kepada siswa, serta melibatkan orang tua dalam mengontrol segala perilaku siswa yang terjadi di sekolah.

Guru PPKn memegang peranan penting dalam membentuk karakter siswa agar dapat berperilaku yang baik, sebagaimana Mayasari (2020) dalam penelitiannya menjelaskan guru PPKn memiliki kontribusi yang sangat penting bagi pembentukan dan pembinaan karakter agar siswa dapat menjadi warga negara yang bukan hanya *good citizen* namun juga *smart citizen*. Peran guru PPKn dalam pembentukan nilai-nilai karakter siswa dalam mencegah perilaku *bullying* dilakukan dengan penanaman materi yang terdapat dalam PPKn yaitu toleransi, peduli sosial, demokratis, cinta damai, dan tanggungjawab (Nursalam et al., 2020, hal. 24–26). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator toleransi, peduli sosial, demokratis, cinta damai, dan tanggung jawab, karena dengan meningkatkan nilai-nilai karakter perilaku *bullying* dapat diminimalisir.

Berdasarkan hasil penelitian guru PPKn berperan baik apabila dapat memberikan pemahaman materi dalam menanamkan nilai toleransi, peduli sosial, demokratis, cinta damai, kesetiakawanan sosial, dan tanggungjawab. Penanaman nilai toleransi ditunjukkan dengan jawaban responden yang menyatakan bahwa guru PPKn selalu mengajarkan materi tentang toleransi saat berlangsung kegiatan belajar mengajar; selalu menjelaskan agar menghargai perbedaan fisik, kepandaian dan kekuatan antar siswa serta tidak merendahkan teman; guru selalu menjadi penengah apabila terjadi perbedaan pendapat yang berujung perkelahian antara siswa; serta guru tidak pernah membiarkan siswa menertawai dan mengejek teman jika dia tidak dapat menjawab pertanyaan yang mudah.

Pada indikator peduli sosial menunjukkan bahwa guru PPKn berperan baik dalam menanamkan nilai peduli sosial ditunjukkan melalui pernyataan siswa bahwa guru PPKn selalu menjelaskan untuk peduli kepada orang lain karena manusia saling membutuhkan; tidak pernah membiarkan jika ada siswa yang berkelahi di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung; selalu memberikan contoh sikap peduli terhadap orang lain seperti mendamaikan teman yang berkelahi, dan tidak pernah mengabaikan apabila ada siswa yang menyakiti perasaan teman melalui perkataan.

Dalam indikator demokratis menampilkan guru PPKn juga berperan baik dalam menanamkan nilai demokratis, ditunjukkan dengan pernyataan bahwa guru PPKn selalu mengajarkan siswa untuk memandang hak yang sama dengan orang lain; mengajarkan untuk memperlakukan teman dengan baik sebagaimana memperlakukan diri sendiri; tidak pernah membiarkan apabila terjadi perselisihan pendapat dengan teman saat belajar; serta selalu memberikan contoh perilaku demokratis kepada siswa.

Selanjutnya, pada indikator cinta damai menunjukkan guru PPKn berperan baik dalam menanamkan nilai cinta damai, diantaranya dengan selalu memberikan contoh sikap yang tenang dan menyenangkan saat belajar mengajar tanpa membuat keributan dengan teman; serta tidak pernah membiarkan siswa mengambil buku paket Pendidikan Kewarganegaraan milik teman dengan paksa.

Kemudian, indikator kesetiakawanan sosial menguraikan peran guru PPKn sudah baik dalam menanamkan nilai kesetiakawanan sosial ditunjukkan oleh jawaban responden yang menyatakan bahwa guru selalu mengajarkan solidaritas agar dapat bekerja sama dengan baik tanpa berteriak dan mengucapkan kata kotor kepada teman; selalu menyarankan untuk membantu teman yang sedang dijahili di sekolah; serta selalu mengajarkan untuk membela teman yang terkena *bully* atau dijahati.

Terakhir, indikator tanggung jawab pada kuesioner variabel x menunjukkan guru PPKn juga berperan baik dalam menanamkan nilai tanggung jawab ditunjukkan dengan jawaban responden yang menyatakan bahwa guru PPKn selalu mengajarkan untuk bertanggungjawab atas perbuatan sendiri jika salah, seperti saat menjahili teman dan mengambil barang yang bukan milik sendiri akan diberi hukuman; selalu mengajarkan untuk menaati peraturan selama belajar mengajar berlangsung, jika tidak akan diberi sanksi; tidak pernah membiarkan apabila ada siswa yang tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.

Bullying terdiri dari empat jenis, diantaranya secara verbal, fisik, relasional dan *cyber bullying*, sebagaimana menurut Coloroso (Sapitri, 2020, hal. 15) *bullying* dalam bentuk pelecehan verbal ialah awal dari perilaku *bullying* lainnya yang mengarah pada kekerasan, seperti membalas ejekan dan cacian teman yang setimpal dengan ejekannya; tertawa karena seorang kawan berjalan maju ke depan kelas; menghina kawan saat bosan di kelas adalah candaan; menyapa kawan dengan panggilan gendut, pesek, cupu; serta mengecam kawan tetapi masa bodoh jika ia tersinggung atau tidak. *Bullying* secara Fisik; merupakan bentuk *bullying* yang mudah untuk dikenali, contohnya berkelahi di luar maupun dalam sekolah; mencubit/menjegal teman dalam bercanda; memukul teman yang dianggap mengganggu; dalam bercanda menganggap memukul adalah hal wajar.

Bullying secara relasional yaitu perbuatan memutus relasi seseorang dengan tujuan merendahkan harga diri seseorang seperti mengabaikan, mengucilkan atau menghindari orang tersebut. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan kawan yang di *bully* dengan menggunjingkan kawan; suka mengabaikan kawan; serta melirik kalau ada teman yang tidak disukai. *Cyber Bullying* ialah jenis tindakan *bullying* yang diperbuat oleh si pelaku dengan sarana elektronik, diantaranya *handphone*, komputer, *website*, internet, SMS, e-mail *chatting room*, dengan perilaku menghindari teman yang tidak disukai; mengunggah foto-foto atau video aib teman yang buruk; iseng membajak sosial media teman; menganggap memaki melalui di media sosial lebih baik daripada secara langsung; senang bergosip di media sosial (*Whats App* atau *Facebook*); serta senang bertengkar di media sosial seperti menyindir teman.

Secara umum hal yang membedakan dengan penelitian relevan ialah indikator yang digunakan dalam penelitian diantaranya penanaman nilai-nilai karakter seperti toleransi, peduli sosial, demokratis, cinta damai, kesetiakawanan sosial dan tanggungjawab berdasarkan teori yang telah diuraikan. Metode yang diterapkan pada penelitian ini yakni jenis deskriptif kuantitatif. Sedangkan pada kajian/penelitian yang relevan, peran guru dalam mencegah terjadinya *bullying* dilakukan dengan cara membimbing, menasihati, mengarahkan, membina, memberi sanksi kepada siswa, serta melibatkan orang tua dalam mengontrol segala perilaku siswa yang terjadi di sekolah. Kemudian, metode yang digunakan yaitu jenis deskriptif kualitatif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui skor perolehan pada variabel Peran Guru (X) sebanyak 5769 termasuk dalam kriteria baik. Kesimpulannya guru PPKn berperan baik dalam mencegah terjadinya *bullying* pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan tahun pelajaran 2020/2021 yang juga dilihat dari persentase sebesar 80,12% dari yang diharapkan (100%). Upaya yang dilakukan guru PPKn dalam mencegah terjadinya *bullying* pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan sudah baik dengan memberi penguatan pada materi, diantaranya memberikan contoh perilaku baik serta pemahaman mengenai toleransi, peduli sosial, demokratis, kesetiakawanan sosial dan tanggung jawab. Data juga menunjukkan bahwa siswa hampir tidak pernah melakukan *bullying* yang dinyatakan melalui skor perolehan pada variabel *Bullying* (Y) sebanyak 2868 termasuk dalam kriteria hampir tidak pernah. Kesimpulannya, perilaku *bullying* pernah terjadi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan tahun pelajaran 2020/2021 yang juga ditunjukkan melalui persentase sebesar 39,83% dari yang diharapkan (0%). Penulis berharap agar guru PPKn terus meningkatkan pemahaman siswa dan memberi contoh perilaku baik melalui penanaman sikap toleransi, peduli sosial, demokratis, cinta damai, kesetiakawanan sosial dan tanggung jawab sehingga tidak ada lagi siswa yang melakukan tindakan *bullying* di lingkungan sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian juga berterima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian khususnya kepada guru dan siswa-siswinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnda, V., Amnda, V., Wulandari, S., Wulandari, S., Syah, S. N., Restari, Y. A., ... Arifin, Z. (2020). Bentuk dan Dampak Perilaku Bullying Terhadap Peserta Didik. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 5(1), 19–32. <https://doi.org/10.34125/kp.v5i1.454>
- Arya, L. (2018). *Melawan Bullying: Menggagas Kurikulum Anti Bullying di Sekolah*. Mojokerto: Sepilar Publishing House.

- Astuti, P. R. (2008). *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan pada Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Buan, Y. A. L. (2021). *Guru dan Pendidikan Karakter: Sinergitas Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter di Era Milenial*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Hamidah, Z. (2019). *Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menangani Kasus Bullying di SMP Ta'miriyah Surabaya*. UIN Sunan Ampel.
- Hendri. (2020). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pendidikan Pesantren dalam Membentuk Keadaban Moral Santri. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 35–49. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.18702>
- Kabatiah, M. (2021). Efektivitas Pengintegrasian Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Melalui Teknik Klarifikasi Nilai Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(1), 65–73. <https://doi.org/10.24114/JK.V18I1.23730>
- Kurniasih, I. (2018). *Guru Zaman Now, Metode Cerdas Mengatasi Permasalahan dalam Kelas*. Jakarta: Kata Pena.
- Madiong, B., Andi, Z. M., & Chakti, G. R. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Mayasari, I. (2020). Cyberbullying Versus Digital Citizenship. *E Prosiding Seminar Nasional Virtual Pendidikan Kewarganegaraan 2020 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia Pada Era Digital,"* 451–457. Surakarta: Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret.
- Nugroho, U. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Jasmani*. Purwodadi: CV. Sarnu Untung.
- Nursalam, Nawir, M., Suardi, & K, H. (2020). *Model Pendidikan Karakter pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar*. Banten: CV. A.A. Rizky.
- Rachman, F., Nurgiansyah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2970–2984. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052>
- Readussolihin. (2019). *Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengantisipasi Perilaku Bullying di SMP Negeri Pagar Ayu Kec. Megang Sakti*. STAI Bumi Silampari Lubuk Linggau.
- Sapitri, W. A. (2020). *Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini*. Semarang: Guepedia.
- Setiawan, D., Yunita, S., & Rachman, F. (2020). *Buku Ajar Kapita Selekta Kewarganegaraan*. Medan: Akasha Sakti.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Umar. (2020). *Pengantar Profesi Keguruan*. Depok: Rajawali Press.
- Untari, A. D., & Setiawati, E. (2020). Strategi Guru PPKn dalam Mengantisipasi Kekerasan pada Siswa. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 3(2), 185–200. <https://doi.org/10.47080/PROPATRIA.V3I2.993>

Winarsih. (2019). *Pendidikan Karakter Bangsa*. Tangerang: Loka Aksara.

STUDI ANALISIS KONSEP IDEOLOGI MARHAENISME SUKARNO SEBAGAI ASAS PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

Febri Fajar Pratama*, Ai Kusmiati Asyiah, Deni Chandra

Universitas Perjuangan, Jawa Barat, Indonesia

*febripratama@unper.ac.id

Abstract

*Ideology is important in the order of social and state life. Philosophically, the concept of ideology is very subjective. There are those who consider ideology as dogma, while others are concerned with linking ideology as political discourse and political views. Meanwhile, some think that ideology is based on the concrete interests of social class which is marked by the absence of interest on an economic basis. In the socio-historical context of the Indonesian nation, ideology is used as a "tool" for the struggle to form the mental, character, spirit and thoughts of anti-colonialism, so as to create a manifestation of the fundamental values of Indonesia in the form of Pancasila formulated by national figures. The purpose of this research is to study and analyze the concept of Sukarno's Marhaenism ideology which became the forerunner of thoughts/ideas about Pancasila. The method used is concept analysis with a qualitative approach. Based on the results of the analysis carried out, the results show that marhaenism conceptually emphasizes aspects of the struggle of the marhaens, namely the groups exploited by imperialism and capitalism so that they have difficulty being able to prosper themselves. The important elements in the ideology of Marxism are socio-nationalism, socio-democracy, mass-action, *machtvorming*, non-cooperation, and self-reliance.*

Keywords: *ideology, marhaenism, principles of struggle.*

Abstrak

Ideologi menjadi hal yang penting dalam tatanan kehidupan sosial maupun bernegara. Secara filosofis, konsep ideologi sangatlah subjektif. Ada yang menganggap ideologi sebagai dogma, ada juga yang menyangkutpautkan ideologi sebagai diskursus politik dan pandangan politik. Sedangkan sebagian lagi menganggap ideologi didasarkan pada kepentingan konkret kelas sosial yang ditandai oleh tidak adanya kepentingan atas dasar ekonomi. Dalam sosio-historis bangsa Indonesia, ideologi dijadikan sebagai "alat" perjuangan untuk membentuk mental, karakter, semangat dan pemikiran anti kolonialisme, sehingga terciptalah manifestasi dari nilai-nilai fundamental keindonesiaan berupa Pancasila yang dirumuskan oleh para tokoh nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konsep tentang ideologi Marhaenisme Sukarno yang menjadi cikal bakal pemikiran/gagasan mengenai Pancasila. Metode yang digunakan adalah analisis konsep dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan didapatkan hasil bahwa marhaenisme secara konseptual menekankan pada aspek perjuangan kaum marhaen, yaitu kelompok yang dieksploitasi oleh imperialisme dan kapitalisme sehingga mereka kesulitan untuk bisa mensejahterakan dirinya. Adapun unsur-unsur penting dalam ideologi marhaenisme yaitu sosio-

nasionalisme, sosio-demokrasi, aksi-massa, *machtvorming*, non-kooperasi, dan *self-reliance*.

Kata kunci: ideologi, marhaenisme, asas perjuangan

PENDAHULUAN

Marhaenisme merupakan sebuah konsep ideologi yang digagas oleh Sukarno muda sebagai hasil kontemplasi dan buah pikiran dari suasana kebatinan pada saat Indonesia masih digenggam oleh kekuatan imperialisme asing. Sukarno dengan idealisme dan semangat anti penindasan merasa bahwa kolonialisme merupakan hal yang harus ditentang habis-habisan karena tidak sesuai dengan prinsip berkeadilan. Pada masa kolonial Belanda, Sukarno dengan terang-terangan dan tegas menentang semua kebijakan pemerintah Hindia-Belanda yang mengendalikan sektor ekonomi, pemerintahan dan tatanan sosial masyarakat, sehingga kaum pribumi menjadi termarginalkan dan tertindas.

Marhaenisme merepresentasikan diri sebagai kaum Marhaen atau lebih dikenal dengan istilah *wong cilik* (rakyat kecil) yang dapat diidentifikasi dari tingkat penghasilan dan mata pencaharian. Melawati & Kuswono (2018) mengartikan *wong cilik* sebagai rakyat biasa yang tingkat ekonominya rendah, pendidikan rendah dan juga terbelakang. Konsep daripada Marhaenisme itu sendiri, diungkapkan oleh Kuswono (2016) muncul dari hasil perjuangan revolusioner Sukarno untuk membebaskan kaum Marhaen dari penindasan kolonialisme Belanda. Pemikiran Sukarno tentang Marhaenisme sebagian besar banyak dipengaruhi tokoh-tokoh sosialis barat, salah satunya yaitu Karl Marx dengan Marxismenya yang mengangkat isu perjuangan kelas. Meskipun paham Marhaenisme terpengaruh ideologi asing seperti marxisme, *core* dari konsep Marhaenisme lebih menekankan pada perjuangan secara holistik, yakni perjuangan antara yang terjajah dengan yang menjajah, bukan eksklusif pada kaum proletar melawan kaum borjuis kapitalis (Melawati & Kuswono, 2018).

Berangkat dari pemahaman Marhaenisme tersebut, Sukarno dengan idealismenya mulai berani mengungkapkan pandangannya tentang Marhaenisme, bahwa akar Marhaenisme ditegakkan di atas 4 sila, yaitu Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Nasionalisme atau Peri Kebangsaan, Demokrasi, dan Kesejahteraan Sosial, yang kemudian disingkat oleh Bung Karno dengan istilah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi (Parwanto, 2015). Bahkan Bung Karno (1964) sempat mengatakan dalam salah satu pidatonya yang ditulis dalam buku “Tjatkan Pantjasila!: Pantjasila Dasar Falsafah Negara,” bahwa “...Marhaenisme adalah Marxisme yang diselenggarakan, ditjotjokkan, dilaksanakan di Indonesia.” Marxisme yang dimaksud Bung Karno adalah Marxisme yang disesuaikan dengan keadaan bangsa Indonesia yang menekankan pada politik persatuan seluruh rakyat. Konsep yang menjadi landasan pokok paham Marhaenisme menurut pemikiran Sukarno meliputi: Radikal-revolusioner, Non-kooperatif, Massa-aksi, *Machtvorming*, dan *Self help & Reliance*. Ke-5 asas perjuangan tersebut kemudian digunakan oleh Bung Karno sebagai landasan dalam menjalankan ideologi Marhaenisme.

Ideologi Marhaenisme terus berkembang seiring dengan semakin kuatnya pengaruh Sukarno sebagai penggerak dan pemimpin bagi kaum Marhaen. Tak hanya berkembang dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi pemahaman. Pada sidang BPUPKI, ketika Bung Karno merumuskan konsep Pancasila, beliau menyadari bahwa gagasan tentang paham

Marhaenisme perlu mengakomodasi semua golongan, salah satunya adalah golongan Islam. Maka dari itu, Bung Karno mencoba mensintesakan pemahaman Marhaenisme dengan ajaran Islam agar dapat diterima. Adapun gagasan yang coba diakomodasi Bung Karno adalah mengenai asas ketuhanan dan menyelipkan nilai ketauhidan, bahwa Allah itu satu, sebab dari segala sebab (causa prima), Tuhan yang Maha Esa. Konsep mengenai Pancasila yang semula terdiri dari 4 sila yang diperas dari nilai-nilai gagasan Marhaenisme (sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi) akhirnya menjadi 5 sila dengan penambahan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Marhaenisme masih menjadi “-isme” yang melekat pada diri Bung Karno. Banyak yang mengaku Marhaenis, namun beberapa justru menyimpang dari Marhaenisme Bung Karno. Sempat dalam pidatonya dulu ketika menjelaskan konsep rumusan Pancasila di depan rakyat Indonesia, Sukarno (1964) mengatakan:

“...Kalau dihubungkan dengan nama Bung Karno, saja minta supaya Marhaenisme itu seperti Marhaenisme Bung Karno. Djanganlah kok sekedar isme-isme lantas dikatakan inilah Marhaenisme tulen. Nanti dulu, tanja dulu sama Bung Karno. Sebab, katakanlah jang mentjiptakan Marhaenisme Bung Karno; dus tanja dulu apa jang dimaksudkan oleh Bung Karno dengan Marhaenisme. Kalau tidak tjotjok dengan Marhaenisme Bung Karno itu, kasihlah nama lain; djangan dikatakan Marhaenisme”.

Pasca kemerdekaan, ideologi Marhaenisme Sukarno mengalami pasang surut akibat gejolak politik dalam negeri dan berbagai peristiwa disintegrasi nasional yang terjadi. Pada masa peralihan kekuasaan tahun 1966, ketika Sukarno jatuh karena peristiwa Gestapu (Gerakan 30 September 1965) Indonesia memasuki pemerintahan orde baru. Saat itu, Soeharto sebagai presiden terpilih menggantikan Sukarno melarang adanya eksistensi paham kiri, salah satunya yaitu Marhaenisme Sukarno. Bahkan, ada upaya untuk melakukan de-Sukarnoisasi (Sophiaan, 1994), sehingga siapapun yang berseberangan dengan politik pemerintah akan dianggap sebagai penghambat kemajuan negara. Menanggapi hal tersebut, elit-elit politik pada waktu itu, terutama pengikut Sukarno mencoba untuk tetap membawa dan menjaga eksistensi paham Marhaenisme dengan cara “menyisipkan” paham tersebut dalam ideologi organisasi infrastruktur politik seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan mahasiswa.

Hingga saat ini, ideologi Marhaenisme masih menjadi ciri pemikiran Bung Karno, meskipun implementasi dan nilai-nilai dalam Marhaenisme itu sendiri sudah jauh bergeser dan tidak lagi berada pada “ruh” nya, terutama para politikus yang menganggap dirinya sebagai Marhaenis, namun justru malah menjadi elitis, oportunis dan pragmatis (Dewantara, 2017). Keadaan Indonesia dewasa ini yang dianggap mengalami fase post-imperialisme dan kapitalisme diberbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, politik dan budaya membuat banyak kalangan kembali melirik konsep marhaenisme dan trisakti yang dahulu pernah digaungkan oleh Sukarno, yakni berdikari dalam ekonomi, bebas dalam politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Bahkan, Presiden Jokowi melalui pidato sambutannya dalam acara forum konferensi GMNI sempat mengatakan “Marhaenisme adalah cara perjuangan yang revolusioner. Kaum Marhaen harus mengembangkan masyarakat yang kuat, bahagia, sentosa, adil dan makmur” (Lumanauw, 2015). Banyak penelitian yang membahas mengenai Marhaenisme, namun sebagian besar berfokus pada lingkup kajian sejarah dan sebagian lagi hanya menjadi sub tema dari pemikiran Bung Karno. Seperti penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Melawati & Kuswono

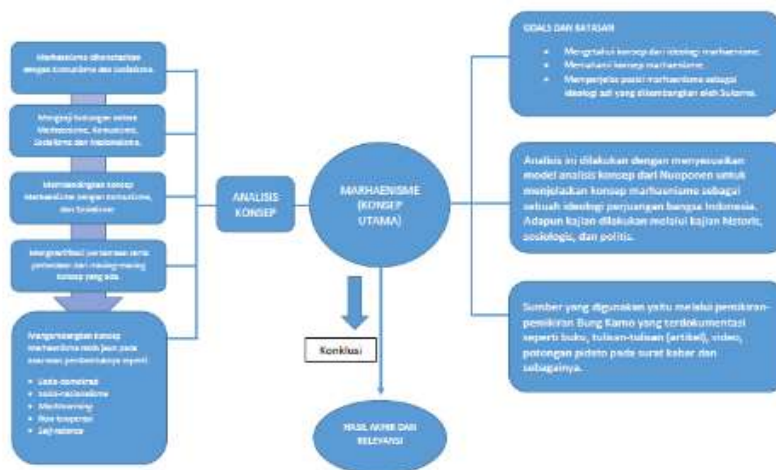
(2018) yang mengkaji paham marhaenisme melalui pendekatan historis yang menghasilkan kesimpulan bahwa paham marhaenisme menjadi simbol kebangkitan dan semangat jiwa seluruh rakyat Indonesia yang bebas dari segala bentuk penjajahan baik bersifat fisik maupun non-fisik. Marhaenisme juga dikaitkan dengan perlawanan masyarakat yang tertindas oleh sistem kapitalisme, imperialisme, feodalisme, dan kolonialisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis konsep dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih dengan mempertimbangkan aspek kedalaman analisis. Seperti dikatakan oleh Pratama & Mutia (2020) bahwa “penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan kebenaran dalam kerangka pemecahan masalah sebagai sarana untuk membangun prinsip, konsep, teori keilmuan atau model yang berkenaan dengan masalah yang diteliti”.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan semua buku rujukan yang berkenaan dengan konsep pemikiran Bung Karno tentang paham marhaenisme serta sumber dari artikel jurnal yang relevan. Sedangkan untuk analisis data, peneliti mengambil rujukan metode analisis konsep yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Nuopponen (2010). Menurut Nuopponen (2010) analisis konsep merupakan “...an activity where concepts belonging to a whole, their characteristics and the relations that they hold within systems of concepts are clarified and described”. Pada dasarnya analisis konsep merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mendefinisikan atau menegaskan karakteristik dan hubungan sebuah konsep yang satu dengan yang lainnya secara jelas.

Gambar 1 Analisis Konsep



Sumber: diadaptasi dari analisis konsep Nuopponen, 2010

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ideologi

Ideologi merupakan ide, pemikiran atau gagasan yang membentuk keyakinan atau paham. Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Perancis, yaitu “*Idéology*” yang terdiri dari 2 suku kata, yakni “*Ideo*” dan “*Logos*” yang dalam bahasa Yunani berarti logika dan rasio. Jika diterjemahkan ke dalam pengertian secara terminologis, “*Idéology*” dapat diartikan sebagai “..Ilmu yang mengkaji tentang hakikat ide dan gagasan.” Al Muchtar (2016) mendefinisikan ideologi sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Sedangkan Suseno (2015) mengartikan ideologi dari 2 sudut pandang, yakni secara luas dan sempit. Ideologi secara luas digunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sedangkan dalam arti sempit, ideologi merupakan gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang ingin ditentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Selanjutnya, ideologi dalam arti sempit tersebut oleh Suseno disebut sebagai ideologi tertutup karena sifatnya yang memaksa dan mengatur.

Jika kita tinjau secara etimologis maupun terminologis, ideologi bukan hanya sekedar ide maupun gagasan dalam bentuk konsep kerangka pemikiran yang mengawang-awang atau utopis. Maimun (2015) dalam artikelnya mengungkapkan konsep ideologi dari beberapa pemikiran pakar, yakni Gramsci dan Roger Simon yang mendeskripsikan ideologi sebagai pemahaman yang tidak terbatas pada alam pikiran maupun sistem kehidupan, tetapi ideologi bersifat dinamis. Ideologi mempunyai eksistensi materialnya dalam berbagai aktivitas praktis tersebut. Ia memberikan berbagai aturan bagi tindakan praktis serta perilaku moral manusia, dan ekuivalen dengan agama dalam makna sekulernya, yaitu pemahaman antara konsepsi dunia dan norma tingkah laku. Oleh karena itu, ideologi merupakan pedoman atau aturan yang mengatur manusia dalam bertindak untuk mencapai orientasi politik maupun ekonomi. Pengertian tersebut juga senada dengan apa yang diungkapkan oleh Al Muchtar (2016) bahwa tugas utama dari suatu ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ini sejalan dengan pemaknaan bahwa ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekedar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik tetapi masuk pada ranah individu untuk membentuk suatu sistem nilai, sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik.

Sastraprteja (1991) lebih luas menjabarkan pengertian ideologi sebagai “seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur.” Sastraprteja juga menjelaskan beberapa unsur yang terkandung di dalam ideologi, yaitu:

- a) Adanya suatu penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan;
- b) Setiap ideologi memuat seperangkat nilai-nilai atau suatu preskripsi moral;
- c) Ideologi memuat suatu orientasi pada tindakan, ideologi merupakan suatu pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat di dalamnya.

Sebagai bentuk pemahaman tentang kenyataan, ideologi berbeda dari pandangan hidup, karena ideologi lebih eksplisit dan tegas dalam perumusannya. Ideologi dalam hal

ini berbeda pula dari ilmu pengetahuan yang merupakan hasil dari analisis objektif terhadap fakta dan kebenarannya dapat diuji. Namun, antara ideologi dan ilmu pengetahuan tidak perlu ada pertentangan. Salah satu kecenderungan ideologi adalah melebih-lebihkan sudut pandangnya dan kerap kali menjadi doktriner, dalam arti cenderung mengklaim seluruh kebenaran, sehingga pemahaman mengenai kenyataan mengalami distorsi. Terhadap ideologi ilmu pengetahuan dapat berfungsi meluruskan distorsi tersebut dan membuat lebih realistis. Sebaliknya, ideologi dapat memberikan dorongan pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan orientasi pemanfaatannya.

Salah satu fungsi penting lainnya dari ideologi adalah membentuk identitas kelompok atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk “memisahkan” *ingroup* (kita) dari *outgroup* (mereka). Dengan demikian, ideologi berfungsi mempersatukan. Apabila kita bandingkan dengan agama, agama berfungsi juga mempersatukan orang dari berbagai pandangan hidup bahkan dari berbagai ideologi. Sebaliknya ideologi mempersatukan orang dari berbagai agama. Oleh karena itu, ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial.

Dengan demikian ideologi berfungsi sebagai apa yang disebut oleh Sastraprateja (1991) sebagai “*solidarity making*,” dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi. Fungsi pemersatuan tersebut bisa terlihat melalui semboyan seperti “Kesatuan dalam perbedaan” atau “Perbedaan dalam kesatuan.” Dalam kasus-kasus tertentu, ideologi dapat juga menciptakan ketegangan apabila ideologi itu merupakan ideologi yang dipaksakan oleh sekelompok kecil orang. Dari sejumlah definisi dan pemaknaan ideologi tersebut, dapat diidentifikasi ciri-ciri konsep ideologi yang secara umum menurut Al Muchtar (2016) dapat dicirikan melalui dua dimensi kajian, yaitu dimensi kajian sosiologis yang membahas tentang ideologi di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat penuh dengan ragam ideologi yang muncul sebagai hasil pemikiran perorangan atau kolektif dalam menemukan gagasan komprehensif untuk membangun dan mengaktualisasikan berbagai kepentingan bersama. Kemudian dimensi kajian ideologi dari aspek ilmu politik yang bermuara dari filsafat politik. Ideologi sebagai konsep politik dan dihasilkan dari pemikiran politik untuk dikembangkan menjadi lembaga politik dan digunakan untuk mencapai tujuan politik. Kedua kajian ini saling melengkapi dalam memberikan makna ideologi.

Marhaenisme Bung Karno

Setelah melakukan analisis konsep dari istilah marhaenisme, didapatkan relasi marhaenisme Bung Karno dengan konsep ideologi lain yang mempengaruhi landasan berpikir Bung Karno ketika itu. Adapun konsep-konsep tersebut meliputi: sosialisme, komunisme, nasionalisme, dan islamisme. Secara harfiah, istilah marhaenisme merujuk kepada nama seorang petani yang tidak sengaja Bung Karno temui ketika sedang mengayuh sepedanya ke daerah persawahan di selatan Kota Bandung. Ia kemudian berhenti sejenak dan memperhatikan petani tersebut. Lalu tanpa ragu Bung Karno menghampirinya dan berdialog untuk menggali informasi mengenai kondisi sebenarnya si petani itu. Melalui obrolan-obrolan tersebut, Bung Karno mendapatkan fakta dari sang Petani bahwa sawah yang ia garap merupakan sawah miliknya yang diwariskan dari orang tuanya, alat-alat yang digunakan untuk membajak sawah juga merupakan miliknya, namun hasil yang didapat tidak dijual kembali lantaran hanya cukup

untuk memberi makan keluarganya saja. Kejadian tersebut yang kemudian mengilhami Bung Karno untuk menamai konsep yang selama ini ia kembangkan tentang sosialisme khas Indonesia dengan nama “Marhaen.” Pada akhirnya, istilah marhaen menjadi paham yang digunakan untuk merepresentasikan rakyat Indonesia yang dimelaratkan oleh imperialisme dan kapitalisme eksploitatif kaum borjuis. Sehingga Bung Karno memosisikan marhaenisme sebagai sosialisme Indonesia dalam praktik (Adams, 2018).

Marhaenisme dapat dikatakan lahir dari alam berpikir Bung Karno yang progresif dan revolusioner. Hal ini tidak lepas dari latar belakang Bung Karno yang memang sedari kecil sudah memiliki antusiasme terhadap politik dan senang berorasi. Jiwa kepemimpinan dan kharismanya juga tidak diragukan lagi, karena di beberapa kesempatan, Sukarno bisa mengorganisir massa dan membakar semangat mereka yang seolah “tenggelam” dalam cita-cita yang ingin diwujudkan Bung Karno. Dengan kepribadian yang dimiliki Sukarno tersebut, maka tidak butuh waktu lama bagi Sukarno untuk dapat menjadi salah satu tokoh pergerakan yang sangat penting. Pemikiran-pemikiran radikal-revolusionernya banyak dipengaruhi oleh para tokoh nasional, salah satunya yaitu Tjokroaminoto yang menjadi mentor politiknya. Melalui Tjokroaminoto, Bung Karno belajar tentang fungsi politik sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat. Dari Tjokroaminoto juga Bung Karno belajar tentang pergerakan modern dan bagaimana memanfaatkan media massa untuk menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan.

Selain itu, di tempat Tjokroaminoto, Bung Karno mendapat berbagai macam pengaruh aliran pemikiran, baik pemikiran kiri maupun kanan. Seperti Ki Hadjar Dewantoro yang memberikan corak pengaruh tentang sintesis pemikiran Barat dan tradisional Jawa. Kemudian Hendrik Sneevliet dan Alimin yang memperkenalkan Sukarno dengan paham komunisme Karl Marx. Lalu ada Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo yang berhasil memukau Sukarno dengan konsep nasionalisme, khususnya nasionalisme sekuler. Sedangkan nilai-nilai keislaman sendiri diperoleh Bung Karno dari Tjokroaminoto yang selalu mengingatkan keluarga serta pengikutnya dalam lingkungan organisasi SI (Sarekat Islam) untuk menempatkan Islam sebagai fondasi utama dalam bertindak dan berperilaku sehingga Islam dapat menjadi solusi bagi kebahagiaan umat. Tjokroaminoto juga selalu mengajarkan tentang keberanian, keikhlasan, kesetiaan, dan kecintaan kepada sesuatu yang benar. Dalam pandangan Tjokroaminoto, ilmu itu haruslah diperoleh melalui akal, tetapi jangan sampai dipisahkan dari budi pekerti dan pendidikan ruhani (Wicaksana, 2020).

Pada tataran paham nasionalistik, Bung Karno mewujudkannya melalui gerakan marhaenisme sebagai sosialisme Indonesia dalam praktik yang menekankan pada aspek persatuan rakyat. Hal tersebut kemudian dibandingkan dengan gerakan *swadesi* rakyat India. Bung Karno (2019) menjelaskan bahwa imperialisme yang dilakukan oleh Inggris di India merupakan imperialisme dagang. Maka, untuk terbebas dari model imperialisme tersebut, India membuat gerakan nasionalisme borjuis di mana gerakan tersebut berfokus pada pemboikotan barang-barang buatan Inggris dan berdikari untuk memenuhi kebutuhan negara yang diciptakan dari dalam negeri sendiri sehingga Inggris kesulitan untuk memonopoli perdagangan di India. Beda halnya dengan Indonesia, di Indonesia tidak memiliki nasional borjuis apalagi nasional borjuis yang revolusioner, yang ada hanya *restan* yaitu rakyat jelata yang tidak termasuk ke dalam kelompok-kelompok borjuis itu. Mengapa sulit untuk bisa menggerakkan borjuisme nasional? Hal tersebut dikarenakan model imperialisme Belanda merupakan *finanz-capital* yaitu dengan cara membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan buruh-

buruh murah, sewa tanah murah sehingga banyak dari rakyat Indonesia ketika itu menjadi kaum yang tertindas, tenaganya dieksploitasi dan digunakan hanya untuk keuntungan dan kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga penjajahan di semua lini itulah yang pada akhirnya menghambat borjuisme nasional Indonesia. Menyadari hal tersebut, maka Bung Karno mencoba untuk mempersatukan kaum-kaum tertindas ini, para kaum-kaum progresif yang revolusioner baik dari kelompok proletar maupun non-proletar untuk ikut bergerak bersama dalam wadah perjuangan dan persatuan. Revolusioner dan progresif menjadi hal yang ditekankan oleh Bung Karno dalam pergerakan nasional yang melibatkan seluruh kelompok elemen masyarakat, khususnya kaum marhaen. Hal tersebut sangat penting di atas semua golongan yang ada, karena revolusioner diperlukan untuk mendobrak hegemoni Imperialisme, tidak harus dari golongan proletar, tidak harus dari golongan demokrasi formal, tidak harus dari golongan sosialis, karena di antara golongan-golongan itu tidak semua revolusioner.

Kemudian konsep sosialisme yang Bung Karno gunakan dalam ideologi marhaenisme yaitu sosialisme Indonesia. Sosialisme sendiri diartikan Bung Karno sebagai kehendak untuk memperoleh keadilan secara sama rasa dan sama rata. Sosialisme itu usaha memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan untuk semua manusia tanpa ada eksploitasi. Hal-hal yang terkait dengan sosialis demokrat, anarkis, komunis, utopis sosialis, religius sosialis, nihilistic sosialis, ilmiah sosialis, semua disebut oleh Bung Karno dengan satu istilah, yaitu “Sosialis”.

Mintz (2017) mengatakan jika kita ingin mengetahui makna sesungguhnya dari sosialisme Indonesia, maka kita harus menyelami pemikiran Bung Karno tentang sosialis itu sendiri. Sosialisme Indonesia sangat erat dengan konsep marhaenisme Bung Karno dan juga Marxisme. Bung Karno bahkan pernah mengatakan jika marhaenisme itu adalah Marxismenya Indonesia. Barang siapa yang tidak mempraktekkan Marxisme maka ia hanya seorang pseudo marhaenis. Jika ia menyebut dirinya sebagai seorang yang radikal revolusioner tetapi bukan Marxis, maka dia hanya pseudo Marxis. Sukarno juga membedakan antara sosialisme dan Marxisme, karena menurutnya kedua paham tersebut tidaklah berada dalam satu kesamaan makna. Sosialisme itu akar dari pemikiran Marxisme, tetapi sosialisme tidak identik dengan Marxisme, karena sosialisme memiliki berbagai macam corak. Namun, komunisme sebagai manifesto dari pemikiran Marx, Engels, dan Lenin menjadi tren pergerakan sosialisme di Indonesia. Komunisme memiliki kesamaan tujuan dengan sosialisme, yaitu mendambakan keadilan dan kebahagiaan tanpa adanya eksploitasi. Tetapi, tidak semua aliran sosialisme dapat diterima Bung Karno, salah satunya yaitu sosialisme ala Schermerhorn dengan “sosialisme personal” nya. Aliran ini pada dasarnya meyakini bahwa sosialisme tidak akan bisa diwujudkan selama manusia belum bisa mewujudkan hati yang bersih, maka untuk mencapai itu setiap orang haruslah membersihkan terlebih dahulu hatinya. Hal tersebut tentu tidak bisa dengan mudah dilakukan, apalagi dalam upaya untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Bung Karno mengatakan bahwasannya kita tidak bisa menunggu semua orang menjadi bermoral terlebih dahulu untuk mewujudkan sosialisme. Sosialisme justru menekankan pada aspek moralitas yang tinggi, membentuk masyarakat yang bersatu tanpa perbedaan, manusia harus hidup berdampingan, menurunkan egoisme, dan mencapai masyarakat yang sejahtera serta bahagia.

Sosialisme pada akhirnya menjadi hal yang sebenarnya tidak lagi asing di dalam kehidupan rakyat Indonesia itu sendiri. Sosialisme dikatakan oleh Mintz (2017) sebenarnya mengambil bentuk dari kondisi asli bangsa dan gerakan-gerakan nasionalis.

Seperti sikap kepemilikan komunal, gotong royong, dan musyawarah untuk mufakat. Ini yang terjadi di Indonesia khususnya pada masyarakat pedesaan yang dapat disebut sebagai komunisme primitive pra-feodal dan pra-kapitalis. Maka sebenarnya konsep sosialisme terutama komunisme Marxis bukan hal baru dalam sejarah bangsa Indonesia, terutama sebagai paham perjuangan kelas. Bahkan tahun 1890, kelompok Tani yang dipimpin oleh Samin melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial ketika itu karena merasa kebebasannya dirampas oleh aturan-aturan birokrasi yang ditetapkan, salah satunya yaitu pengenaan pajak tanah pertanian. Gerakan tersebut sebenarnya merupakan akumulasi dari ketidakadilan yang selama ini dirasakan oleh para petani di akhir abad ke-19, hal ini juga dipicu oleh adanya sistem *cultursteeleel* (tanam paksa) dan eksploitasi sumber daya alam yang menimbulkan kesengsaraan para petani. Gerakan ini kemudian dianggap sebagai manifestasi komunisme murni Indonesia.

Meski secara tujuan konsep marhaenisme dan komunisme sama, tetapi dalam praktiknya sangat berbeda. Komunisme di Barat menggunakan kaum buruh sebagai kekuatan utama pergerakan untuk melawan kapitalisme dan imperialisme. Sehingga setiap orang harus menganut proletarianisme agar bisa memahami perjuangan kelas yang dilakukan oleh kaum proletar. Sedangkan marhaenisme tidak terpaku pada kaum buruh saja, karena masyarakat Indonesia itu berbeda kondisinya. Tidak bisa menggunakan komunisme yang dipakai di Barat, karena di Barat sana kapitalismenya berupa industrialisasi di berbagai sektor yang menghasilkan kelas proletar, sedangkan di Indonesia kapitalismenya berupa kapitalisme pertanian yang menghasilkan petani-petani yang melarat. Meski begitu, Bung Karno juga tidak menafikan peran buruh sebagai pelopor pergerakan, sehingga marhaen tidak hanya kaum proletar saja, tetapi juga seluruh rakyat yang sengsara, yang ditindas oleh ketidakadilan imperialisme dan kapitalisme yang eksploitatif (Sukarno, 2019).

Meski Marx dan komunismenya menjadi landasan pemikiran pergerakan kelas, tetapi sejatinya Marxisme tidak serta merta diterima begitu saja oleh golongan nasionalis dan agamis. Mereka menganggap jika Marxisis ingkar terhadap nasionalis dan ingkar kepada gerakan yang berazas ke-Islaman. Buntut dari hal tersebut pada akhirnya menciptakan perbedaan dan perselisihan paham yang menyebabkan disintegrasi pergerakan. Melihat fenomena tersebut, Bung Karno kemudian memberikan analisisnya tentang Marxisme yang ada di Indonesia. Marxisme saat ini adalah Marxisme dengan taktik yang baru, dia tidak menolak kerjasama antara golongan nasionalis dan Islamis. Jaman berkembang dan berubah, maka Marxisme yang kolot sudah ketinggalan zaman. Begitupun dengan kaum nasionalis dan Islamis yang anti terhadap Marxisme dan menunjuk gagalnya praktik Marxisme di negara Rusia tidaklah benar-benar mengerti apa itu Marxisme sebenarnya. Taktik Marxisme di Asia tidaklah kaku dan sengit terhadap kaum kebangsaan dan anti kaum keagamaan, tetapi ke-anti-an itu berubah saat ini menjadi persahabatan dan penyokongan. Kita lihat contoh bagaimana Komunis Tiongkok bisa bersahabat dengan kaum nasionalis, kemudian bagaimana persahabatan kaum Marxis dengan kaum Islamis di Afganistan (Sukarno, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, Sukarno memandang bahwa ajaran Marx tidak hanya memberi kritik dan perlawanan terhadap kaum kapitalis saja, tetapi juga memberikan harapan yang besar terhadap kehancuran hegemoni kelompok tersebut (Kasenda, 2014). Meski begitu, Bung Karno sebenarnya tidak anti terhadap dialektis antara kelompok pemilik modal dan kaum buruh. Ramalan Marx tentang runtuhnya kapitalisme hanya dijadikan Bung Karno sebagai pelecut semangat pergerakan bagi kaum Marhaen. Meski

begitu, ajaran Karl Marx tidak sepenuhnya bisa diterapkan oleh Bung Karno, karena memandang hal tersebut tidak akan mungkin bisa dilakukan di Indonesia. Sehingga sintesis pemahaman diperlukan untuk mengadaptasi pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan nilai dan karakter bangsa Indonesia. Seperti halnya Bung Karno sebagai seorang nasionalis yang memegang teguh prinsip Ketuhanan, yang mana sebenarnya itu bertentangan dengan ajaran Marxis. Maka tidak heran jika Bung Karno mencoba untuk menggabungkan tiga arus besar pemahaman itu dalam satu pengertian, yaitu Marhaenisme.

Asas Marhaenisme

Marhaenisme sebagai suatu konsep pemikiran perjuangan bangsa dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan tentunya tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur pembentuknya, yaitu asas-asas yang kemudian menjadi satu kesatuan sistem ideologi marhaenisme. Adapun asas-asas pembentuk tersebut meliputi: radikal-revolusioner, *machtvorming*, massa-aksi, non-kooperasi, *self-help & self-reliance*. Radikal-revolusioner yaitu perubahan berdasarkan kehendak zaman yang cepat. Dalam konteks perjuangan, maka radikal revolusioner merupakan perubahan secara cepat yang menginginkan berakhirnya masa imperialisme dan hal-hal yang terkait dengan penindasan serta perampasan hak secara paksa. Radikalisme di dalam kekuatan perjuangan bangsa sangat penting sekali. Radikal dimaknai sebagai hal yang tidak boleh dilakukan setengah-setengah, harus dilakukan dengan keseriusan dan kesungguhan. Maka dari itu, Sukarno selalu menegaskan tentang pentingnya rakyat yang radikal revolusioner, karena tidak ada perjuangan yang bisa mendobrak penjajahan di atas tanah Indonesia tanpa mereka yang benar-benar memiliki pemikiran dan sikap yang radikal revolusioner.

Bung Karno (1964) juga tidak memberikan batasan terhadap makna radikal revolusioner itu sendiri. Orang yang revolusioner tidak hanya mereka yang berpaham sosialis saja, bukan mereka yang dilekatkan padanya sebagai seorang proletar saja, bukan mereka yang berada di atas platform demokrasi formil saja, tetapi mereka yang benar-benar menghendaki masyarakat yang sama rasa dan sama rata tanpa kapitalisme. Revolusioner adalah orang-orang yang menentang imperialisme tidak peduli ia dari golongan apa, tidak peduli ia berpaham apa, tidak peduli ia berdiri di atas platform apa, semua yang menentang adanya penjajahan maka ia adalah seorang revolusioner.

Kemudian *machtvorming*, yaitu penyusunan kekuatan atau penyusunan tenaga. Gerakan marhaenisme tidak akan bisa dilakukan secara optimal jika tidak ditunjang dengan kekuatan politik. Seperti dikatakan oleh Bung Karno (2015) bahwa: "Politik buat saya bukanlah pertama-tama menciptakan suatu idee, politik buat saya ialah menyusun suatu kekuasaan yang terpikul oleh idee. Hanya *machtvorming* yang terpikul oleh idee itulah yang bisa mengalahkan segala musuh kaum marhaen". Jadi, kekuatan atau kekuasaan menjadi modal politik yang mau tidak mau harus dijalankan untuk melawan segala hal yang menjadi musuh marhaen, yaitu penindasan dan ketidakadilan. Namun, kekuatan dan kekuasaan tidak akan berarti tanpa dibarengi dengan idee. Maka *machtvorming* yang dimaksud Bung Karno adalah kekuatan dan kekuasaan yang dilandasi oleh prinsip. Tidak mungkin imperialisme akan tunduk pada tuntutan-tuntutan kaum marhaen jika tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan yang cukup untuk menekan mereka. Bung Karno dalam pledoinya tahun 1930 sempat mengungkapkan gagasan

mengenai *machtsvorming* ini. Menurutnya, *machtsvorming* itu merupakan sebuah perubahan besar yang dilakukan oleh mereka yang menang, tidak boleh ada keraguan dan pertimbangan untung maupun rugi untuk menghimpun *macht* tersebut. Selama rakyat Indonesia belum bisa mewujudkan *macht* yang sesungguhnya, selama rakyat masih belum bisa bersatu seutuhnya dan bercerai berai, selama rakyat belum bisa mendorong kemauan dengan kekuasaan yang teratur dan tersusun, maka imperialisme akan tetap ada di bumi Indonesia sampai kapanpun, bahkan tidak akan mungkin mereka mau menuruti apa yang menjadi tuntutan rakyat Indonesia.

Jika *machtsvorming* sudah benar-benar dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka hal yang penting selanjutnya adalah membentuk massa-aksi. Massa-aksi yaitu segenap kekuatan yang mendukung gerakan perjuangan yang berasal dari seluruh komponen masyarakat Indonesia. Massa-aksi terdiri dari jumlah massa yang sangat banyak jumlahnya, tidak hanya beribu-ribu, tapi berjuta-juta. Dalam artian yang lebih khusus, massa-aksi ditujukan bagi mereka kaum marhaen yang melakukan aksi. Bung Karno menekankan bahwa massa-aksi bukan hal yang dilakukan dikemudian hari, tetapi massa-aksi yaitu sesuatu yang terjadi saat ini, kekuatan massa itu ada dalam keseharian kita, mereka yang bergerak dalam organisasi, mereka yang menulis artikel-artikel di surat kabar, mereka yang membentuk perhimpunan, mereka yang menyelenggarakan rapat khusus, mereka yang melakukan demonstrasi, semua itu adalah bagian dari perjuangan massa-aksinya kaum marhaen.

Machtsvorming dan massa-aksi pada dasarnya menjadi hal yang penting dalam politik Bung Karno, karena kekuatan dan aksi massa yang besar dibutuhkan dalam strategi politik perjuangan. Seperti dikatakan oleh Duverger (2014) ada dua corak pengaruh yang ditimbulkan dari kekuasaan, pertama yaitu politik dilihat sebagai arena pertarungan atau medan pertempuran sehingga kekuasaan pada akhirnya hanya sekedar legitimasi rakyat saja yang pada akhirnya berujung pada perebutan kekuasaan, inilah yang disebut Duverger sebagai antagonism politik. Sedangkan aspek yang kedua, yaitu menganggap bahwa politik merupakan upaya untuk menegakkan ketertiban dan keadilan, sehingga kekuasaan menjadi pelindung bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat untuk melawan berbagai macam kepentingan kelompok tertentu. Maka kekuasaan politik dalam aspek kedua ini memainkan peran yang integratif, memihak dan melindungi kepentingan bersama *vis-à-vis* kepentingan golongan atau kelompok. Bila melihat kedua aspek tersebut, jelaslah bahwa Sukarno memainkan peran penting dalam membentuk kekuasaan dan kekuatan massa-aksi yang bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kemudian non-kooperasi, artinya tidak bekerja sama dengan pihak penjajah. Jika rakyat atau massa bekerja sama dengan penjajah, maka akan sulit untuk meraih cita-cita kemerdekaan Indonesia (Argenti & Dias, 2018). Non-kooperasi merupakan sikap anti kompromi dengan pihak Belanda. Gagasan non-kooperasi ini juga sebenarnya dari tahun 1923 pernah diungkapkan oleh Moh. Hatta yaitu mengutamakan persatuan dan tidak melakukan kerjasama dengan pemerintah kolonial. Meski begitu, ada perbedaan non-kooperasi Sukarno dengan apa yang dikehendaki Hatta. Kasenda (2014) mengungkapkan bahwa menurut Bung Karno, untuk menumbangkan kekuasaan kolonial, maka akan ada pertentangan kebutuhan antara pihak penjajah dan rakyat yang terjajah, dan pertentangan itulah yang kemudian memberi keyakinan kepada rakyat Indonesia bahwa kemerdekaan tidak akan tercapai jika rakyat Indonesia tidak menjalankan politik non-kooperasi. Keyakinan tersebut yang kemudian memunculkan konflik antara Sukarno dan Hatta

karena pada tahun 1932 Bung Hatta sempat ditawarkan untuk menjadi anggota parlemen Belanda, sehingga Bung Karno geram dan menganggap hal tersebut akan membahayakan kelompok nasionalis, karena ia yakin jika penjajah dan rakyat Indonesia tidak mungkin didamaikan. Sukarno sudah menganggap asas non-kooperasi sebagai alat perjuangan untuk memerdekakan Indonesia. Menolak menjadi anggota parlemen Belanda merupakan hal terpuji dan bukanlah sebuah anarki, justru yang anarki jika menolak duduk dalam parlemen nasional. Namun, bagi Hatta, Sukarno justru sudah membelokkan makna sebenarnya dari non-kooperasi, karena ia menganggap non-kooperasi sebagai dogma yang bersifat radikal untuk dijadikan senjata untuk mencapai kemerdekaan. Sukarno sangat meyakini jika non-kooperasi mampu mendatangkan massa-aksi dan *machtsvorming*.

Selanjutnya yaitu *self-help & self-reliance*. *Self-help* sendiri artinya yaitu kemandirian dan tidak bergantung kepada orang lain. Menurut Dedi (2018) bahwa *self-help* sebenarnya dapat dimaknai sebagai apa yang disebut oleh Bung Karno dengan berdikari ‘berdiri di atas kaki sendiri’. Konsep ini dapat menjadi ciri atau karakter dari kemandirian bangsa, yang menjadi indikasi maju tidaknya suatu bangsa. Hal ini saling terhubung dengan asas-asas sebelumnya, bahwa pihak imperialis tidak akan mau memberikan hak-hak yang dituntut oleh negara terjajah, sehingga mau tidak mau kita harus mandiri di segala bidang, maka dengan begitu, kita tidak perlu lagi bergantung kepada bangsa lain. Kemudian *self-reliance*, masih sangat berkaitan dengan konsep berdikari Bung Karno, hanya saja pada *self-reliance* ini lebih menekankan kepada kepercayaan diri. Menurut Mawarti & Sundawa (2016) *self-reliance* “...mengacu pada keadaan yang penuh dengan kemandirian, kreatifitas, keaslian, dan kepercayaan pada kekuatan diri untuk menciptakan kebahagiaan”. Dengan kata lain, *self-reliance* adalah cara bangsa Indonesia untuk mandiri dan percaya pada kekuatan diri sendiri tanpa mengandalkan orang lain untuk memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar sendiri yang mengacu pada nilai-nilai perjuangan yang dianut.

Kelima asas marhaenisme yang telah dijelaskan tersebut kemudian diramu oleh Bung Karno ke dalam istilah sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme. Sosio-demokrasi merupakan suatu sistem yang tidak hanya mengakomodasi kepentingan elit politik saja, tetapi juga bertujuan untuk mengubah nasib rakyat dan menghilangkan kemiskinan. Adapun bentuk dari sosio-demokrasi ini yaitu berupa demokrasi dalam bidang politik serta ekonomi. Latif (2019) sosio-demokrasi merupakan demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya memedulikan hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, di mana hal tersebut harus berdasarkan asas *self-help & self-reliance*, bukan demokrasi ala Barat atau Eropa. Sosio-demokrasi harus mengakomodasi kepentingan rakyat. Lalu sosio-nasionalisme yaitu nasionalisme yang tidak hanya mengacu pada aspek politik saja, tetapi juga ekonomi. Sosio-nasionalisme bermaksud untuk memperbaiki keadaan masyarakat luas agar tidak lagi tertindas, tidak ada lagi kaum yang celaka, dan tidak ada lagi kaum yang sengsara.

Relevansi Asas Marhaenisme Pasca Reformasi

Di akhir masa orde lama pada rentang waktu 1965-1966, Sukarno ditengarai ingin digulingkan oleh kelompok komunis pimpinan Kolonel Untung yang sebelumnya telah membuat propaganda dengan menyebarkan berita bahwa ada dewan jenderal bentukan Angkatan Darat yang akan mengukudeta Bung Karno. Selanjutnya kejadian tersebut

kemudian berujung pada tragedi berdarah G 30 S/PKI yang mengawali transisi rezim pemerintahan untuk pertama kalinya. Tuntutan massa yang anti komunis membuat legitimasi sang pemimpin besar revolusi tersebut menjadi terancam, karena Bung Karno mendapat sentimen negatif dengan dikaitkan pada tragedi serangan 30 September 1965 dan dianggap melindungi kelompok PKI. Selain itu, hal tersebut juga diperparah oleh stabilitas ekonomi yang menjadi catatan merah pemerintahan Sukarno kala itu sehingga inflasi tidak bisa dihindarkan lagi dan menyebabkan kesengsaraan masyarakat, khususnya mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah (Kasenda, 2013).

Gelombang besar demonstrasi terjadi di mana-mana yang menuntut Sukarno untuk segera melakukan perubahan dan tindakan cepat. Aksi ini kemudian menghasilkan tuntutan yang kita kenal dengan istilah Tritura (tiga tuntutan rakyat); Isi tuntutan tersebut yaitu bubarkan PKI, retool Kabinet Dwikora, dan turunkan harga barang. Bung Karno merespon tuntutan tersebut sebagai sebuah ancaman serius terhadap pemerintahannya. Akhirnya tekanan-tekanan dari mahasiswa dan juga taktik “gerilya” dari pihak Angkatan Darat ketika itu, terutama kelompok yang anti komunis dan berseberangan dengan Bung Karno berhasil menyudutkan beliau untuk mengeluarkan supersemar (surat perintah 11 Maret) yang diberikan kepada Suharto dalam rangka pemberian mandat kekuasaan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Walaupun hingga saat ini kebenaran/keaslian dari supersemar ini masih menjadi bahan perdebatan publik, karena supersemar yang beredar memiliki beberapa versi.

Setelah supersemar diberikan kepada Suharto, Bung Karno secara perlahan mulai kehilangan kekuasaannya, bahkan legitimasi Sukarno sebagai presiden justru malah semakin di ujung tanduk. Pertanggungjawabannya di depan MPRS yang berjudul nawakarsa ditolak dan Sukarno hanya diposisikan sebagai presiden mandataris MPRS hingga Suharto dilantik menjadi presiden pada Maret 1967 karena Sukarno dianggap tidak dapat lagi menjalankan tugasnya sesuai dengan UUD. Orde baru terbentuk, rezim berganti, pemerintahan di bawah kepemimpinan Suharto mulai berjalan. Sang jenderal besar revolusi pun berakhir menjadi tahanan politik rezim orde baru saat itu sampai pada akhir hayatnya. Ideologi marhaenisme pasca lengsernya Bung Karno pun mengalami kemunduran karena dianggap beraliran kiri sehingga menyebabkan pemahaman ini dibatasi gerakannya. Padahal, fakta sejarah membuktikan bahwa marhaenisme tidak bisa dilepaskan dari proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Pada sidang pengusulan dasar negara dalam forum BPUPKI tahun 1945, Sukarno menjawab permintaan dari ketua sidang BPUPKI yaitu Radjiman Wediodiningrat untuk memberikan konsepsi dasar negara dalam pengertian dasar filsafat “*philosophische grondslag*”. Sebelumnya, rumusan-rumusan yang diberikan para tokoh seperti Supomo, Muh. Yamin, Ki Hadi Bagus Kusumo belum bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh ketua BPUPKI. Namun, gagasan-gagasan itu kemudian menjadi masukan penting bagi Sukarno dalam merumuskan konsepsi dasar negara yang dituangkan dalam lima sila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Bung Karno juga menawarkan alternatif kepada forum, jika tidak berkenan dengan lima sila tersebut, maka bisa diperas menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Sosio-nasionalisme merupakan hasil perasan dari kebangsaan dan internasionalisme serta dan perikemanusiaan. Lalu sosio-demokrasi yang bukan merupakan demokrasi Barat, tetapi politik ekonomi demokrasi dan politik demokrasi. Kemudian yang terakhir adalah ke-

Tuhanan yang menghormati satu dengan yang lain. Kemudian Bung Karno menawarkan kembali kepada forum, jika tidak suka trisila, dan menginginkan simbolik yang hanya satu saja, maka ditawarkannya konsep ekasila, yaitu gotong royong (Latif, 2019). Jelas bahwa konsepsi yang dikemukakan Sukarno tersebut merupakan hasil dari pemikiran beliau yang telah digali dari pengalaman bangsa serta kondisi bangsa Indonesia dari zaman kerajaan hingga munculnya imperialisme asing. Dalam konsep Pancasila juga terkandung asas-asas marhaenisme Bung Karno yakni sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Lalu apakah marhaenisme masih relevan dengan situasi saat ini pasca reformasi? Pratama (2021) mengungkapkan bahwasannya:

“Jika marhaenisme dijalankan sebagai ideologi secara luas, mungkin sudah tidak relevan lagi, karena marhaenisme pada dasarnya merupakan ideologi perjuangan yang radikal dan revolusioner untuk membangkitkan semangat juang kaum marhaen melawan borjuisme dan imperialisme kapitalis saat itu. Namun, asas-asas marhaenisme seperti kemandirian ekonomi, keberpihakan terhadap kaum-kaum yang lemah dan tertindas, sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme yang berketuhanan dapat dikatakan masih sangat relevan dengan keadaan saat ini”.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa marhaenisme tidak bisa kita jalankan sesuai dengan konsep asli Bung Karno. Karena sejatinya marhaenisme merupakan alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Maka, yang bisa diadaptasi adalah asas-asas marhaenisme itu sendiri yang meliputi sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Bung Karno (2019) sendiri pernah membedakan antara asas, asas perjuangan, dan taktik. Asas merupakan sesuatu yang menjadi dasar tatanan kehidupan masyarakat, tidak terbatas pada apakah kita sudah merdeka atau belum. Asas sejatinya tertanam dalam jiwa setiap rakyat Indonesia. Sedangkan asas perjuangan yaitu usaha-usaha untuk mencapai kemerdekaan, jika sudah merdeka, maka berakhir pula asas perjuangan tersebut. Kemudian taktik, yakni cara-cara yang dilakukan untuk menjaga kemerdekaan itu. Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir kata Bung Karno, melainkan jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur, kemerdekaan hanyalah alat, bukan tujuan. Taktik bisa berubah mengikuti kondisi zaman, maka dengan taktik, masalah serta tantangan bisa dijawab dengan menyesuaikan kepada taktik yang dilakukan. Taktik ibarat bidak catur yang penuh dengan pertimbangan serta kehati-hatian dalam melakukan suatu tindakan agar tidak salah melangkah.

Menurut Pratama (2021) marhaenisme dapat dijadikan sebagai “pemecah” arus gelombang gempuran ideologi asing seperti demokrasi liberal, neo-kolonialisme, dan neo-kapitalisme yang sedang mencengkram Indonesia di awal abad ke-21 saat ini. Marhaenisme bisa dipahami sebagai cara untuk memahami Pancasila secara “kaffah” agar rakyat Indonesia bisa benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan sungguh-sungguh. Demokrasi dan politik yang dibangun haruslah demokrasi dan politik yang berlandaskan Pancasila, ekonomi yang dibangun haruslah ekonomi Pancasila, kebijakan yang diambil pemerintah juga haruslah berlandaskan Pancasila.

SIMPULAN

Konsep dari marhaenisme Sukarno yaitu mengarah kepada perjuangan kaum marhaen agar bisa terbebas dari imperialisme dan kapitalisme yang eksploitatif. Marhaen sendiri adalah istilah yang diambil Soekarno sebagai representatif rakyat Indonesia yang tertindas dan tidak berdaya. Asas-asas pada marhaenisme meliputi radikal-revolusioner, *machts vorming*, massa-aksi, non-kooperasi, dan *self-help & self reliance*. Kelima asas tersebut kemudian disebut Bung Karno sebagai sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Marhaenisme sendiri berperan dalam menginfiltrasi pemikiran Bung Karno pada saat mengemukakan konsep dasar negara Indonesia yang termanifestasi dalam Pancasila.

Meskipun tidak secara formal termaktub dalam sila, tetapi makna tersirat sempat diungkapkan Bung Karno dalam trisila yang menyertakan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Meskipun marhaenisme sempat mengalami kemunduran, terlebih pada masa orde baru, karena dianggap beraliran kiri yang dipengaruhi pemikiran marxis, tetapi ideologi ini tetap terjaga, walaupun sudah kehilangan pamornya. Namun, relevansi asas marhaenisme masih bisa digali dan dikaji lebih dalam, terutama pada aspek politik, ideologi, dan sosial. Marhaenisme pada dasarnya tidak dapat benar-benar dijalankan secara luas karena fungsinya sebagai ideologi perjuangan, tetapi asas-asasnya masih relevan dan bisa untuk dikaji bersama dalam rangka memperkuat pemahaman kita tentang Pancasila.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam penyelesaian artikel ini, semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama bagi pendidikan kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. (2018). *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. Yogyakarta: PT. Media Pressindo.
- Al Muchtar, S. (2016). *Ideologi Pancasila*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Argenti, G., & Dias, D. S. I. (2018). Soekarno's Political Thinking About Guided Democracy. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(2), 46–63. <https://doi.org/10.35706/JPI.V3I2.1654>
- Dedi, A. (2018). Pemikiran Politik Soekarno, Bung Hatta, dan Tan Malaka dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 527–532. <https://doi.org/10.25157/DINAMIKA.V4I4.873>
- Dewantara, A. W. (2017). *Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia dalam kacamata Soekarno)*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Duverger, M. (2014). *Sosiologi Politik* (Daniel Dhakidae, Penerj.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Fajar Pratama, F., Asyiah, A. K., & Chandra, D. (2021). Reactualization of Marhaenism Principles to Promote Marginal Community's Social Welfare. *JURNAL PENDIDIKAN ILMU SOSIAL*, 30(1), 72–88. <https://doi.org/10.17509/JPIS.V30I1.29497>
- Kasenda, P. (2013). *Hari-Hari Terakhir Sukarno*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kasenda, P. (2014). *Sukarno Muda Biografi Pemikiran 1926-1933*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kuswono. (2016). Marhaenism: Social Ideology Create by Sukarno. *HISTORIA : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 4(2), 119–130. <https://doi.org/10.24127/HJ.V4I2.549>
- Latif, Y. (2019). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lumanauw, N. (2015). Jokowi: Marhaenisme Asas Paling Cocok bagi Rakyat Indonesia. Diambil 13 Maret 2022, dari www.beritasatu.com/ website: <https://www.beritasatu.com/politik/297283/jokowi-marhaenisme-asas-paling-cocok-bagi-rakyat-indonesia#!>
- Maimun. (2015). Aktualisasi Pendidikan Keteladanan dalam Meredam Ideologi Radikal di Indonesia Memperkokoh Jatidiri PKn. *Prosiding Seminar Nasional: Penguatan Komitmen Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKn*, 255–263. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mawarti, R. A., & Sundawa, D. (2016). Peranan Civic Community dalam Mendorong Pemuda sebagai Pelopor Kemandirian Bangsa (Studi kasus pada komunitas “Pasukan Kresek” di Kabupaten Malang Jawa Timur). *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 16(2), 63–84. <https://doi.org/10.19109/NURANI.V16I2.934>
- Melawati, C. E., & Kuswono. (2018). Marhaenisme: Telaah Pemikiran Sukarno Tahun. *Swarnadwipa*, 2(3), 153–163.
- Mintz, J. S. (2017). *Muhammad, Marx, Marhaen, Akar Sosialisme Indonesia* (Zulhilmiyasri, Penerj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuopponen, A. (2010). Methods of Concept Analysis-A Comparative Study. *LSP Journal-Language for Special Purposes, Professional Communication, Knowledge Management and Cognition*, 1(1), 4–12.
- Parwanto, I. D. (2015). *Mengerti Pancasila: Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*. Solo: Citra Sains Surakarta.
- Pratama, F. F., & Mutia, D. (2020). Paradigma Kualitatif sebagai Landasan Berpikir Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 51–64. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.18701>
- Sastrapratedja, M. (1991). Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya. In *Pancasila Sebagai Ideologi dalam berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara* (hal. 142–144). Jakarta: BP7.

- Sophiaan, M. (1994). *Kehormatan Bagi yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI*. Jakarta: Yayasan Mencerdas-kan Kehidupan Bangsa (YMKB).
- Sukarno. (1964). *Tjamkan Pantja Sila - Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Sukarno. (2015). *Nasionalisme, Islamisme, Marxisme, Pikiran-Pikiran Soekarno Muda*. Bandung: Sega Arsy.
- Sukarno. (2019). *Pokok-Pokok Ajaran Marhaenisme menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Suseno, F. M. (2015). *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wicaksana, A. W. (2020). *H.O.S Tjokroaminoto Teladan Perjuangan, Kepemimpinan, dan Kesederhanaan*. Yogyakarta: C-Klik Media.

NASIONALISME WARGA MUDA DI ERA GLOBALISASI: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERBATASAN

T Heru Nurgiansah^{1*}, Fazli Rachman²

¹⁾ Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

²⁾ Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*nurgiansah@upy.ac.id

Abstract

Citizenship Education as a curricular program was developed to form smart and good citizens. An indication of a good citizen is steadfastness and belief in a nation which can be seen from the attitude of nationalism and patriotism. This research aims to find out the attitude of nationalism of Indonesian citizens, especially the younger generation in the era of globalization. The research was conducted on the Temajuk Moon Camar, West Kalimantan border. The research method uses a qualitative case study design. Data collection techniques through observation, interviews, documentation, and literature. The research data sources consist of primary and secondary sources. The research data obtained were then analyzed using an interactive model. The results of the study show that young Indonesian citizens living on the border of the Temajuk Moon Camar, West Kalimantan, have a good attitude toward nationalism. This is evident from the behaviour of the people there, one of which is not willing to leave Indonesian citizenship status even though access to Malaysia is easier. Although the community feels various limitations and development gaps, the firmness and belief of the nation from a high attitude of nationalism.

Keywords: citizenship education, nationalism, globalization, borders

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler dikembangkan untuk membentuk warga negara yang cerdas (*smart*) dan baik (*good*). Indikasi warga negara yang baik adalah keteguhan dan keyakinan atas sebuah bangsa dan terlihat dari sikap nasionalisme dan patriotisme. Penelitian ditujukan untuk mengetahui sikap nasionalisme warga negara Indonesia, khususnya generasi muda di era globalisasi. Penelitian dilaksanakan di perbatasan Camar Bulan Temajuk, Kalimantan Barat. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur. Sumber data penelitian terdiri dari, sumber primer dan sekunder. Data penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga negara muda Indonesia yang berada di perbatasan Camar Bulan Temajuk Kalimantan Barat memiliki sikap nasionalisme yang baik. Hal ini terbukti dari perilaku masyarakat disana, salah satunya tidak berkenan meninggalkan status kewarganegaraan Indonesia meskipun akses ke negara Malaysia lebih mudah. Walau masyarakat merasakan berbagai keterbatasan dan kesenjangan pembangunan, tetapi keteguhan dan keyakinan berbangsa dari sikap nasionalisme yang tinggi.

Kata kunci: pendidikan kewarganegaraan, nasionalisme, globalisasi, perbatasan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara terluas di Dunia. Secara geografis, wilayahnya membentang dari ujung timur Papua sampai ujung barat Sumatera dengan ribuan pulaunya. Dari sekian banyak pulau tersebut, Indonesia berbatasan langsung didaratan dengan negara Malaysia, Papua New Guni, dan Timor Leste. Dengan demikian, wilayah perbatasan tersebut menjadi wilayah yang memiliki perhatian khusus dari pemerintah. Suatu wilayah negara haruslah memiliki batas-batas yang jelas, tegas, dan dapat diukur (Bria, 2018). Batas yang jelas dan dapat diukur akan memudahkan pemerintah dalam memetakan wilayah teritorialnya masing-masing sehingga dapat menghitung angka pasti penduduk yang tersebar di wilayah tersebut. Selain itu, dengan pemetaan wilayah, pemerintah Indonesia bisa mengatasi beragam persoalan dengan tepat guna dan tepat sasaran.

Kawasan perbatasan di Indonesia kerap kali dibangun dengan pendekatan keamanan dengan menyebarkan unsur militer di sepanjang kawasan perbatasan (Dedees, 2016). Hal ini menjadi tradisi dan persepsi yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa daerah perbatasan menjadi wilayah yang rawan dan riskan terjadinya tindak kejahatan. Padahal jika ditelusuri lebih jauh, ada hal yang lebih menakutkan dari pada tindak kriminal di perbatasan, yakni sikap nasionalisme warga negaranya. Penguatan nasionalisme warga muda didaerah perbatasan urgen dilakukan dalam rangka penguatan integrasi nasional (Murdiono, Suyato, & Arpanudin, 2020).

Bagi masyarakat yang tinggal di pusat kota dan bergelimang kemudahan dalam mengakses segala hal, maka sikap nasionalisme tidak menjadi hal yang dirisaukan. Berbeda dengan di daerah perbatasan, khususnya di Camar Bulan Kalimantan Barat, dengan segala keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun insprastruktur menjadi kekhawatiran pemerintahan Indonesia (Andriana, 2015; Prasajo, 2013).

Runtuhnya rasa nasioalisme menjadi polemik ditengah mayarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya arus globalisasi (Fauziah & Dewi, 2021). Arus globalisasi dimulai sejak milenium baru yang ditandai dengan semakin cepatnya arus informasi. Proses globalisasi secara konseptual selama ini dianggap mendatangkan permasalahan bagi nasionalisme (Murdiono et al., 2020). Globalisasi berlangsung disemua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain (Nurgiansah, 2021).

Nasionalisme membentuk ikatan bersama. Nasionalisme merupakan jiwa dan semangat serta rasa cinta terhadap bangsa baik dalam dalam kebersamaan maupun dalam pengorbanan demi kepentingan bersama (Suastika, 2013). Sikap nasionalisme dan patriotisme sejalan dengan sikap bela negara warganya. Karenanya nasionalisme erat kaitannya dengan suatu kesadaran atau keinsyafan warga terhadap suatu bangsa (Kusumawardani & Faturochman, 2004). Nasionalisme merupakan kecintaan dan keyakinan yang diteguh warga atas suatu bangsa dan nasionalitasnya (Kusumawardani & Faturochman, 2004). Jika dahulu konteks bela negara adalah mengangkat senjata di medan perang, maka saat ini arti bela negara semakin luas tergantung sudut pandang. Bela Negara merupakan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan tuntunan UUD 1945 (Kurniawan & Utanto, 2018).

Untuk membentuk nasionalisme waga muda, perlu satu wahana pendidikan yang membangun sikap nasionalisme yang berkesinambungan (Werdingisih, 2018).

Pendidikan tersebut diantaranya dilakukan melalui lembaga pendidikan dari usia sekolah dasar hingga pendidikan tinggi (Werdiningsih, 2018). Pendidikan Kewarganegaraan (selanjutnya, PKn) memiliki peran penting untuk mengembangkan warga muda (*young citizen*) menjadi warga dewasa yang memiliki sikap kewarganegaraan yang mencakup keteguhan, komitmen kebangsaan dan cinta tanah air, dan rasa tanggung jawab sebagai warga Indonesia (Rachman, Nurgiansyah, & Kabatiah, 2021). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (selanjutnya PPKn) sebagai PKn di Indonesia memiliki bertujuan untuk memupuk untuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air warga muda Indonesia (siswa) (Rachman et al., 2021). Memotret PKn di wilayah perbatasan Indonesia menjadi menarik untuk memetakan gambaran umum tentang pelaksanaan PPKn di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (Khoiri & Irwan, 2020). Penelitian ini dilakukan di Camar Bulan di Kalimantan Barat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Observasi dilakukan pada masyarakat Camar Bulan di Kalimantan Barat. Wawancara dilakukan terhadap tokoh adat setempat, masyarakat, dan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dokumentasi dilakukan sebagai penunjang data sejauh mana penerapan sikap nasionalisme dilakukan. Hasil penelitian juga didukung oleh artikel yang relevan yang telah terpublikasikan, baik di jurnal nasional maupun internasional.

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan skunder. Data primer diperoleh dari sumber data secara langsung seperti tokoh adat setempat, masyarakat, dan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; serta dari data hasil observasi. Sementara sumber data skunder diperoleh dari studi dokumen dan studi literatur. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif menggunakan metode analisis data interaktif (Emriz, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sikap nasionalisme warga di Camar Bulan Kalimantan Barat dapat dilihat dari sikap bela negaranya. Pendidikan Bela Negara masih memerlukan konsep yang konkret dan sesuai dengan heterogenitas peserta (Yunita & Suryadi, 2018). Pendidikan bela negara perlu diajarkan di sekolah-sekolah terutama di daerah perbatasan. Disinilah diperlukan peran semua pihak untuk bekerja sama, antara lain pemerintah pusat, pemerintah setempat, dan pendidikan terkait, dan peran guru PPKn.

Sebagai profesi yang mulia, guru PPKn tidak hanya dituntut untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dalam aspek kognitifnya saja. Akan tetapi sikap atau apaktif siswa agar berperilaku baik menjadi tantangan tersendiri. Guru PPKn harus memberikan contoh agar sikap nasionalisme warga di perbatasan dapat terbentuk dengan baik. Selain itu, pembiasaan upacara bendera setiap hari senin dapat menumbuhkan kebiasaan positif bagi masyarakat sekitar agar lebih mencintai negaranya sendiri.

Kebijakan pemerintahan pun perlu mendukung upaya-upaya pembentukan sikap nasionalisme masyarakat di daerah perbatasan, seperti mewajibkan masyarakatnya untuk

berbahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, memperbaiki fasilitas umum dan sarana prasarana di daerah perbatasan, dan menyelenggarakan kegiatan bela negara.

Penyelenggaraan bela negara dalam upaya pertahanan negara didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara (Wahyudi, 2017). Dengan begitu, mata pelajaran yang paling pas menunjang konsep bela negara adalah mata pelajaran PPKn. Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Konsep bela negara sendiri mengalami perubahan yang signifikan. Jika dahulu kegiatan bela negara identik dengan kegiatan fisik yang menguras tenaga, maka di era sekarang pelaksanaan bela negara lebih bersifat humanis melalui pendekatan-pendekatan personal dengan cara menyadarkan masyarakat akan cinta tanah air melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan.

Tidak hanya melalui pelatihan, pembentukan sikap nasionalisme masyarakat di perbatasan juga menjadi fokus perhatian mata pelajaran PPKn dan guru pengampunya. Peran guru menjadi sorotan dalam menumbuhkan sikap nasionalisme warga negara muda di Camar Bulan Kalimantan Barat. Masyarakat disekitar kawasan perbatasan tidak hanya satu suku tetapi berbagai suku dengan banyak kebudayaan yang berdifusi sehingga mampu bertoleransi dan berasimilasi dengan baik (Punomo, 2013).

Proses asimilasi sendiri merupakan proses yang alamiah. Hal ini pasti terjadi di daerah yang beranekaragam budaya dan adat istiadat terlebih di daerah perbatasan antar negara yang berbeda. Untuk menjaga kelestarian budaya sendiri, maka masyarakat sekitar perbatasan perlu untuk mempunyai sikap nasionalisme melebihi sikap nasionalisme yang lainnya.

Nasionalisme di perbatasan sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sutiyono, 2018). Berbagai macam godaan untuk menanggalkan identitas negara Indonesia lebih besar, seperti kemudahan dalam berbagai akses karena jarak ke pusat kota sendiri lebih jauh sampai dengan iming-iming kehidupan yang lebih sejahtera jika mau bergabung dengan tentara nasional Malaysia. Untuk melawan itu semua, diperlukan penguatan bagi generasi muda yang tinggal di daerah perbatasan agar tetap menjunjung tinggi nasionalisme dan patriotismenya bagi negara Indonesia karena nasionalisme dan patriotisme merupakan dua hal yang beriringan. Semangat nasionalisme akan membentuk jiwa yang patriotik dan semakin tinggi jiwa patriotisme suatu masyarakat, maka kemungkinan untuk menanggalkan status kewarganegaraan Indonesia semakin kecil bahkan mustahil. Cinta tanah air dan bangsa adalah salah satu dari perwujudan jiwa patriotik (Hanifa & Dewi, 2021).

Adapun peran dari mata pelajaran PPKn dalam membentuk jiwa nasionalisme warga negara muda terletak pada konten isi materinya. Salah satu isi materi tersebut adalah Pendidikan Bela Negara (Rachman, 2021; Sari, 2018). Selain itu, konsep sejarah perjalanan bangsa pun dapat menyadarkan masyarakat kita bahwa perjuangan pahlawan pada masa lampau perlu mendapat apresiasi dalam bentuk mempertahankan kecintaan terhadap negara Indonesia. Warga negara yang akan dihasilkan dari PPKn adalah manusia yang merdeka, memahami perjalanan sejarah bangsa, cita-cita luhur dan tujuan suatu negara (Retnasari & Hidayah, 2019). Dengan demikian, warga negara muda akan semakin melek literasi yang kaitannya dengan identitas suatu negara yang akan menambah kecintaan terhadap bangsanya sendiri.

Namun masalah yang sangat kompleks bagi warga negara muda yang tinggal di daerah perbatasan adalah kesenjangan yang terjadi dengan masyarakat yang berada di tengah kota besar. Tataran ideologis nasionalisme di perbatasan terletak pada bagaimana masyarakat setempat berjuang melawan kemiskinan dan keterpinggiran, baik secara sosial, ekonomi, maupun kebudayaan (Cahyo, 2015). Tidak bisa dipungkiri, bahwa kemiskinan di daerah perbatasan disebabkan karena salah satunya adalah akses jalan menuju lokasi, jarak yang jauh membuat distribusi penyebaran bahan pangan dan kebutuhan lainnya menjadi tersendat. Bahkan dalam hal kebudayaan pun, masyarakat di perbatasan masih melakukan ritual adat istiadat setempat dan tidak jarang sebagian besar dari mereka enggan untuk menghentikan kegiatan tersebut yang jika terus dibiarkan akan menimbulkan benih-benih chauvinisme.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka peran guru dan mata pelajaran PPKn sangat diperlukan. PPKn bertujuan untuk dapat membentuk peserta didik menjadi manusia atau warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Bahrudin, 2019; Rachman et al., 2021). Semangat kebangsaan perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Semangat kebangsaan ini akan semakin memudar jika pemerintah setempat mengabaikan apa yang menjadi hak warganya. Melalui PPKn warga negara Indonesia mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang sedang dihadapi dalam bernegara (Nurgiansah, 2020; Rachman et al., 2021).

Masalah masalah yang dihadapi warga negara yang tinggal di perbatasan merupakan masalah umum yang bahkan di semua daerah pun mengalaminya. Misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Di dalam masalah kesehatan misalnya, ketersediaan jumlah rumah sakit sangat terbatas. Jika harus berobat ke pusat kota maka akses yang jauh akan membahayakan kondisi masyarakat. Maka sebagian masyarakat lebih memilih berobat ke negara Malaysia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah harus menyediakan layanan kesehatan yang optimal dengan cara membangun rumah sakit yang layak, ditambah dengan petugas medis yang profesional seperti dokter spesialis, dan ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan.

Di bidang teknologi pun masalah yang dihadapi warga negara di perbatasan hampir sama dengan masalah yang terjadi di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) lainnya. Keterbatasan sinyal dan internet membuat upaya untuk melekan literasi masyarakatnya menjadi terkendala. Tak masalah jika hal ini dibarengi dengan ketersediaan buku-buku di perpustakaan yang berkaitan dengan semangat nasionalisme dan patriotisme. Di Bidang Pendidikan pun sama, infrastruktur sekolah yang kurang memadai, tenaga guru yang profesional sedikit, dan kecilnya anggaran untuk bidang pendidikan merupakan sebagian masalah yang terjadi di daerah perbatasan.

Diperlukan sikap warga generasi muda yang penuh semangat dan memiliki cita-cita luhur yang dapat memperbaiki kondisi buruk di daerah perbatasan. Peran pemuda sangat penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa (Aisy & Nurani, 2016). Peran pemuda tersebut bisa dilakukan dengan belajar secara sungguh-sungguh, tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, lalu berperilaku baik terhadap sesama, menyingkirkan egoisme dan menjauhi sikap hedonisme.

Di era globalisasi seperti sekarang ini, sikap egoisme dan hedonisme menjadi hal yang lumrah dilakukan para generasi muda. Selain faktor tuntutan gaya hidup yang glamor, faktor lainnya adalah kurangnya kesadaran terhadap kecintaan antar sesama. Globalisasi juga ditandai dengan semakin mudahnya segala informasi untuk di akses. Perlu filter untuk menyaring segala pengaruh buruk dari luar akibat dampak globalisasi agar sikap nasionalisme warga muda tidak semakin terkikis, salah satunya dengan penguatan Pendidikan Kewarganegaraan.

PPKn merupakan segala hal ihwal yang berkaitan dengan warga negara, menyangkut segala aspek perilaku warganya terutama dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan juga merupakan beragam keilmuan dari berbagai bidang, seperti politik, hukum, ketatanegaraan, sosial, budaya, dan lain sebagainya.

PPKn selalu diajarkan dari mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dengan berbagai macam konten isi materinya. Hal ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang berpartisipasi, berjiwa nasionalis dan patrotis, serta patuh terhadap hukum atau aturan yang berlaku.

Mata Pelajaran ini sangat cocok digunakan untuk memfilter pengaruh budaya luar yang tidak sejalan dengan ideologi negara Indonesia. Banyak materi yang relavan dengan upaya pemerintah dalam menjaga sikap nasionalisme warga negara muda di daerah perbatasan. Bahkan setiap tahun selalu diadakan perbaikan-perbaikan guna memutakhirkan materinya agar sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Guru PPKn di daerah perbatasan harus mamu menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap NKRI. Pengembangan kompetensi kewarganegaraan (kompetensi dasar) sebagai salah satu cara untuk memperkuat nasionalisme (Murdiono et al., 2020).

Sikap nasionalisme warga negara dapat dibentuk dari kesamaan nasib sepenanggungan. Seperti kita ketahui, bahwa negara Indonesia mengalami pahit getirnya penjajahan dari kolonialisme barat selama berabad-abad. Akibat dari penderitaan yang sangat lama, maka masyarakat memiliki keinginan untuk melepaskan diri penjajahan dan tahun 1928 menjadi tonggak awal bersatunya masyarakat Indonesia dalam peristiwa sumpah pemuda. Selain itu, letak geografis suatu masyarakat juga akan mempengaruhi pembentukan sikap nasionalisme warga negara muda.

Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Masyarakat perbatasan identik dengan karakter keras, mandiri, dan terbiasa dengan keadaan yang berkecukupan. Namun, akibat dari pengaruh globalisasi, karakter tersebut semakin menghilang dikarenakan generasi-generasi penerusnya mulai terpengaruh dengan kehidupan yang serba tercukupi. Padahal dengan karakter yang sedemikian rupa, dapat membentuk sikap nasionalisme yang baik.

Nasionalisme memiliki resiprokalitas dengan bertumbuhnya dan meningkatnya rasa cinta terhadap bangsa, Negara, serta tanah air. Sebagai warga negara yang lahir di wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia, sudah seharusnya mereka mencintai negaranya sendiri dibandingkan dengan mengagumi bangsa lain. Rasa cinta terhadap negara Indonesia akan membuat warga negara muda berperilaku dan bersikap melindungi tanah air dan tumpah darah dari pengaruh negatif negara lain. Karena itu, PPKn menjadi relevan karena memiliki ruang lingkup kajian yaitu Pancasila, UUDNRI 1945, Bhinneka

Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Murdiono et al., 2020; Rachman et al., 2021; Winataputra, 2015).

Tujuan nasionalisme berikutnya adalah untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis dan rukun antara masyarakat dan individu Lainnya. Kerukunan antar sesama masyarakat merupakan harapan semua pihak, hal ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila yakni persatuan Indonesia. Sekalipun negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat, dan budaya, namun semua itu tidak menjadi hambatan dalam menjaga kerukunan selama sikap toleransi antar sesama tetap terjalin. Kehidupan yang harmonis pula dapat menjauhkan bangsa Indonesia dari perpecahan dan konflik horizontal.

Selain itu, nasionalisme juga bertujuan untuk membangun dan mempererat sebuah tali persaudaraan antara sesama warga masyarakat di sebuah negara. Dengan demikian, potensi munculnya konflik karena perbedaan kepentingan dapat diminimalisir. Sikap egoisme dalam mempertahankan kepentingan individu atau kelompok dapat dikesampingkan sehingga akan terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, damai sentosa.

Nasionalisme juga merupakan upaya untuk menghilangkan dan menghapuskan ekstrimisme atau tuntutan yang berlebih dari warga negara atau masyarakat kepada pemerintah. Kewajiban pemerintah adalah membuat kebijakan yang mengedepankan kepentingan bersama agar masyarakat dapat legowo dan menerima apapun yang menjadi perintah pemerintah. Di negara demokrasi seperti Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap negara dapat diakomodir dengan baik, berbeda dengan negara lain yang bersifat otoriter, maka tidak ada kesempatan bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasinya yang akan berimbas pada munculnya rasa benci terhadap negaranya sendiri.

Sikap nasionalisme juga bertujuan sebagai usaha untuk menumbuhkan sebuah semangat untuk bisa rela berkorban demi bangsa, negara, serta tanah air. Sikap rela berkorban berarti mendahulukan kepentingan bangsa dari pada kepentingan pribadi. Rela berkorban tidak hanya identik dengan mengeluarkan uang sebagai materi, tapi juga mengorbankan tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa. Sikap rela berkorban ini sejalan dengan kecintaan terhadap tanah air. Jika sikap nasionalisme warga negara muda tidak ada, maka sikap rela berkorban pun tidak akan tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

Tujuan nasionalisme yang terakhir adalah untuk menjaga sebuah Negara, bangsa serta tanah air dari serangan para musuh yang mengancam Negara, baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dapat menimbulkan disintegrasi nasional sehingga sikap nasionalisme harus ditingkatkan di kalangan generasi muda agar terciptanya keutuhan Negara Republik Indonesia. Di era globalisasi, ancaman terhadap keutuhan negara tidak lagi berasal dari kekuatan militer bangsa lain, namun dari pengaruh ideologi sehingga hal ini lebih berbahaya dari pada kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh perang. Ancaman ideologi lain bagi warga negara muda diperbatasan akan mengakibatkan lunturnya sikap nasionalisme warga negara Indonesia.

Selain tujuan, nasionalisme mempunyai ciri-ciri yang khas. Adapun ciri-ciri sikap nasionalisme secara umum meliputi rela berkorban, cinta tanah air, menjunjung tinggi nama bangsa Indonesia, bangga sebagai warga Negara Indonesia, persatuan dan kesatuan, disiplin, berani dan jujur serta bekerja keras. Semua sikap ini harus menjadi pembiasaan masyarakat di perbatasan saat mempelajari ilmu di sekolah. Harus ada sinkronisasi antara

mata pelajaran dan guru PPKn dan, sehingga pengajar mata pelajaran ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang dan menganggap enteng mata pelajaran tersebut. Pembelajaran PPKn hendaknya juga dapat diintegrasikan dengan kearifan lokal, karenanya peran guru PPKn menjadi bagian penting untuk menjaga nasionalisme warga muda diperbatasan (Bria, 2018).

Ciri nasionalisme secara khusus diantaranya; adanya sebuah kesatuan dan persatuan sebuah bangsa. Indikatornya adalah tidak terjadinya konflik, aman dan tentram. Kemudian adanya sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dan memiliki sifat nasional. Lalu adanya sebuah perjuangan yang dilakukan dan memiliki sifat nasional. Perjuangan disini berarti belajar dengan penuh kesungguhan bagi warga negara muda di daerah perbatasan dengan tidak menyalahgunakan waktu untuk kegiatan yang tidak bermanfaat.

Nasionalisme juga bertujuan untuk membentuk atau mendirikan suatu negara dan memerdekakan sebuah Negara yang merdeka, berdaulat, tidak diintervensi negara lain, dan menjadikan kekuasaan berada di tangan para rakyat sesuai dengan sistem ketatanegaraan negara Indonesia. Terakhir, nasionalisme lebih mementingkan pikiran sehingga pendidikan sangatlah berperan penting dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara. Hal ini sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

SIMPULAN

Warga negara muda Indonesia yang berada di perbatasan Camar Bulan Temajuk Kalimantan Barat memiliki sikap nasionalisme yang baik. Hal ini terbukti dari perilaku masyarakat disana, salah satunya tidak berkenan meninggalkan status kewarganegaraan Indonesia meskipun akses ke negara Malaysia lebih mudah. Walau masyarakat merasakan berbagai keterbatasan dan kesenjangan pembangunan, tetapi keteguhan dan keyakinan berbangsa dari sikap nasionalisme yang tinggi. Warga negara Indonesia yang berada disana juga senantiasa memelihara sikap nasionalisme dan patriotisme, turut berpartisipasi dalam bidang politik, dan berikrar sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang mendukung penyelesaian penelitian ini, baik secara moril maupun materi. Secara khusus, penulis sampaikan kepada tokoh adat setempat, masyarakat, dan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Camar Bulan di Kalimantan Barat yang telah berpartisipasi dalam membantu untuk mengumpulkan data penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai khazanah ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Aisy, K. V. R., & Nurani, F. (2016). Melihat sejarah nasionalisme Indonesia untuk memupuk sikap kebangsaan generasi muda. *Jurnal Civics: Media Kajian*

- Kewarganegaraan*, 13(2), 209–216. <https://doi.org/10.21831/civics.v13i2.12745>
- Andriana, N. (2015). Eksistensi Kebangsaan dan Perwujudan Keindonesiaan di Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia: Kasus Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 83–98. <https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.530>
- Bahrudin, F. A. (2019). Implementasi Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 2(2), 184–200. <https://doi.org/10.47080/propatria.v2i2.593>
- Bria, M. E. (2018). Penguatan Semangat Nasionalisme di Daerah Perbatasan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 38–43. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8379>
- Cahyo, P. (2015). Nasionalisme Masyarakat Di Perbatasan Laut: Studi Kasus Masyarakat Melayu-Karimun. *Masyarakat Indonesia*, 41(2), 147–162. <https://doi.org/10.14203/jmi.v41i2.253>
- Dedees, A. R. (2016). Melayu di Atas Tiga Bendera: Konstruksi Identitas Nasionalisme Masyarakat Perbatasan di Kepulauan Batam. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(2), 141. <https://doi.org/10.22146/jsp.10850>
- Emriz. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fauziah, I. N. N., & Dewi, D. A. (2021). Membangun Semangat Nasionalisme Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2(02), 93–103.
- Hanifa, S., & Dewi, D. A. (2021). Kesadaran Patriotik Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(4), 757–763. <https://doi.org/10.36418/japendi.v2i4.141>
- Khoiri, M., & Irwan, I. (2020). Nasionalisme Masyarakat di Perbatasan Indonesia-Singapura: Studi Kasus Masyarakat Tionghoa-Batam. *Journal of Moral and Civic Education*, 4(1), 11–18. <https://doi.org/10.24036/8851412412020232>
- Kurniawan, D. M., & Utanto, Y. (2018). Kurikulum Bela Negara Sebuah Kebutuhan Kurikulum Saat Ini dan Masa Depan. *Defendonesia*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v3i2.71>
- Kusumawardani, A., & Faturochman, M. A. (2004). Nasionalisme. *Buletin Psikologi*, 12(2), 61–72.
- Murdiono, M., Suyato, S., & Arpanudin, I. (2020). Strategi Penguatan Nasionalisme Perbatasan Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 34–43. <https://doi.org/10.24269/jpk.v5.n2.2020.pp34-43>
- Nurgiansah, T. H. (2020). Filsafat Pendidikan. In *Banyumas: CV Pena Persada*.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila. In *Solok: CV Mitra Cendekia Media*.
- Prasojo, Z. H. (2013). Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2), 417–436.

<https://doi.org/10.21580/ws.21.2.252>

- Punomo, S. (2013). Pengaruh PPKn, Lingkungan Keluarga, dan Lingkungan Masyarakat Terhadap Sikap Nasionalisme Siswa Di SMA Se-Provinsi Kalimantan Barat Perbatasan Indonesia Dengan Malaysia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rachman, F. (2021). *Modul Desain Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Solok: Mitra Cendikia Mandiri.
- Rachman, F., Nurgiansyah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2970–2984. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052>
- Retnasari, L., & Hidayah, Y. (2019). Menumbuhkan Sikap Nasionalisme Warga Negara Muda di Era Globalisasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (Studi pada Mahasiswa PGSD UAD). *Jurnal Basicedu*, 4(1), 79–88. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i1.303>
- Sari, E. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Bela Negara dalam Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. In Samsuri, H. Santoso, & A. Taufik (Ed.), *Prosiding Kongres Pengajaran dan Kebudayaan IV Tahun 2018* (hal. 46–50). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suastika, I. N. (2013). Nasionalisme dalam Perspektif Postmodernisme, Poststrukturalisme dan Postkolonialisme. *Media Komunikasi FPIPS*, 11(1), 30–44. <https://doi.org/10.23887/MKFIS.V11I1.452>
- Sutiyono, S. (2018). Reformulasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Menguatkan Nasionalisme Warga Negara Muda Di Wilayah Perbatasan. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v6i1.1824>
- Wahyudi, W. (2017). Peran Kader Bela Negara Di Kawasan Perbatasan Dalam Dinamika Hubungan Lintas Batas Negara: Studi Tentang Peran Forum Bela Negara di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(3), 19–40. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v7i3.227>
- Werdiningsih, R. (2018). Membangun Semangat Nasionalisme Generasi Muda dalam Bingkai Pendidikan Karakter. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, 13(18), 1–17.
- Winataputra, U. S. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis-epistemologis dan Rekonstruksi untuk Masa Depan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Yunita, Y., & Suryadi, K. (2018). Rancang Bangun Pendidikan Bela Negara Sebagai Wahana Pengembangan Sikap Nasionalisme Bagi Mahasiswa. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 5(2), 225–233.



Diterbitkan oleh:

Jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Medan

Jln. Willem Iskandar, Pasar V, Medan, Kode Pos 20221

Telp. (061) 6625973, 6613276, 6618754, 6613365, Fax. (061) 6614002

Email: kewarganegaraan@unimed.ac.id

Laman: <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk>

p-ISSN



e-ISSN

